



# **PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TA. 2022**

**MALANG  
2021**



**NOTA KESEPAKATAN  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD  
KOTA MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**TAHUN 2021**

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA MALANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MALANG**

**Nomor : 903/ 3216 /35.73.503/2021  
Nomor : 172/ 36 /35.73.200/2021**

**TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : Drs. H. SUTIAJI  
Jabatan : Walikota Malang  
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1 Malang  
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Malang
  
- 2 a. Nama : I MADE RIANDIANA KARTIKA, SE  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Malang  
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1A Malang
  
- b. Nama : H. ABDURROCHMAN, SH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Malang  
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1A Malang
  
- c. Nama : H. ASMUALIK, ST  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Malang  
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1A Malang
  
- d. Nama : RIMZAH, S.IP  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Malang  
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1A Malang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu kesepakatan antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum



APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022.


Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2022.

Malang, 13 Agustus 2021

WALIKOTA MALANG  
  
Drs. H. SUTIAJI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MALANG  
Ketua  
  
I MADE RIANDIANA KARTIKA, SE

Wakil Ketua  
  
H. ABDURROCHMAN, SH  
Wakil Ketua

H. ASMUALIK, ST

Wakil Ketua  
  
RIMZAH, S.IP

APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2022.

Malang, 13 Agustus 2021

WALIKOTA MALANG  
  
Drs. H. SUTIAJI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MALANG  
Ketua  
  
I MADE RIANDIANA KARTIKA, SE

Wakil Ketua

  
H. ABDURROCHMAN, SH

Wakil Ketua

  
H. ASMUALIK, ST

Wakil Ketua

  
RIMZAH, S.IP



APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2022.

Malang, 13 Agustus 2021

WALIKOTA MALANG



Drs. H. SUTIAJI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MALANG



Ketua

I MADE RIANDIANA KARTIKA, SE

Wakil Ketua

H. ABDURROCHMAN, SH

Wakil Ketua

H. ASMUALIK, ST

Wakil Ketua

RIMZAH, S.IP



**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**MALANG  
TAHUN 2021**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>COVER</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS .....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS .....	2
<b>BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH</b> .....	<b>5</b>
<b>BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH</b> .....	<b>9</b>
<b>BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN</b> .....	<b>60</b>
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	60
4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga .....	61
<b>BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	<b>63</b>
<b>BAB VI PENUTUPAN</b> .....	<b>64</b>



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 2.1</b> Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2022.....	7
<b>Tabel 3.1</b> Sinergitas Kebijakan Pemerintah Kota Malang Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional .....	10
<b>Tabel 3.2</b> Sinergitas Kebijakan Pemerintah Kota Malang Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi .....	23
<b>Tabel 3.3</b> Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah .....	36
<b>Tabel 4.1</b> Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga .....	62
<b>Tabel 5.1</b> Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 .....	63

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**LAMPIRAN I** TABEL PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

**LAMPIRAN II** PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 merupakan tahap lanjutan dari penyusunan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 sebagaimana ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah merupakan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan tahapan penting karena secara substansi, dokumen PPAS memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan. Selain itu, PPAS menjadi gambaran umum dari kebutuhan dan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian layanan kepada masyarakat termasuk penanganan dampak pandemi Covid-19, baik di bidang kesehatan, Jaring Pengaman Sosial maupun Pemulihan Ekonomi Daerah. Struktur pendanaan yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (*political will*) dari pimpinan dalam hal ini Pengambil kebijakan dan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi pada produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggung jawab, efisien, akuntabel dan transparan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Format penyusunan PPAS disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat Rencana Pendapatan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan serta Rencana Pembiayaan Daerah. Selanjutnya dokumen rancangan PPAS tahun 2022 yang telah tersusun disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2022.

## **1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Memperhatikan kondisi dan kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 bertujuan:

1. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2022 menurut Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.

## **1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Penyusunan Prioritas dan Plafon dan Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020



- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 137);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
  13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor ...);
  14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 38);

15. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 10).

## **BAB II**

### **RENCANA PENERIMAAN DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terbagi dalam 3 kelompok pendapatan yaitu (1) Pendapatan Asli Daerah (2) Pendapatan Transfer (2) dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan Potensi Daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Otonomi Daerah. Semakin tinggi kualitas Otonomi Daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp.1.051.919.231.463,00 naik Rp.275.230.196.322,00 atau sebesar 35,44% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp.776.689.035.141,00. Rincian proyeksi pendapatan asli daerah berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut.

1. Pajak daerah diproyeksikan sebesar 895.494.366.321,00 meningkat sebesar 42,23% atau Rp.265.882.986.204,00 dari target tahun 2021 sebesar Rp.629.611.380.117,00.
2. Retribusi daerah diproyeksikan sebesar Rp.66.313.075.400,00 naik 20,07% atau sebesar Rp.11.086.690.000,00 jika dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar Rp.55.226.385.400,00.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan naik 1,03% dari target sebesar Rp.25.477.842.992,00 pada tahun 2021 menjadi Rp. 25.217.322.874,00;
4. Lain-lain PAD yang sah diproyeksikan sebesar Rp.66.633.946.750,00 turun 3% jika dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar Rp.64.633.946.750,00.

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp.1.186.969.982.759,00 turun sebesar 14,05% atau Rp.194.060.329.751,00 jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 1.381.030.312.510,00. Rincian proyeksi pendapatan transfer berdasarkan jenis belanja sebagai berikut.

1. Proyeksi Transfer dari Pemerintah Pusat diproyeksi turun sebesar 14,86% atau sebesar Rp.178.004.047.100,00 dari target Rp.1.198.105.546.000,00 pada tahun 2021 menjadi Rp.1.020.101.498.900,00 pada tahun 2022.
2. Proyeksi transfer antar daerah diproyeksikan turun sebesar 8,78% atau sebesar Rp.16.056.282.651,00 dari target Rp.182.924.766.510,00 pada tahun 2021 menjadi Rp.166.868.483.859,00 pada tahun 2022.

Pendapatan transfer baik pusat mau daerah akan disesuaikan setelah terbitnya Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 dan surat keputusan gubernur Jawa Timur tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp. 65.819.100.000,00 turun 29,35% atau sebesar Rp. 27.349.660.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp.93.168.760.000,00. Hal ini dikarenakan adanya rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk mengeluarkan pendapatan BOSNAS Sekolah Swasta.

Target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA dan pinjaman daerah sebagaimana Tabel 2.1 berikut.



**Tabel 2.1** Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2022

<b>Kode</b>	<b>Penerimaan Daerah</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Dasar Hukum</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.051.919.231.463,00</b>	
4.1.01	Pajak Daerah	895.494.366.321,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah</li> <li>❖ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah</li> </ul>
4.1.02	Retribusi Daerah	66.313.075.400,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah</li> <li>❖ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum</li> <li>❖ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha</li> <li>❖ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Tertentu</li> </ul>
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	25.477.842.992,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.</li> <li>❖ Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah</li> </ul>
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	64.633.946.750,00	-
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.186.969.982.759,00</b>	
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.020.101.498.900,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ PMK Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)</li> </ul>
4.2.02	Transfer Antar Daerah	166.868.483.859,00	-
<b>4.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>65.819.100.000,00</b>	
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	-
4.3.02	Dana Darurat	0,00	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	65.819.100.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah</li> </ul>

	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.304.708.314.222,00</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		
6.1.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	149.585.125.292,59	-
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>149.585.125.292,59</b>	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>2.454.293.439.514,59</b>	

### **BAB III**

#### **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Rencana Pembangunan Kota Malang pada tahun 2022 mengambil tema “Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Dasar, Pemantapan Industri Kreatif Masyarakat dan Pemulihan Sosial Ekonomi serta Peningkatan Infrastruktur Terintegrasi”, dengan fokus pada pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi dan ekonomi kreatif. Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah Kota Malang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kota Malang. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Timur guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

Prioritas pembangunan Pemerintah Kota Malang pada Tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan tahun keempat RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas Belanja Kota Malang yang tertuang dalam Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 memuat:

1. Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional;
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi;
3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah.

Selanjutnya prioritas pembangunan daerah terinci dalam program dan kegiatan perangkat daerah beserta kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Adapun rincian Sinergitas Kebijakan Pemerintah Kota Malang terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, sinergitas terhadap prioritas pembangunan pemerintah provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah sebagaimana Tabel 3.1, Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.1** Sinergitas Kebijakan Pemerintah Kota Malang Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
1	MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			---	Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio Konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT yang layak konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	---	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang dididik dan dilatih	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase WUB Mikro yang tumbuh	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang naik menjadi usaha kecil	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi penanaman modal	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			---	Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah minat investor	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			---	Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	_____	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
			Persentase Industri Pariwisata Yang Dibina	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pemasaran Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada 7 subsektor yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Jumlah produksi peternakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian dalam kondisi baik	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Persentase peningkatan pemeriksaan sampel pangan asal hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kenaikan Skor Kelompok Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	---	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	---	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	---	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	---	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	---	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	-	-	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
			APK SD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
			APK SMP	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
			Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter PNF	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	---	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru tersertifikasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi SPM	DINAS KESEHATAN	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Medis yang berkompeten	DINAS KESEHATAN	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persentase sarana kefarmasian dan industri rumah tangga yang dibina diawasi dan memenuhi syarat	DINAS KESEHATAN	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase UKBM yang dibina	DINAS KESEHATAN	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Serta Meningkatkan Kemampuan Fungsi Sosialnya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	---	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Terpelihara Dengan Baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		---	Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal			
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	---	Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal			

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	---	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat daerah yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	---	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan ketersediaan pangan utama	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB Aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok UPPKS Aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabor Berprestasi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
			Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase cakupan wilayah operasional perpustakaan keliling di 57 kelurahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase peningkatan koleksi yang terdigitalisasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	---	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penambahan jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi persyaratan dan standar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Persentase peningkatan produksi peternakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan fasilitas Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			---	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	---	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	---	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Kecamatan Blimbing	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	Kecamatan Lowokwaru	
				Kecamatan Sukun	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Klojen	
			Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	Kecamatan Klojen	
			Persentase Usulan Masyarakat Untk Sarana Prasarana Di Wilayah Yang Diakomodir	Kecamatan Klojen	
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Blimbing	
			Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	Kecamatan Blimbing	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Kedungkandang	
			Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	Kecamatan Kedungkandang	
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Lowokwaru	
			Persentase Usulan Masyarakat Untuk Sarana Prasarana di Wilayah Yang Diakomodir	Kecamatan Lowokwaru	
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Sukun	
			Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	Kecamatan Sukun	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Klojen	
				Kecamatan Blimbing	
			Rasio Linmas per RT	Kecamatan Blimbing	
			Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Kedungkandang	
			Rasio Linmas per RT	Kecamatan Kedungkandang	
				Kecamatan Lowokwaru	
			Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Sukun	
			Rasio Linmas per RT	Kecamatan Sukun	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	Kecamatan Klojen	
				Kecamatan Blimbing	
				Kecamatan Kedungkandang	
			---	Kecamatan Lowokwaru	
				Kecamatan Sukun	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	---	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	---	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	---	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	---	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Inspektorat	
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	---	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5	<b>Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Persentase ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tinggal berakses air bersih	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Kota Dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung milik daerah yang menjadi kewenangan dinas dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Pembangunan Kawasan Prioritas Sesuai RTBL	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Persentase Pemanfaatan SIPR Dalam Pemanfaatan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan area kawasan kumuh	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase kelurahan yang sudah terinventarisir tanah kosong dalam data base	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD	Dinas Perhubungan	
			Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Dinas Perhubungan	
			Persentase layanan angkutan darat (jumlah angkutan darat/jumlah penumpang angkutan darat)	Dinas Perhubungan	
			Persentase Penurunan Titik Kemacetan	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah/pemprov/pemda	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi informasi yang terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase penetapan pasar rakyat sebagai pasar halal	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase BTL APBD ≤ 50%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Klojen	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase masyarakat tangguh bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	_____	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun dan Sesuai Standart	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
			---	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH Publik yang dikelola	Dinas Lingkungan Hidup	
			---	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	persentase pelaku usaha yang sudah melakukan pengelolaan limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Masyarakat dan Kegiatan/Usaha Pemilik Izin Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	
			---	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Komunitas Berbudaya Lingkungan di Kota Malang	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang terselesaikan	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
			---	Dinas Lingkungan Hidup	
7	<b>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
				DINAS KESEHATAN	
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentaman masyarakat dalam sehari	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Persentase penanganan pelanggaran Perda	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kejadian Kebakaran Yang Ditangani	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
				Dinas Lingkungan Hidup	
				Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi pencatatan sipil	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penduduk yang telah tertib administrasi kependudukan	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	persentase data hasil pelayanan selama satu tahun	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Dinas Perhubungan	
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	---	Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			---	Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			---	Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase keterisian e-database SIPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase peningkatan dokumen arsip yang terkelola sesuai kaidah kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Survei Internal Organisasi	Sekretariat Daerah	
			Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	Sekretariat Daerah	
			---	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang	Sekretariat Daerah	
			Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	
			Persentase Pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan bidang perekonomian, Infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	
			Persentase Paket Selesai Tender	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Sekretariat DPRD	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan pembahasan Ranperda	Sekretariat DPRD	
			Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi penyusunan Perda	Sekretariat DPRD	
			Persentase publikasi kegiatan DPRD	Sekretariat DPRD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian program dan kegiatan pada RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			---	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Program Perencanaan Bidang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
			Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata cara.		
			---	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
				Badan Pendapatan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
			---	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Badan Pendapatan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memperoleh nilai kinerja dibawah standar	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
			Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
			Persentase terisinya jab struktural dan pelaksana	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
			Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Jumlah Kajian/ Analisa/ Studi / Rencana Induk/ Grand Design Sektor Ekonomi Dan Sumberdaya Alam Yang Mendukung Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Jumlah Kajian/ Analisa/ Studi / Rencana Induk/ Grand Design Sektor Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Yang Ditindaklanjuti	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Inspektorat	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase PD yang menindaklanjuti temuan pengawasan	Inspektorat	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	Inspektorat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Kecamatan Klojen	
				Kecamatan Blimbing	
				Kecamatan Kedungkandang	
				Kecamatan Lowokwaru	
				Kecamatan Sukun	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	Kecamatan Klojen	
				Kecamatan Blimbing	
				Kecamatan Kedungkandang	
				Kecamatan Lowokwaru	
				Kecamatan Sukun	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Klojen	
				Kecamatan Blimbing	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	



**Tabel 3.2** Sinergitas Program Pemerintah Kota Malang Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
1	PEMULIHAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PENINGKATAN NILAI TAMBAH SEKTOR SEKUNDER DAN PARIWISATA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			---	Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio Konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT yang layak konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	---	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang dididik dan dilatih	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase WUB Mikro yang tumbuh	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang naik menjadi usaha kecil	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi penanaman modal	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			---	Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah minat investor	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			---	Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	_____	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
			Persentase Industri Pariwisata Yang Dibina	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pemasaran Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada 7 subsektor yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Jumlah produksi peternakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian dalam kondisi baik	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Persentase peningkatan pemeriksaan sampel pangan asal hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kenaikan Skor Kelompok Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	---	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	---	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	---	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	---	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	---	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
2	-	-	-	-	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
3	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			APK SD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			APK SMP	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter PNF	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	---	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru tersertifikasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi SPM	DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Medis yang berkompeten	DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persentase sarana kefarmasian dan industri rumah tangga yang dibina diawasi dan memenuhi syarat	DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase UKBM yang dibina	DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Serta Meningkatkan Kemampuan Fungsi Sosialnya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	---	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Terpelihara Dengan Baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
			---	Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	---	Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	---	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat daerah yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	---	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan ketersediaan pangan utama	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB Aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok UPPKS Aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabor Berprestasi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
			Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase cakupan wilayah operasional perpustakaan keliling di 57 kelurahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase peningkatan koleksi yang terdigitalisasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	---	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penambahan jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi persyaratan dan standar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Persentase peningkatan produksi peternakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
			---	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	---	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	---	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Kecamatan Blimbing	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	Kecamatan Lowokwaru	
				Kecamatan Sukun	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Klojen	
			Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	Kecamatan Klojen	
			Persentase Usulan Masyarakat Untk Sarana Prasarana Di Wilayah Yang Diakomodir	Kecamatan Klojen	
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Blimbing	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
			Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	Kecamatan Blimbing	
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Kedungkandang	
			Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	Kecamatan Kedungkandang	
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Lowokwaru	
			Persentase Usulan Masyarakat Untuk Sarana Prasarana di Wilayah Yang Diakomodir	Kecamatan Lowokwaru	
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Sukun	
			Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	Kecamatan Sukun	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Klojen	
				Kecamatan Blimbing	
			Rasio Linmas per RT	Kecamatan Blimbing	
			Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Kedungkandang	
			Rasio Linmas per RT	Kecamatan Kedungkandang	
				Kecamatan Lowokwaru	
			Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Sukun	
			Rasio Linmas per RT	Kecamatan Sukun	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	Kecamatan Klojen	
				Kecamatan Blimbing	
				Kecamatan Kedungkandang	
			---	Kecamatan Lowokwaru	
				Kecamatan Sukun	
4	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	---	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	---	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	---	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	---	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Inspektorat	
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	---	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5	<b>Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Persentase ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tinggal berakses air bersih	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Kota Dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung milik daerah yang menjadi kewenangan dinas dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Pembangunan Kawasan Prioritas Sesuai RTBL	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Persentase Pemanfaatan SIPR Dalam Pemanfaatan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan area kawasan kumuh	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase kelurahan yang sudah terinventarisir tanah kosong dalam data base	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD	Dinas Perhubungan	
			Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Dinas Perhubungan	
			Persentase layanan angkutan darat (jumlah angkutan darat/jumlah penumpang angkutan darat)	Dinas Perhubungan	
			Persentase Penurunan Titik Kemacetan	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah/pemprov/pemda	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi informasi yang terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase penetapan pasar rakyat sebagai pasar halal	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase BTL APBD ≤ 50%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Klojen	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
6	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase masyarakat tangguh bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-----	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun dan Sesuai Standart	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
			---	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH Publik yang dikelola	Dinas Lingkungan Hidup	
			---	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	persentase pelaku usaha yang sudah melakukan pengelolaan limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Masyarakat dan Kegiatan/Usaha Pemilik Izin Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	
			---	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Komunitas Berbudaya Lingkungan di Kota Malang	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang terselesaikan	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
	---	Dinas Lingkungan Hidup			
7	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
				DINAS KESEHATAN	
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentaman masyarakat dalam sehari	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Persentase penanganan pelanggaran Perda	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kejadian Kebakaran Yang Ditangani	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
				Dinas Lingkungan Hidup	
				Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi pencatatan sipil	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penduduk yang telah tertib administrasi kependudukan	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	persentase data hasil pelayanan selama satu tahun	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Dinas Perhubungan	
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	---	Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			---	Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			---	Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase keterisian e-database SIPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase peningkatan dokumen arsip yang terkelola sesuai kaidah kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Survei Internal Organisasi	Sekretariat Daerah	
			Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	Sekretariat Daerah	
			---	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang	Sekretariat Daerah	
			Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	
			Persentase Pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan bidang perekonomian, Infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	
			Persentase Paket Selesai Tender	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Sekretariat DPRD	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan pembahasan Ranperda	Sekretariat DPRD	
			Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi penyusunan Perda	Sekretariat DPRD	
			Persentase publikasi kegiatan DPRD	Sekretariat DPRD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian program dan kegiatan pada RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			---	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
			Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata cara.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			---	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
				Badan Pendapatan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
			---	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Badan Pendapatan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memperoleh nilai kinerja dibawah standar	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
			Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
			Persentase terisinya jab struktural dan pelaksana	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
			Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Jumlah Kajian/ Analisa/ Studi / Rencana Induk/ Grand Design Sektor Ekonomi Dan Sumberdaya Alam Yang Mendukung Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Jumlah Kajian/ Analisa/ Studi / Rencana Induk/ Grand Design Sektor Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Yang Ditindaklanjuti	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KET
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Inspektorat	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase PD yang menindaklanjuti temuan pengawasan	Inspektorat	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	Inspektorat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Kecamatan Klojen	
				Kecamatan Blimbing	
				Kecamatan Kedungkandang	
				Kecamatan Lowokwaru	
				Kecamatan Sukun	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	Kecamatan Klojen	
				Kecamatan Blimbing	
				Kecamatan Kedungkandang	
				Kecamatan Lowokwaru	
				Kecamatan Sukun	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Klojen	
				Kecamatan Blimbing	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	---	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

**Tabel 3.3** Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

NO	PRIORITAS KOTA MALANG	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)
1	Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	223.040.000
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	6.080.478.000
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	763.046.000
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	5.128.798.000
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase peningkatan fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000
		Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	925.611.000
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kreatif	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	70.171.050
				Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	437.882.500
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	344.847.600
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang dididik dan dilatih	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	545.592.225

NO	PRIORITAS KOTA MALANG	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.189.393.325
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase WUB Mikro yang tumbuh	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3.034.654.750
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang naik menjadi usaha kecil	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.984.001.600
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi penanaman modal	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.000.000
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah minat investor	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	110.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.488.905.000
				Persentase Industri Pariwisata Yang Dibina	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	90.975.000
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pemasaran Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	159.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada 7 subsektor yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	50.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.403.500.000
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase penetapan pasar rakyat sebagai pasar halal	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	55.104.522.000

NO	PRIORITAS KOTA MALANG	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)
2	Peningkatan Kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio Konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	903.400.000
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT yang layak konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	90.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.706.660.000
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	80.000.000
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	183.750.000
				Jumlah produksi peternakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	75.000.000
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian dalam kondisi baik	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	200.000.000
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	123.000.000
				Persentase peningkatan pemeriksaan sampel pangan asal hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	152.000.000
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kenaikan Skor Kelompok Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	66.250.000
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Jumlah Alat UTP yang di Tera dan Tera Ulang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	140.000.000
				Persentase peningkatan fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	65.000.000
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	302.000.000

NO	PRIORITAS KOTA MALANG	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.125.000.000
		Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Unit Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi SPM	DINAS KESEHATAN	208.124.317.121
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Medis yang berkompeten	DINAS KESEHATAN	408.420.000
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persentase sarana kefarmasian dan industri rumah tangga yang dibina diawasi dan memenuhi syarat	DINAS KESEHATAN	423.230.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase UKBM yang dibina	DINAS KESEHATAN	8.476.580.000
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	275.000.000
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB Aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	480.000.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok UPPKS Aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.724.300.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabor Berprestasi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	10.250.000.000

NO	PRIORITAS KOTA MALANG	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)
				Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.100.230.080
		Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.673.200.000
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Serta Meningkatkan Kemampuan Fungsi Sosialnya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.123.080.000
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Serta Meningkatkan Kemampuan Fungsi Sosialnya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	425.000.000
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	30.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Terpelihara Dengan Baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	350.000.000
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85.000.000
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	255.000.000

NO	PRIORITAS KOTA MALANG	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)
		Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	10.173.395.064
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	354.825.135.646
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	Kecamatan Lowokwaru	1.193.429.601
					Kecamatan Sukun	1.453.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	Kecamatan Sukun	29.950.000
		Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	26.048.965.000
				APK SD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	118.521.556.000
				APK SMP	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	65.757.470.968
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100.000.000
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru tersertifikasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	393.785.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.944.235.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	500.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	144.050.000



NO	PRIORITAS KOTA MALANG	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase cakupan wilayah operasional perpustakaan keliling di 57 kelurahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	300.000.000
				Persentase peningkatan koleksi yang terdigitalisasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.412.225.000
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50.000.000
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	786.584.000
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	323.790.000
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	797.340.100
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat daerah yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	60.000.000
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	500.068.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Klojen	8.077.960.400
					Kecamatan Blimbing	8.831.866.000

NO	PRIORITAS KOTA MALANG	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)
					Kecamatan Kedungkandang	7.332.201.400
					Kecamatan Lowokwaru	21.169.572.600
					Kecamatan Sukun	8.226.822.377
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Klojen	401.778.400
				Rasio Linmas per RT	Kecamatan Klojen	62.000.000
				Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Blimbing	380.864.400
					Kecamatan Kedungkandang	58.600.000
				Rasio Linmas per RT	Kecamatan Kedungkandang	320.748.840
					Kecamatan Lowokwaru	28.450.000
				Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Kecamatan Sukun	278.350.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	Kecamatan Klojen	58.000.000
					Kecamatan Blimbing	50.000.000
		Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	Kecamatan Klojen	9.069.097.200
				Persentase Usulan Masyarakat Untk Sarana Prasarana Di Wilayah Yang Diakomodir	Kecamatan Klojen	475.000.000
				Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	Kecamatan Blimbing	13.592.060.440
				Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	Kecamatan Kedungkandang	17.467.438.400
				Persentase Usulan Masyarakat Untuk Sarana Prasarana di Wilayah Yang Diakomodir	Kecamatan Lowokwaru	1.030.400.000
				Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	Kecamatan Sukun	16.499.062.900

NO	PRIORITAS KOTA MALANG	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)
		---	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Capaian Peningkatan Karakter PNF	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5.644.620.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	---	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	35.000.000
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	---	Kecamatan Lowokwaru	60.179.800
3	Mendorong revolusi mental dan pembangunan budaya masyarakat	Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	565.670.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.446.869.963
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.878.075.531
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	919.067.281
		Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	682.290.000
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	54.050.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	303.940.000
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	284.646.120
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.535.699.297

NO	PRIORITAS KOTA MALANG	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)
			PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	412.417.467
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.277.341.164
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.950.999.208
4	Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian yang beririsan dengan prioritas nasional dan penyelesaian masalah prioritas kota	Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah/pemprov/pemda	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.573.073.009
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi informasi yang terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.546.857.463
		Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.122.880.000
				Persentase Pemanfaatan SIPR Dalam Pemanfaatan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.950.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase kelurahan yang sudah terinventarisir tanah kosong dalam data base	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000
		Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok UPPKS Aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	200.000.000

NO	PRIORITAS KOTA MALANG	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)
		Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD	Dinas Perhubungan	14.414.980.000
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan bidang perekonomian, Infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	1.026.424.000
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan tahapan dan tata cara	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.319.010.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kecamatan Sukun	173.257.375
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	Kecamatan Blimbing	7.500.000
					Kecamatan Kedungkandang	400.856.000
					Kecamatan Sukun	427.119.000
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Lowokwaru	1.294.685.850
		Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	260.000.000
				Persentase ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.700.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tinggal berakses air bersih	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.600.000.000

NO	PRIORITAS KOTA MALANG	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.433.500.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Kota Dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	37.900.867.200
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.784.262.500
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung milik daerah yang menjadi kewenangan dinas dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	93.217.248.787
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Pembangunan Kawasan Prioritas Sesuai RTBL	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.900.000.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	61.915.585.700
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	400.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.408.750.000
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan area kawasan kumuh	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	282.370.000
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	351.500.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Dinas Perhubungan	2.573.405.000
				Persentase layanan angkutan darat (jumlah angkutan darat/jumlah penumpang angkutan darat)	Dinas Perhubungan	1.865.835.332
				Persentase Penurunan Titik Kemacetan	Dinas Perhubungan	11.903.045.600

NO	PRIORITAS KOTA MALANG	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Masyarakat Untuk Sarana Prasarana di Wilayah Yang Diakomodir	Kecamatan Lowokwaru	13.500.000
5	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun dan Sesuai Standart	Dinas Lingkungan Hidup	375.000.000
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	919.600.000
				Persentase pengaduan yang terselesaikan	Dinas Lingkungan Hidup	80.400.000
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH Publik yang dikelola	Dinas Lingkungan Hidup	26.050.000.000
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	persentase pelaku usaha yang sudah melakukan pengelolaan limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	65.000.000
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Masyarakat dan Kegiatan/Usaha Pemilik Izin Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	575.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Komunitas Berbudaya Lingkungan di Kota Malang	Dinas Lingkungan Hidup	375.000.000
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang terselesaikan	Dinas Lingkungan Hidup	100.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	18.161.061.700



NO	PRIORITAS KOTA MALANG	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)
		Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Unit Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi SPM	DINAS KESEHATAN	210.950.000
		Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Serta Meningkatkan Kemampuan Fungsi Sosialnya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	657.000.000
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	230.000.000
		Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.000.000
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	755.000.000
				Persentase masyarakat tangguh bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.030.000.000
6	Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penduduk yang telah tertib administrasi kependudukan	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	266.594.900
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	persentase data hasil pelayanan selama satu tahun	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60.500.000
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	156.700.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	197.000.000

NO	PRIORITAS KOTA MALANG	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase keterisian e-database SIPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	936.980.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika	454.520.370
		Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memperoleh nilai kinerja dibawah standar	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	621.835.568
				Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	501.767.724
				Persentase terisinya jab struktural dan pelaksana	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	1.235.533.229
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	682.836.864
				Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	1.047.561.122
		Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Serta Meningkat Kemampuan Fungsi Sosialnya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.000.000
		Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	DINAS KESEHATAN	41.018.120.599
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	DINAS KESEHATAN	114.833.776.282
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	DINAS KESEHATAN	1.574.000.000

NO	PRIORITAS KOTA MALANG	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)
				Nilai survey kepuasan internal	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.674.326.900
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	26.409.473.028
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.825.673.100
				Nilai survey kepuasan internal	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.958.313.400
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	16.751.867.948
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.104.498.801
				Nilai survey kepuasan internal	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.081.000.000
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.058.196.627
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	420.000.000
				Nilai survey kepuasan internal	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	357.000.000
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20.273.487.734
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.381.000.000

NO	PRIORITAS KOTA MALANG	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)
				Nilai survey kepuasan internal	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.018.500.000
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.006.307.984
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	658.300.000
				Nilai survey kepuasan internal	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.834.433.680
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.751.671.268
				Nilai survey kepuasan internal	Dinas Lingkungan Hidup	13.081.132.300
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Lingkungan Hidup	84.024.765.011
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Lingkungan Hidup	16.641.377.000
				Nilai survey kepuasan internal	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.282.606.600
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.524.175.735
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.129.202.500
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.351.152.000
			PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi pencatatan sipil	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.635.122.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Dinas Perhubungan	3.199.631.896

NO	PRIORITAS KOTA MALANG	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Perhubungan	18.176.339.437
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Perhubungan	1.929.668.153
				Nilai survey kepuasan internal	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.254.694.730
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	100.000.000
				Nilai survey kepuasan internal	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	44.180.444.640
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Ijin Dan Non Ijin Pekerjaan Umum	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.347.246.450
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.371.909.620
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	12.579.431.212
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	810.580.300
				Nilai survey kepuasan internal	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.105.450.000
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.361.047.424
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	832.420.000
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase peningkatan dokumen arsip yang dikelola sesuai kaidah kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	172.130.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Survei Internal Organisasi	Sekretariat Daerah	1.549.655.600
				Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang	Sekretariat Daerah	15.000.000
				Nilai survey kepuasan internal	Sekretariat Daerah	9.678.300.000

NO	PRIORITAS KOTA MALANG	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Sekretariat Daerah	30.782.965.400
				Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	Sekretariat Daerah	10.865.261.000
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Sekretariat Daerah	2.554.799.850
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang	Sekretariat Daerah	2.383.474.000
				Persentase Pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	10.163.600.000
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Paket Selesai Tender	Sekretariat Daerah	1.549.897.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Sekretariat DPRD	11.885.000.000
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Sekretariat DPRD	52.510.836.761
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Sekretariat DPRD	5.820.290.200
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan pembahasan Ranperda	Sekretariat DPRD	8.887.664.000
				Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi penyusunan Perda	Sekretariat DPRD	8.050.576.000
				Persentase publikasi kegiatan DPRD	Sekretariat DPRD	17.061.760.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.019.914.000
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.169.978.233
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	121.480.000

NO	PRIORITAS KOTA MALANG	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian program dan kegiatan pada RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000.000
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.568.672.400
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan tahapan dan tata cara	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	43.000.000
				Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	613.823.600
				Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata cara.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	820.000.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.196.523.900
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah	21.813.905.347
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.292.558.400
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Pendapatan Daerah	62.994.574.151
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	582.042.600
				Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	Badan Keuangan dan Aset Daerah	23.619.935.604
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.096.196.500



NO	PRIORITAS KOTA MALANG	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Badan Pendapatan Daerah	11.303.787.700
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	1.560.865.313
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	8.163.928.930
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	1.006.765.823
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.252.280.000
				Persentase Jumlah Kajian/ Analisa/ Studi / Rencana Induk/ Grand Design Sektor Ekonomi Dan Sumberdaya Alam Yang Mendukung Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	485.030.000
				Persentase Jumlah Kajian/ Analisa/ Studi / Rencana Induk/ Grand Design Sektor Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Yang Ditindaklanjuti	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	173.000.000
				Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	147.000.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Inspektorat	738.892.248
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Inspektorat	9.888.607.752
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Inspektorat	1.420.000.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase PD yang menindaklanjuti temuan pengawasan	Inspektorat	2.540.000.000
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,	Cakupan kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	Inspektorat	412.500.000

NO	PRIORITAS KOTA MALANG	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)
			PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Kecamatan Klojen	371.960.700
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kecamatan Klojen	18.130.521.780
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kecamatan Klojen	577.312.060
				Nilai survey kepuasan internal	Kecamatan Blimbing	342.712.000
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kecamatan Blimbing	19.088.185.154
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kecamatan Blimbing	505.248.000
				Nilai survey kepuasan internal	Kecamatan Kedungkandang	779.982.504
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kecamatan Kedungkandang	21.170.038.516
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kecamatan Kedungkandang	227.355.200
				Nilai survey kepuasan internal	Kecamatan Lowokwaru	530.157.300
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kecamatan Lowokwaru	20.420.038.690
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kecamatan Lowokwaru	371.845.000
				Nilai survey kepuasan internal	Kecamatan Sukun	472.396.800
				persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Kecamatan Sukun	19.474.910.092
				persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kecamatan Sukun	334.770.848
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	Kecamatan Klojen	4.798.264.080

NO	PRIORITAS KOTA MALANG	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)
					Kecamatan Blimbing	4.757.773.660
					Kecamatan Kedungkandang	5.005.539.350
					Kecamatan Lowokwaru	3.835.359.099
					Kecamatan Sukun	4.363.614.500
		Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase cakupan wilayah operasional perpustakaan keliling di 57 kelurahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25.000.000
				Persentase peningkatan koleksi yang terdigitalisasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	250.000.000
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50.000.000
				Persentase peningkatan koleksi yang terdigitalisasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	150.000.000
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kejadian Kebakaran Yang Ditangani	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.168.806.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Lowokwaru	50.000.000
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio Linmas per RT	Kecamatan Kedungkandang	30.000.000
					Kecamatan Lowokwaru	320.964.900
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	Kecamatan Kedungkandang	198.145.000
				Rasio Linmas per RT	Kecamatan Lowokwaru	137.900.000
		Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	Kecamatan Kedungkandang	129.017.100

NO	PRIORITAS KOTA MALANG	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA PROGRAM PRIORITAS	JUMLAH (RP)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	Kecamatan Blimbing	1.051.543.000
		Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentaman masyarakat dalam sehari	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13.483.112.600
				Persentase penanganan pelanggaran Perda	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.300.438.800
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	5.108.369.000
		---	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	---	Kecamatan Kedungkandang	40.000.000

Sedangkan Tabel Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana pada Lampiran I.

## **BAB IV**

### **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standart Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses perencanaan, Pemerintah Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien, kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam Renja RKPD tahun anggaran 2022. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatan Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD tahun anggaran 2022. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara iteratif antara Perangkat Daerah dan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2022 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepala daerah menyusun Kebijakan Umum APBD dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Selanjutnya penjelasan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Lampiran II.

#### **4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya.

Belanja daerah tahun anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 2.409.293.439.514,59 atau turun 5,69% jika dibandingkan dengan belanja daerah tahun 2021 yang dianggarkan sebesar Rp.2.554.774.610.160. Rincian proyeksi pada masing-masing kelompok dan jenis belanja sebagai berikut.

1. Kelompok Belanja Operasional diproyeksikan sebesar Rp. 2.026.266.060.902,84 turun sebesar Rp. 114.919.207.746,16 atau 3,12% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang dianggarkan sebesar Rp.2.141.185.268.649,00. Penurunan pada masing-masing jenis belanja sebagai berikut.
  - a. Belanja pegawai diproyeksikan sebesar Rp. 975.945.567.552,15 atau turun sebesar 3,12% jika dibandingkan dengan anggaran belanja pegawai tahun 2021 yang dianggarkan sebesar Rp.1.007.341.945.137,00.
  - b. Belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp. 950.598.420.350,69 atau turun sebesar 5,65% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang dianggarkan sebesar Rp.1.007.568.456.512,00.
  - c. Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp. 84.556.848.000,00, turun Rp. 25.112.794.000,00 atau sebesar 22,90% jika dibandingkan dengan anggaran belanja hibah tahun 2021 sebesar Rp. 109.669.642.000,00.
  - d. Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan sebesar Rp. 15.165.225.000,00 turun Rp. 1.440.000.000,00 atau sebesar 8,67% jika dibandingkan dengan anggaran belanja bantuan sosial tahun 2021 sebesar Rp. 16.605.225.000,00.

2. Belanja modal diproyeksikan sebesar Rp.362.319.628.107,70 naik sebesar 4,23% atau sebesar Rp.14.698.222.381,70 jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang dianggarkan sebesar Rp. 347.621.405.726,00.
3. Belanja tidak terduga diproyeksikan sebesar Rp.20.707.750.504,05 turun 68,61% atau sebesar Rp.45.260.185.280,95 jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp. 65.967.935.785,00.

Adapun Plafon Anggaran Sementara atas struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

**Tabel 4.1** Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)</b>
(1)	(2)	(3)
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.026.266.060.902,84</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	975.945.567.552,15
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	950.598.420.350,69
5.1.03	Belanja Bunga	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	84.556.848.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	15.165.225.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>362.319.628.107,70</b>
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>20.707.750.504,05</b>
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>0,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.409.293.439.514,59</b>



**BAB V**  
**RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Rencana Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

**Tabel 5.1** Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah  
Tahun Anggaran 2022

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)</b>
(1)	(2)	(3)
	<b>PEMBIAYAAN</b>	
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	149.585.125.292,59
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>149.585.125.292,59</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>45.000.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>104.585.125.292,59</b>

## BAB VI PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ini disusun sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Apabila terjadi perubahan proyeksi penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 akibat:

1. Adanya kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Adanya pergeseran atau perubahan baik penambahan maupun pengurangan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 antara Walikota Malang dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, maka akan dituangkan dalam persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

MALANG, 13 Agustus 2021



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MALANG,



Ketua

I MADE RIAN DIANA KARTIKA, SE

Wakil Ketua

H. ABDURROCHMAN, SH

Wakil Ketua

H. ASMUALIK, ST

Wakil Ketua

RIMZAH, SIP.

## BAB VI PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ini disusun sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Apabila terjadi perubahan proyeksi penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 akibat:

1. Adanya kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Adanya pergeseran atau perubahan baik penambahan maupun pengurangan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 antara Walikota Malang dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, maka akan dituangkan dalam persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.



MALANG, 13 Agustus 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MALANG,



I MADEWAN DIANA KARTIKA, SE

Wakil Ketua

H. ABDURROCHMAN, SH

Wakil Ketua

H. ASMUALIK, ST

Wakil Ketua

RIMZAH, SIP.

# **LAMPIRAN I**

TABEL PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN  
DAN INDIKATOR KINERJA

## Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>										
	<b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu	100 Persen	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, jumlah dokumen Renja/RKT	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	1 Dokumen	Kota Malang	
							1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	1 Dokumen	Kota Malang	
							1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	1 Dokumen	Kota Malang	
							1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu	8 dokumen	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	25825 ASN	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Temuan Pengawasan	3 Kegiatan	Kota Malang	
							1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	3 Kegiatan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Nominal Aset yang tercatat	19 Aset		1.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang diamankan	100 barang	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah	30 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang dilayani	5 dokumen		1.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen ANJAB ABK	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi 2020 Dinas Pendidikan, jumlah Dokumen Sistem Pengawasan Internal (SPI)	1 Dokumen	Kota Malang	
							1.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan/pengembangan sumber daya aparatur	109 Aparatur	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	14 Layanan		1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	12 Komponen	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
					1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 alat	Semua Kab/Kota Kota Malang			
					1.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	10 Peralatan	Kota Malang			
					1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1000 bahan	Semua Kab/Kota Kota Malang			
					1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	57845 Cetakan	Semua Kab/Kota Kota Malang			
					1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang			
					1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu-tamu kedinasan	1250 Tamu	Semua Kab/Kota Kota Malang			
					1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang terpenuhi	795 Perjalanan Dinas	Semua Kab/Kota Kota Malang			
			1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	5 kendaraan	Semua Kab/Kota Kota Malang			
					1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	5 alat	Semua Kab/Kota Kota Malang			
					1.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan Gedung Kantor	1 Gedung	Kota Malang			



No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							1.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana Prasarana Gedung Kantor yang diadakan	1 Kantor	Kota Malang	
			1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang	6 Jasa Layanan		1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat	175668 Surat	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpn Air dan Listrik	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan umum yang dilaksanakan	15 layanan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Kepuasan Internal Layanan Pendidikan	100 Persen		1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah mobil jabatan yang dipelihara	2 Unit	Kota Malang	
							1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dirawat	27 kendaraan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	25 alat	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung yang terpelihara	1 Gedung	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 Gedung	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			1.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan keprotokolan	4 Kegiatan	Kota Malang	
	<b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK PAUD APK SD	91,38 % 110,41 %	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	120 siswa	1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Sekolah mendapatkan RKB	3 RKB	Kota Malang	
					Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	120 Siswa					
					Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	123 Siswa					
					Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	124 Siswa					
					Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	125 Siswa					
					Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	127 Siswa					
					Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	128 Siswa					
					Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	132 Siswa					
					Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	133 Siswa					
					Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	134 Siswa					
					Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	135 Siswa					
					Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	137 Siswa					
					Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	142 Siswa					
					Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	145 Siswa					
					Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	147 Siswa					
					Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	152 Siswa					
					Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	154 Siswa					
					Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	155 Siswa					
					Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	156 Siswa					

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	157 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	158 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	160 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	162 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	163 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	164 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	165 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	166 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	167 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	168 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	169 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	170 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	171 siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	171 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	173 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	174 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	175 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	176 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	177 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	178 Siswa						

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	179 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	180 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	181 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	184 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	186 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	187 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	188 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	194 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	200 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	201 siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	201 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	202 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	204 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	206 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	207 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	210 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	218 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	223 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	225 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	236 Siswa						

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	237 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	238 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	241 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	242 siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	248 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	255 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	257 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	259 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	270 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	282 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	283 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	290 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	292 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	294 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	296 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	297 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	298 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	301 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	302 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	303 Siswa						

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	304 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	305 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	307 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	317 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	318 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	319 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	322 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	325 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	327 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	328 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	330 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	336 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	341 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	346 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	347 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	350 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	352 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	353 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	354 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	356 Siswa						

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	360 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	361 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	362 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	370 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	378 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	387 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	391 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	392 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	393 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	397 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	412 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	418 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	438 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	442 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	446 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	450 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	469 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	470 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	481 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	485 Siswa						



No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitas pendidikan	496 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitas pendidikan	500 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitas pendidikan	501 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitas pendidikan	506 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitas pendidikan	507 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitas pendidikan	509 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitas pendidikan	510 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitas pendidikan	514 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitas pendidikan	516 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitas pendidikan	517 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitas pendidikan	524 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitas pendidikan	535 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitas pendidikan	545 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitas pendidikan	549 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitas pendidikan	578 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitas pendidikan	595 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitas pendidikan	612 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitas pendidikan	666 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitas pendidikan	828 Siswa						
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	106 Sekolah						

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat	80 sekolah	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah unit bangunan Pendidikan Sekolah Dasar yang dibangun/ direhabilitasi	195 Sekolah	Kota Malang	
							1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Lembaga/Satuan Pendidikan yang Memperoleh Bantuan Sarana Prasarana	3 Sekolah	Kota Malang	
							1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perelengkapan Sekolah	5 Sekolah	Kota Malang	
							1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Siswa Prasejahtera Pendidikan Dasar yang mendapatkan Bantuan Sarana Sekolah	826 Siswa	Kota Malang	
							1.01.02.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	5 Sekolah	Kota Malang	
							1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah SD swasata yang Mendapatkan BOSDA	152 Sekolah	Semua Kab/Kota Kota Malang	
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	45 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	72 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	90 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	96 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	98 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	99 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	100 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	101 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	105 Siswa		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	106 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	119 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	125 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	126 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	128 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	132 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	133 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	134 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	135 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	136 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	137 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	138 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	140 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	142 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	144 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	147 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	148 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	149 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	152 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	153 Siswa			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	155 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	156 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	157 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	158 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	160 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	163 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	164 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	165 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	167 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	168 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	169 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	170 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	171 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	172 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	173 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	174 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	175 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	176 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	177 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	178 Siswa			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	179 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	180 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	181 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	184 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	186 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	194 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	195 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	199 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	202 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	204 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	206 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	208 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	222 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	224 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	225 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	227 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	235 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	237 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	238 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	241 Siswa			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	243 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	245 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	252 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	254 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	256 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	257 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	258 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	268 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	270 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	278 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	283 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	289 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	290 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	293 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	294 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	302 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	303 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	304 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	306 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	307 Siswa			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	308 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	309 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	318 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	322 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	324 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	325 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	327 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	330 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	331 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	333 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	334 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	336 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	344 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	346 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	349 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	351 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	352 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	353 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	361 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	362 Siswa			



No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	388 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	396 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	402 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	415 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	418 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	429 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	432 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	436 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	438 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	446 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	450 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	453 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	469 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	481 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	496 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	505 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	506 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	507 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	510 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	515 Siswa			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	516 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	517 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	524 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	545 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	550 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	574 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	577 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	595 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	608 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSDA	828 Siswa		
							1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah dokumen pemetaan, Jumlah lembaga yang memperoleh pembinaan, Jumlah Pengembangan Inovasi Mutu Pendidikan	318 Sekolah	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah dokumen bahan perumusan yang dihasilkan, Jumlah prestasi tingkat provinsi dan nasional	1 Dokumen	Kota Malang	
							1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah komunitas KKG dan MGMP yang memperoleh fasilitasi Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh fasilitasi Jumlah Prestasi Tingkat Propinsi	5 Komunitas 420 Peserta 3 Prestasi	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan pembinaan	200 Sekolah	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
						1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa penerima Bosnas	102 siswa	Semua Kab/Kota		
							Jumlah Siswa penerima Bosnas	198 siswa			
							Jumlah Siswa penerima Bosnas	237 siswa			
							Jumlah Siswa penerima Bosnas	250 siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOS	151 siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	45 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	72 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	76 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	90 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	92 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	96 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	100 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	101 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	118 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	119 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	125 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	126 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	128 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	129 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	132 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	133 Siswa			
							Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	134 Siswa			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	135 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	136 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	137 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	139 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	140 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	142 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	144 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	145 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	147 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	150 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	152 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	155 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	156 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	157 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	158 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	160 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	164 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	165 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	167 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	168 Siswa		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	169 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	170 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	171 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	172 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	173 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	174 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	175 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	176 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	177 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	178 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	179		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	179 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	180 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	181 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	184 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	186 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	194 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	196 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	199 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	202 Siswa		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	204 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	206 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	207 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	225 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	227 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	231 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	235 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	237 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	238 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	241 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	242 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	250 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	256 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	262 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	270 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	283 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	289 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	290 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	293 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	295 Siswa		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	301 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	302 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	303 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	304 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	307 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	314 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	318 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	322 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	325 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	327 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	330 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	335 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	336 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	346 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	349 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	351 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	352 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	361 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	362 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	380 Siswa		



No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	392 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	396 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	405 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	412 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	418 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	425 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	438 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	441 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	446 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	469 s		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	481 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	505 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	506 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	507 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	510 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	515 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	516 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	517 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	524 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	545 Siswa		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan							
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	550 Siswa			
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	577 Siswa			
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	595 Siswa			
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	608 Siswa			
								Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS	828 Siswa			
								Jumlah Siswa yang menerima bantuan BOSNAS	138 siswa			
								Jumlah Siswa yang menerima bantuan BOSNAS	174 siswa			
								Jumlah Siswa yang menerima bantuan BOSNAS	175 siswa			
								Jumlah Siswa yang menerima bantuan BOSNAS	273 siswa			
								Jumlah Siswa yang menerima bantuan BOSNAS	351 siswa			
								Jumlah Siswa yang menerima bantuan BOSNAS	353 siswa			
								Jumlah Siswa yang menerima bantuan BOSNAS	417 siswa			
								Jumlah Siswa yang menerima bantuan BOSNAS	450 siswa			
								1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang mendapatkan peningkatan Kapasitas pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	195 Sekolah	Semua Kab/Kota	
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	381 Siswa		1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Lembaga/Satuan Pendidikan yang Memperoleh Bantuan Sarana Prasarana	4 RKB	Kota Malang		
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	597 Siswa							
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	628 Siswa							
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	663 Siswa							

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	684 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	685 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	738 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	759 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	761 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	763 siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	771 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	777 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	806 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	820 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	833 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	840 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	843 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	854 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	865 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	868 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	869 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	888 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	893 Siswa						
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan	903 Siswa						

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Jumlah peserta didik yang memperoleh fasilitasi pendidikan 1051 Siswa Jumlah Sekolah Menengah Pertama 106 Sekolah							
					1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat	27 Sekolah		Kota Malang		
					1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan bantuan Rehab Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	6 Sekolah		Kota Malang		
					1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	30 Sekolah		Kota Malang		
					1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah	27 sekolah		Kota Malang		
					1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa prasejahtera Pendidikan Dasar yang mendapatkan bantuan sarana sekolah	826 Siswa		Kota Malang		
					1.01.02.2.02.30 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin	27 Sekolah				
					1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional	150 Siswa 350 Siswa 450 Siswa 843 Siswa 854 Siswa 381 Siswa 403 Siswa 597 Siswa 629 Siswa		Kota Malang		



No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
						1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggara Proses Belajar dan Ujian Peserta Didik	107 sekolah		Kota Malang	
						1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah dokumen bahan perumusan yang dihasilkan, Jumlah prestasi tingkat provinsi dan nasional	1 Dokumen		Kota Malang	
						1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah komunitas KKG dan MGMP yang memperoleh fasilitasi Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh fasilitasi Jumlah Prestasi Tingkat Propinsi	15 Komunitas 120 Peserta 3 Prestasi		Kota Malang	
						1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitasi	45 Sekolah		Kota Malang	
						1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS Jumlah siswa yang menerima bantuan BOSNAS Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional	250 Siswa 759 Siswa 777 Siswa 824 Siswa 843 Siswa 854 Siswa 381 Siswa 403 Siswa 597 Siswa 629 Siswa 663 Siswa		Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional	685 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional	712 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional	738 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional	761 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional	763 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional	771 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional	806 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional	810 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional	833 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional	840 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional	865 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional	868 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional	870 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional	888 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional	893 Siswa		
								Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional	902		
							1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah dokumen pemetaan, Jumlah lembaga yang memperoleh pembinaan, Jumlah Pengembangan Inovasi Mutu Pendidikan	30 Sekolah	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah pemeliharaan rutin sarana prasarana dan utilitas PAUD 1 Sekolah Jumlah pemeliharaan rutin sarana prasarana dan utilitas PAUD 12 Lembaga		1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah lembaga PAUD dan PNF yang memperoleh bantuan rehab sesuai SPM menuju SNP	1 Lokasi	Semua Kab/Kota		
						1.01.02.2.03.05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah lembaga PAUD dan PNF yang memperoleh bantuan rehab sesuai SPM menuju SNP	6 lembaga	Semua Kab/Kota		
						1.01.02.2.03.06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah pemeliharaan rutin sarana prasarana dan utilitas PAUD	12 Lembaga	Kota Malang		
						1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Siswa yang mendapatka pelayanan Pendidikan PAUD Jumlah siswa yang menerima bantuan BOS Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional	4 lembaga 100 siswa 1 Lembaga	Semua Kab/Kota		
						1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah lembaga yang menerima	150 lembaga	Kota Malang		
						1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah penyelenggaraan proses belajar PAUD	12 Lembaga	Kota Malang		
						1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah komunitas PKG yang memperoleh fasilitasi Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5 Komunitas	Kota Malang		
						1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang dibina	100 Lembaga	Kota Malang		
						1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan BOP PAUD	500 Lembaga	Kota Malang		
			1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Pendidikan Kesetaraan 12 Lembaga Jumlah pemeliharaan rutin sarana prasarana dan utilitas UPT Layanan Anak Berkebutuhan Khusus 1 UPT		1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Sarana Prasarana PAUD dan PNF sesuai SPM menuju SNP	161 Lembaga	Kota Malang		



No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Jumlah pemeliharaan rutin sarana prasarana SKB	1 Lembaga						
						1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang menerima bantuan	150 lembaga			
						1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik kesetaraan SKB yang memperoleh fasilitas pendidikan	310 Siswa		Semua Kab/Kota Kota Malang	
							Jumlah siswa yang menerima bantuan operasional	250 siswa			
						1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik kesetaraan SKB yang memperoleh fasilitas pendidikan	310 Peserta Didik		Kota Malang	
						1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah SKB yang dibina	100 Lembaga		Kota Malang	
						1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga PAUD PNF yang memperoleh fasilitas	30 Lembaga		Kota Malang	
	<b>1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	-	- %	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidikan Dasar yang Melaksanakan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	388 Sekolah	1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah lembaga yang memperoleh pembinaan	425 Sekolah	Semua Kab/Kota	
				1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Lembaga PAUD dan Kesetaraan yang Melakukan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	698 Lembaga	1.01.03.2.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	Semua Kab/Kota	
	<b>1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Persentase Guru tersertifikasi	91,75 %	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah dokumen yg disusun	2 dokumen	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah dokumen yg disusun	2 dokumen	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah dokumen yg disusun	1 dokumen	Semua Kab/Kota	
<b>1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>											
	<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	8 dokumen	1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja / RKT/ Renstra	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	5 dokumen	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Jumlah Dokumen	1000 Orang 12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	0 -	1.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	2 unit	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian	0 -	1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan / dikembangkan kapasitasnya	70 orang	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	0 -	1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dinkes	12 item	Kota Malang	
							1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor	30 item	Semua Kab/Kota Kota	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
										Malang	
						1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	21 item		Kota Malang	
						1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	20 item		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 surat kabar		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 kali		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	0 -	1.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	0 unit		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						1.02.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 paket		Kota Malang	
						1.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor	5 unit		Kota Malang	
			1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	0 -	1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	12 bulan		Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	0 -	1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	28 unit	Kota Malang		
						1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	70 unit	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						1.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	50 unit	Kota Malang		
			1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah pelayanan BLUD yang diberikan kepada masyarakat	12 bulan	1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Operasional puskesmas BLUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang		
							Operasional Rumah Sakit	12 Bulan			
			1.02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah layanan protokol dan komunikasi pimpinan	0 -	1.02.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan	Penyediaan Makanan dan Minuman	250000 kotak	Kota Malang		
	<b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Presentase Unit Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi SPM	100 %	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasyankes yang memenuhi standar Jumlah Fasyankes yang memenuhi standar	17 fasyankes 17 Fasyankes	1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas	Jumlah gedung UPT/ fasilitas pelayanan kesehatan yang dibangun	2 Puskesmas	Kota Malang	
						1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah gedung rumah sakit yang dibangun	0 Gedung	Semua Kab/Kota		
						1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah gedung puskesmas/ puskesmas pembantu yang direhab / dipelihara	23 gedung	Kota Malang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah ambulan yang diadakan	9 unit	Kota Malang	
							1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan Kesehatan	16 Jenis	Kota Malang	
							1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	4 item	Kota Malang	
							1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah alat kesehatan yang diadakan untuk pelayanan kesehatan	4 item	Kota Malang	
							1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	jumlah obat obatan puskesmas	105 item	Kota Malang	
							1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Bahan Medis Habis Pakai Puskesmas	40 item	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah alat kesehatan di puskesmas yang dikalibrasi	19 item	Kota Malang	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan yang memenuhi SPM	12 SPM		1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah alat kesehatan di puskesmas yang dipelihara	21 item	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah ibu hamil yang dilayani	13209 orang	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah ibu bersalin yang dilayani	12608 orang	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah bayi baru lahir yang dilayani	12008 bayi	Kota Malang	
								Jumlah balita yang dilayani	59322 balita	Kota Malang	
								Jumlah anak usia pendidikan dasar yang dilayani	149484 orang	Kota Malang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif yang dilayani	605.931 orang	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang dilayani	85904 orang	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang dilayani	227270 orang	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus (DM) yang dilayani	22.086 orang	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	jumlah orang terduga tuberkulosis (TB) yg dilayani	2.608 orang	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	1.797 orang		
							1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita stunting yang dilayani Jumlah balita underweight yang dilayani Jumlah balita wasting yang dilayani Jumlah honor kader posyandu Jumlah ibu hamil anemia yang dilayani Jumlah ibu hamil KEK yang dilayani Jumlah pengadaan PMT	7600 balita 5000 balita 2500 balita 5834 orang 1000 orang 500 orang 66100 pak	Kota Malang	
							1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Peserta Bimtek Kelompok Industri RT Jumlah Peserta Pembinaan Tim K3 Puskesmas Jumlah Peserta Pengukuran Kebugaran Jasmani	32 Kelompok 16 Puskesmas 300 Orang	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Penjamah makanan yang dilatih 160 orang Jumlah Peserta Monev Pemegang Program Kesehatan Lingkungan 40 orang		Kota Malang	
							1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah promosi kesehatan melalui media 5 media untuk pemberdayaan masyarakat		Kota Malang	
							1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional yang dibina, diawasi dan dievaluasi 6 Kelompok Jumlah peserta yang telah mendapatkan pengetahuan tentang asuhan mandiri tanaman obat keluarga dan ketrampilan 94 Orang		Kota Malang	
							1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) berat yang dilayani 1.672 orang		Kota Malang	
							1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah pelayanan PSC yang diberikan pada masyarakat 150 kali		Kota Malang	
							1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kasus diare balita yang ditemukan 1.533 balita jumlah ibu hamil yang diperiksa hepatitis B 8.844 ibu hamil jumlah kasus DBD yang ditemukan dan diobati 304 kasus jumlah kasus kusta yang ditemukan dan diobati 9 kasus jumlah kasus malaria yang ditemukan dan diobati 10 kasus Jumlah kasus pneumoni balita yang ditemukan 1.43 balita Jumlah sasaran vaksinasi bayi, baduta dan anak sekolah, bumil dan penduduk usia 18 tahun ke atas 6.9393 orang		Kota Malang	
							1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan primer kepada peserta jaminan kesehatan nasional 16 FKTP		Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah masyarakat yang menerima bantuan iura JKN/PBID JKN	261106 orang		
						1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah peserta pertemuan Kota Sehat	150 orang	Kota Malang	
						1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Operasional RSUD untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RSUD	12 Bulan	Semua Kab/Kota	
						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas		Operasional puskesmas untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas	12 Bulan	Kota Malang	
						1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Operasional Fasilitas Kesehatan lainnya untuk pelayanan kepada masyarakat	12 bulan	Kota Malang	
						1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah puskesmas yang mengikuti reakreditasi puskesmas	4 Puskesmas	Kota Malang	
						1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Jumlah KLB yg ditangani kurang dari	24 kasus	Kota Malang	
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sistem informasi / aplikasi	1 aplikasi	1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah sistem informasi / aplikasi yang terintegrasi	1 aplikasi	Kota Malang	
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memiliki izin operasional	26 FKTL	1.02.02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memiliki izin operasional	26 FKTL	Kota Malang	
					Jumlah Rumah Sakit kelas C, D yang berizin	25 FKTL		Jumlah Pengadaan Pelayanan Kesehatan	13 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							Jumlah Puskesmas yang mengikuti kegiatan penguatan manajemen puskesmas	16 Puskesmas			
								Jumlah klinik swasta yang mengikuti pertemuan pembinaan fasilitas kesehatan primer ; Jumlah peserta	68 Klinik	Kota Malang	



No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								pembina klinik / laboratorium pratama			
	<b>1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Tenaga Medis yang berkompeten	89 %	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang diberi rekomendasi	2000 orang	1.02.03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	jumlah tenaga kesehatan yang dibina dan diawasi	2000 orang	Kota Malang	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek dan pertemuan	226 orang	1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah peserta bimtek pemakaian obat rasional dan bimtek pengelolaan obat jumlah petugas pengelola alkes dan petugas ASPAK Jumlah tenaga kesehatan Dinkes yg ditingkatkan pengetahuannya	55 orang 45 orang 30 orang	Kota Malang	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan yang kompeten	280 orang	1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah tenaga kesehatan puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan yg ditingkatkan kemampuannya	0 orang	Kota Malang	
	<b>1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	persentase sarana kefarmasian dan industri rumah tangga yang dibina diawasi dan memenuhi syarat	80 %	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar	247 Sarana	1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	jumlah sarana farmasi dan sarana obat tradisional pengelola jamu yg dibina dan diawasi	200 sarana 80 orang	Kota Malang	
				1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah penerbitan ijin sertifikat PIRT	240 Sertifikat	1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	jumlah sampel pangan diperiksa jumlah sarana pangan	40 sampel 250 sarana	Kota Malang	
	<b>1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	persentase UKBM yang dibina	100 %	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat	Jumlah UKBM yg aktif	57 UKBM	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kelurahan siaga aktif	57 kelurahan	Kota Malang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Daerah Kabupaten/Kota									
			1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dibina	457 UKBM	1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kader yang diberdayakan	5834 orang	Jumlah Poskestren	10 Poskestren	Kota Malang	
							Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja	16 Pos UKK	Jumlah Posyandu Lansia	57 Posyandu		
							Jumlah Posyandu strata purnama mandiri	367 Posyandu	Jumlah Saka Bakti Husada	1 SBH		
<b>1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>												
	<b>1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penanggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja/RKT dan renstra	2 dokumen	Jumlah peserta sosialisasi	200 orang	Semua Kab/Kota Kota Malang
							1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen			Kota Malang
							1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	1 dokumen			Kota Malang
							1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1 dokumen			Semua Kab/Kota Kota Malang
							1.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA	1 dokumen			Kota Malang
							1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	3 dokumen			Semua Kab/Kota Kota Malang
							1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi	4 dokumen			Semua Kab/Kota Kota Malang

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	145 orang		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						1.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah verifikasi keuangan	2500 berkas		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 dokumen		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	20 %	1.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan barang milik daerah	6 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %	1.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	20 orang		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	80 %	1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15 Jenis		Kota Malang	
						1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	55 Jenis		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan	28 Jenis		Kota Malang	
						1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dus Minuman Jumlah Kotak Makanan	2800 dos 2800 kotak		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Tamu Jumlah Fasilitasi Tamu	2500 dos 2500 kotak		Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	32 kali		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	50 %	1.03.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah taman yang dipelihara	2 Lokasi		Kota Malang	
			1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100 %	1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	10000 surat		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan pembayaran belanja telepon, air, listrik dan surat kabar	48 tagihan		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						1.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	15 Jenis		Kota Malang	
						1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Ruang yang dibersihkan	6604 m2		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80 %	1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bbm dan pelumas yang disediakan selama 1 tahun Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	83200 liter 60 kendaraan		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						1.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara	16 Jenis		Kota Malang	
	<b>1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Persentase ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung	47,45 %	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Volume debit air pada bangunan penampung	630 m3	1.03.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen rencana teknis bangunan penampung air lainnya	1 dokumen	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							1.03.02.2.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah lokasi penampung air yang dibangun	25 titik	Kota Malang	
			1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	30 Ha		1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Lokasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan	5 Lokasi	Kota Malang	
	<b>1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Persentase rumah tinggal berakses air bersih	94.01 %	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	1466 SR	1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Dokumen Perencanaan  Jumlah SR yang dibangun,dikembangkan dan direhabilitasi	1 dokumen  0 SR	Kota Malang	
							1.03.03.2.01.14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah peserta pada pelaksanaan pembinaan rutin	50 orang	Kota Malang	
							1.03.03.2.01.15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah sambungan rumah yang dipelihara secara rutin	400 SR	Kota Malang	
	<b>1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	85.32 %	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman  Jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	1200.5 SR .TS  1200.5 SR.TS	1.03.05.2.01.05 Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan infrastruktur air limbah  Jumlah instalasi pengolahan air limbah domestikyang dipelihara  Jumlah Saluran Rumah (SR) yang direhabilitasi/dikembangkan	1 dokumen  11 lokasi  400 SR	Kota Malang	
							1.03.05.2.01.06 Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Lokasi Pembangunan/ Penyediaan SubSistem Pengolahan Setempat  Jumlah sambungan rumah (SR) yang tersambung	5 lokasi  120 SR	Kota Malang	
							1.03.05.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Jumlah peserta sosialisasi air limbah domestik	500 orang	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
							Domestik					
							1.03.05.2.01.09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta pada pelaksanaan monitoring dan peningkatan kinerja pengolahan air limbah domestik	100 orang		Kota Malang	
							1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Modular Sewerage System yang terpelihara Jumlah penerimaan dari pelayanan pembuangan lumpur tinja dan air kotor dari tangki ke saluran pembuangan pada IPLT	2 lokasi 3500 kali		Kota Malang	
							1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Lokasi Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Jumlah sambungan rumah (SR) yang tersambung	3 lokasi 350 SR		Kota Malang	
							1.03.05.2.01.14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah layanan penyedotan lumpur tinja	250 kali		Kota Malang	
							1.03.05.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah lokasi Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	1 dokumen		Semua Kab/Kota	
							1.03.05.2.01.16 Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah rumah tinggal ber Tangki septik yang melakukan pembuangan air limbah domestik ke IPLT	3250 Tangki Septik		Kota Malang	
	<b>1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	Persentase Drainase Kota Dalam Kondisi Baik	84.01 %	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase kota dalam kondisi baik	25 KM	1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Perencanaan teknis sistem drainase perkotaan	1 dokumen		Kota Malang	
							1.03.06.2.01.02 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	10 dokumen		Kota Malang	
							1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah lokasi genangan air yang ditangani	6 Lokasi		Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah titik Pemeliharaan Insidental Turap/Talud/ Bronjong	3 titik	Kota Malang	
							1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase kota yang ditingkatkan fungsinya	7 km	Kota Malang	
							1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Titik Rehabilitasi/Pengembangan Turap/Talud/Bronjong	1 titik	Kota Malang	
							1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang di lakukan Pemeliharaan Insidental	0.8 km	Kota Malang	
	<b>1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	Persentase penanganan infrastruktur permukiman	47.50 %	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan permasalahan infrastruktur di daerah permukiman, Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	66.2 lokasi. unit	1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi Kawasan Permukiman yang berhasil ditata secara layak dan nyaman	39 lokasi	Kota Malang	
							1.03.07.2.01.02 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi permukiman yang dipelihara	27 Lokasi	Kota Malang	
	<b>1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Persentase gedung milik daerah yang menjadi kewenangan dinas dalam kondisi baik	94.93 %	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah gedung/bangunan kantor Milik Daerah dan fasilitas umum dalam kondisi baik	19 gedung	1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah lokasi pelaksanaan SLF di Kota Malang	0 lokasi	Kota Malang	
							1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah pelaksanaan pengendalian terhadap kesesuaian konstruksi bangunan gedung	6 pelaksanaan	Kota Malang	
							1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi SLF	0 orang	Kota Malang	
							1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	1 dokumen	Kota Malang	
							1.03.08.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data bangunan gedung	1500 data	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dibangun dan direhabilitasi	14 gedung	Kota Malang	
							1.03.08.2.01.13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dipelihara secara rutin dan insidental	5 gedung	Kota Malang	
	<b>1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	Persentase Pembangunan Kawasan Prioritas Sesuai RTBL	7 %	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata dengan baik	100 m2	1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan PBL	1 dokumen	Kota Malang	
							1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Luasan kawasan penataan bangunan	2550 m2	Kota Malang	
	<b>1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	94,46 %	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penerangan Jalan dalam kondisi baik, Panjang jalan Kota dalam Kondisi Mantap, Jumlah jembatan Kota dalam Kondisi Mantap, persentase pelayanan laboratorium konstruksi	4003028 titik.km.lokasi	1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan Infrastruktur jalan dan jembatan Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur penerangan jalan	1 dokumen 1 dokumen	Kota Malang	
							1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	jumlah jalan yang terbangun/terrehabilitasi Jumlah lokasi pembangunan pedestrian Jumlah titik penerangan jalan Kota Malang yang terbangun	0 lokasi 2 Lokasi 40 titik	Kota Malang	
							1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	Jumlah lokasi pedestrian yang direhabilitasi dan dikembangkan Panjang Jalan yang direhabilitasi dan dikembangkan	2 Lokasi 4.8 km	Kota Malang	
							1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Pelayanan Laboratorium Pengujian Konstruksi	85 kali	Kota Malang	



No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Titik Penerangan Jalan yang terpelihara Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan	2250 titik 2 km	Kota Malang	
							1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun	3 Lokasi	Kota Malang	
							1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah lokasi Pemeliharaan Rutin jembatan	1 Lokasi	Kota Malang	
							1.03.10.2.01.20 Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah lokasi Pemeliharaan Insidentil jembatan	2 lokasi	Semua Kab/Kota	
	<b>1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	89 %	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi /analisis di wilayah kabupaten/kota	30 orang	1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang tersertifikasi	30 orang	Kota Malang	
				1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	1.03.11.2.02.01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah aplikasi database jasa konstruksi Jumlah data badan usaha yang terupdate pada sistem informasi Jumlah dokumen investasi infrastruktur dan pasar konstruksi	0 aplikasi 15 badan usaha 0 dokumen	Kota Malang	
							1.03.11.2.02.02 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen HSPK	2 dokumen	Kota Malang	
				1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan	75 peserta	1.03.11.2.03.03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta Pelaksanaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	75 peserta	Kota Malang	
	<b>1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Persentase Pemanfaatan SIPR Dalam Pemanfaatan Ruang	87 %	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan persetujuan teknis substansi teknis RTR	1 Materi Teknis/dokumen	1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang	3 dokumen	Kota Malang	
							1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah peserta sosialisasi	120 orang	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
			1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang sonkron dengan RRTR	5 dokumen	1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penelitian dan kajian Kawasan Strategis Kota Malang	0 dokumen	Kota Malang		
			1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Luas bidang pemanfaatan ruang yang tersinkronisasi dalam peta	100000 m2	1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah	1 dokumen	Kota Malang		
						1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang tersinkronisasi dalam peta	200 dokumen	Kota Malang		
			1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Identifikasi pelanggaran Tata Ruang / Bangunan	6 lokasi	1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Lokasi Identifikasi pelanggaran Tata Ruang / Bangunan	4 Lokasi	Kota Malang		
<b>1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>											
	<b>1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	0.04 %	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kajian Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana	1 dokumen	Kota Malang	
				1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100 %	1.04.02.2.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah peserta sosialisasi	250 peserta	Kota Malang	
				1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah unit hunian dalam kondisi baik	288 unit	1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah unit hunian yang ter huni	288 unit	Kota Malang	
	<b>1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Persentase penanganan area kawasan kumuh	72.13 %	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	6.55 %	1.04.03.2.03.01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen perencanaan peremajaan/ pemugaran permukiman dan kawasan kumuh	1 dokumen	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							1.04.03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah peserta pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	50 orang	Kota Malang	
	<b>1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Persentase Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU	63.76 %	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	70 PSU	1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) yang di serah terimakan	70 PSU	Kota Malang	
<b>1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>											
	<b>1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	12 bulan 100 %	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen Renja awal dan Renja perubahan yang disusun	6 dokumen 2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	4 Dokumen	Kota Malang	
							1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	Kota Malang	
							1.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen	Kota Malang	
							1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Jumlah dokumen realisasi kinerja yang disusun	1 dokumen 4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Jumlah dokumen IKM yang disusun	2 dokumen 2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar dan jumlah dokumen laporan keuangan Persentase penyerapan Anggaran	12 bulan 90 %	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN jumlah terbayarkan gaji dan tunjangan ASN	14 Kali 1 tahun	Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPP yang diverifikasi	300 SPP	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.05.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan atas hasil pemeriksaan yang disusun	2 Dokumen	Kota Malang	
							1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	5 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	90 %		1.05.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD dan dokumen RKPBMMD yang disusun	2 Dokumen	Kota Malang	
							1.05.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan pengecekan kondisi barang milik daerah	4 Dokumen	Kota Malang	
							1.05.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Kartu Inventarisasi Barang (KIB)	1 Dokumen	Kota Malang	
							1.05.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pemberian label Barang Milik Daerah (BMD)	250 Unit	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas dan atribut terpenuhi dan ASN yang mendapat pelatihan Persentase aparatur BPBD yang terlayani	12 bulan 100 %		1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang dibeli Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Terpenuhi	70 Stel 240 Stel	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mendapat pelatihan Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan	10 Orang 14 Orang	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan penunjang administrasi umum perangkat daerah Persentase ketercukupan sarana prasarana kantor	12 bulan 100 %		1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	5 Jenis 8 jenis	Kota Malang	
							1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terpenuhi Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 jenis 5 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	8 Jenis	Kota Malang	
							1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan jumlah kegiatan peringatan/kegiatan insidental yang terselenggara	3 Jenis 1 Kegiatan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	4 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan yang disediakan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia	2 Jenis 1066 eksemplar	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	75 Orang	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	20 Kali	Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah rapat koordinasi, konsultasi SKPD dan penyediaan makanan dan minuman	1 tahun		
			1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan dan sarana prasarana gedung kantor yang tersedia 42 unit  Persentase peralatan dan perlengkapan yang tersedia 100 %		1.05.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional 15 unit Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibeli 3 Jenis			Semua Kab/Kota Kota Malang	
						1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli 3 Jenis			Kota Malang	
						1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan perlengkapan penanggulangan bencana yang dibeli 10 Jenis			Semua Kab/Kota Kota Malang	
						1.05.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	luasan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun 400 m2			Kota Malang	
						1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung dan kantor 27 unit Luasan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun 100 m2			Kota Malang	
						1.05.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibeli 1 Paket			Kota Malang	
			1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah 12 bulan Persentase terlaksananya administrasi surat menyurat 100 %		1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik 2400 surat			Semua Kab/Kota Kota Malang	
						1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik 12 bulan Jumlah bulan pembayaran belanja telpon air dan Listrik 12 bulan			Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
						1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah surat keluar yang dibuat Luasan ruangan yang dibersihkan	1200 surat 600 m2	Semua Kab/Kota Kota Malang		
			1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas dan gedung kantor yang terpelihara Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	12 bulan 100 %	1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang yang dipelihara	53 unit 24 Unit	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						1.05.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	20 Unit	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	19 Unit	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara Luasan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 gedung 50 m2	Semua Kab/Kota Kota Malang		
	<b>1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentaman masyarakat dalam sehari	2.4 -	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah patroli siaga trantibum, jumlah gedung dan aset pemerintah Kota Malang yang diamankan, jumlah pengamanan lokasi dan kegiatan dan pejabat, jumlah penertiban trantibum dengan jajaran keamanan lainnya, jumlah penertiban pembongkaran reklame, jumlah operasi penegakan trantibum	1551 kali	Kota Malang		
						1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta pelatihan, jumlah pengerahan Satuan Linmas, jumlah peserta sosialisasi	1285 orang	Kota Malang		
						1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah anggota Satlinmas yang dibina	3100 orang	Kota Malang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				
							1.05.02.2.01.07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	tersedianya aplikasi pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	1 Aplikasi	Kota Malang	
			1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pembinaan/penyuluhan /pengawasan yang diberikan	1500 kali	Kota Malang	
							1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penindakan pelanggaran pro yustisia	12 kali	Kota Malang	
	<b>1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	Persentase masyarakat tangguh bencana	- %	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	100 %	1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang disusun	1 Dokumen	Kota Malang	
							1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialisasi rawan bencana	1000 Orang	Kota Malang	
			1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %	1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	690 Orang	Kota Malang	
							1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB	10000 Orang	Kota Malang	
							1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang disediakan	5 Jenis	Kota Malang	



No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.03.2.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian kesesuaian perencanaan pembangunan daerah terhadap risiko bencana	1 Dokumen	Kota Malang	
							1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	100 KK	Kota Malang	
							1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang ditingkatkan kapasitasnya	14 Orang	Kota Malang	
							1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen rencana Kontijensi yang disusun	2 Dokumen	Kota Malang	
							1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1000 Orang	Kota Malang	
							1.05.03.2.02.11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen RPKB yang disusun	1 Dokumen	Kota Malang	
			1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100 %		1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan saat darurat bencana	5 Jenis	Kota Malang	
							1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat pertolongan dan evakuasi	200 Orang	Kota Malang	
							1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan logistik	200 Orang	Kota Malang	
			1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun	50 %		1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan tentang kebencanaan yang disusun	3 Dokumen	Kota Malang	
							1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Antar Lembaga	6 Kali	Kota Malang	
							1.05.03.2.04.03 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam	Jumlah Perjanjian Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana	3 MOU	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				
							1.05.03.2.04.05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah pelaksanaan jambore kebencanaan 1 Kali		Kota Malang	
	<b>1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Persentase Kejadian Kebakaran Yang Ditangani	100 %	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesiagaan penanggulangan bahaya kebakaran	24 jam	1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang terpelihara 9 unit		Kota Malang	
							1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah waktu kesiagaan penanggulangan bahaya kebakaran 24 Jam		Kota Malang	
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat	5 kali	1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan kepada masyarakat 250 orang		Kota Malang	
	<b>1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>										
	<b>1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen	11 dokumen	1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renstra/renja,kajian 3 dokumen		Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.06.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA 4 dokumen		Kota Malang	
							1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja,LPPD 2 dokumen		Semua Kab/Kota Kota Malang	
							1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat 2 dokumen		Semua Kab/Kota Kota	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
										Malang	
			1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	29 dokumen	1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen gaji	14 dokumen		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan	1 dokumen		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diasuransikan dan petugas keamanan	13 unit	1.06.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diasuransikan	13 unit		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	65 asn	1.06.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	65 asn		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah komponen listrik,ATK,insidentil,barang cetakan dan penggandaan, peraturan perundang undangan, rapat-rapat koordinasi dan jumlah makanan dan minuman	77.12 jenis.bulan	1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20 jenis		Kota Malang	
						1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat tulis kantor	50 jenis		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil,sarasehan DHC 45/veteran	1 kali		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	7 jenis		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	36 exemplar		Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat- rapat koordinasi, konsultasi ke luar daerah dan jumlah makanan dan minuman	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pengadaan peralatan kantor dan mesin lainnya, jumlah aplikasi	20 jenis	1.06.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan kantor dan mesin lainnya, jumlah aplikasi	20 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang		
			1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	suvei kepuasan masyarakat internal	90 angka	1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang teradmisistrasi dengan baik dan jumlah informasi publikasi	7500 surat	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah petugas kebersihan, keamanan dan driver	27 orang	Semua Kab/Kota Kota Malang		
			1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan jumlah sopir, jumlah peralatan kantor yang terpelihara, jumlah gedung yang dipelihara	15.4 jenis, gedung	1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan jumlah driver	98 kendaraan	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						1.06.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	20 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor yang terpelihara	15 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung yang dipelihara	4 gedung	Semua Kab/Kota Kota Malang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>			1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.06.02.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	jumlah peserta sosialisasi	80 orang	Kota Malang	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	jumlah PSM yang dibina, pengurus LKS yang dibina, karang werdha dan karang taruna yang dibina	1740 orang	1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah pekerja sosial masyarakat yang di bina, puskesmas	202 orang	Kota Malang	
							1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah karang werdha yang mengikuti pembinaan, jumlah karang taruna dan pengurus LKS yang dibina	215 orang	Kota Malang	
							1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	jumlah pengurus LKS yang dibina	420 orang	Kota Malang	
	<b>1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Serta Meningkatkan Kemampuan Fungsi Sosialnya	14.25 %	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial (gelandangan dan pengemis) di luar panti yang memperoleh rehabilitasi sosial	200.6826 orang.kpm	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan permakanan	7597 orang	Kota Malang	
							1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial (gelandangan dan pengemis) di luar panti yang memperoleh bantuan sandang	30 orang		
							1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang Disabilitas yang mendapatkan alat bantu	50 orang	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	jumlah orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asal	150 orang	Kota Malang	
							1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial (gelandangan dan pengemis) di luar panti yang memperoleh bimbingan fisik mental, dan sosial	7 orang	Kota Malang	
							1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat memperoleh bimbingan sosial	130 orang	Kota Malang	
							1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat memperoleh fasilitasi	20 orang	Kota Malang	
							1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat memperoleh layanan kedaruratan	1600 KPM	Kota Malang	
			1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan rehabilitasi sosial	230 orang		1.06.04.2.02.01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah layanan data dan pengaduan yang tersedia	1 dokumen	Kota Malang	
							1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan	jumlah layanan kedaruratan yang diberikan	33 orang	Kota Malang	
							1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan permakanan	30 orang	Kota Malang	
							1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sandang	10 orang	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							1.06.04.2.02.06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan alat bantu	30 orang	Kota Malang	
							1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	jumlah PMKS Lainnya yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	20 orang	Kota Malang	
							1.06.04.2.02.09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PMKS lainnya memperoleh fasilitasi	20 orang	Kota Malang	
							1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS lainnya memperoleh pelayanan reunifikasi keluarga	15 orang	Kota Malang	
							1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS lainnya memperoleh pelayanan rujukan	15 orang	Kota Malang	
							1.06.04.2.02.14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama yang dibuat	40 orang	Kota Malang	
	<b>1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Serta Meningkatkan Kemampuan Fungsi Sosialnya	14.25 %	1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			1.06.05.2.01.02 Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dirujuk	10 anak	Kota Malang	
							1.06.05.2.01.03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	10 kali	Kota Malang	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah data fakir miskin yang tervalidasi	1 dokumen	1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah fakir miskin yang masuk di DTKS, jumlah kajian, jumlah pertemuan puskesmas	119051 orang	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah data fakir miskin yang dikelola	10150 KPM	Kota Malang	
	<b>1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100 %	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	jumlah korban bencana yang diberi bantuan	200 orang	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	jumlah korban bencana yang diberi bantuan	200 orang	Kota Malang	
							1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang memperoleh bantuan sandang	50 orang	Kota Malang	
							1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial	10 orang	Kota Malang	
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kordinasi dan sosialisasi	65 orang	1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah kordinasi dan sosialisasi	65 orang	Kota Malang	
	<b>1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Terpelihara Dengan Baik	100 %	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	2 taman	1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	2 makam	Kota Malang	
	<b>2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>										
	<b>2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen prencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	2.07.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja / RKT	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.07.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	10 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.07.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SKM Jumlah dokumen standar pelayanan Jumlah sertifikasi	2 dokumen 2 dokumen 1 sertifikasi	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	70 orang	Semua Kab/Kota Kota	



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										Malang	
						2.07.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	5 dokumen		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	80 %	2.07.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	2 laporan		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %	2.07.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	11 stel		Kota Malang	
						2.07.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	25 orang		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	80 %	2.07.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis		Kota Malang	
						2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor	67 jenis		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	14 jenis		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						2.07.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan Jumlah peraturan perundang-undangan	240 eks 2 dokumen		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	7007 kotak 26 kali		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						2.07.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	4290 berkas		Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100 %	2.07.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor	5 jenis	Kota Malang	
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100 %	2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.07.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor	0 jenis	Kota Malang	
							2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bahan dan alat Luasan ruangan yang dibersihkan	18 jenis 750 m2	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80 %	2.07.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah volume BBM dan pelumas	45 unit 22400 liter	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.07.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan gedung kantor yang dipelihara	209 m2	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.07.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 jenis	Kota Malang	
	<b>2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	1 %	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pengangguran yang dilatih	125 orang	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan keterampilan dan produktivitas	125 orang	Kota Malang	
				2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang memiliki perizinan	35 LPKS	2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang mengikuti Bimtek	35 LPKS	Kota Malang	
	<b>2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	77 %	2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	33 BKK	2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	jumlah peserta pembinaan Bursa Kerja Khusus	100 orang	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan							
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kab/kota	465 lowongan	2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	0	0 orang		Kota Malang		
						2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja	jumlah perusahaan peserta job market fair	50 perusahaan		Kota Malang		
			2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	35 orang	2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	jumlah peserta sosialisasi perlindungan PMI dan PPTKIS	35 orang		Kota Malang		
	<b>2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	10.18 %	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan	10 %	2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	jumlah peserta bimtek	100 orang		Kota Malang	
						2.07.05.2.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	jumlah peserta bimtek	0 orang		Kota Malang		
						2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	jumlah peserta bimtek	0 orang		Kota Malang		
			2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	67 %	2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan	100 orang		Kota Malang		
						2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	jumlah peserta bimtek	0 orang		Kota Malang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kegiatan	2 dokumen	Kota Malang	
							2.07.05.2.02.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	jumlah peserta bimbingan teknis	0 orang	Kota Malang	
<b>2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>											
	<b>2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	93 %	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta pelatihan	55 orang	2.08.02.2.01.04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	jumlah peserta pelatihan	55 orang	Kota Malang	
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta	100 orang	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	jumlah peserta pemilihan perempuan inspiratif dan kaukus politik	100 orang	Kota Malang	
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta	1060 orang	2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta	250 orang	Semua Kab/Kota	
							2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta	810 orang	Kota Malang	
	<b>2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100 %	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	25 orang	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta bimtek dan sosialisasi	200 orang	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	25 orang	Kota Malang	
			2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	200 orang	2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga perempuan peduli perlindungan	200 orang	Kota Malang		
	<b>2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	93 %	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta pelatihan	90 orang	2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta pelatihan menjahit mahir ; pelatihan hantaran dan hand bouquet	90 orang	Kota Malang	
	<b>2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Persentase Perangkat daerah yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)	100 %	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen data gender	1 dokumen	2.08.05.2.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen	1 dokumen	Kota Malang	
	<b>2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100 %	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
							2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
							2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan				

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	<b>2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	- -	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta sosialisasi	50 orang	2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta sosialisasi	150 orang	Kota Malang	
			2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kekerasan terhadap anak yang ditangani	35 anak	2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah layanan perlindungan terhadap anak	35 orang	Kota Malang		
						2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan peningkatan kualitas hidup anak ( temu anak/KLA dan Forum anak	200 orang	Kota Malang		
						2.08.07.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan yang memperoleh penguatan jejaring ( Bimtek)	100 orang	Kota Malang		
						2.08.07.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta bimtek	100 orang	Kota Malang		
<b>2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>											
	<b>2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penanggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	2.09.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja dan renstra	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							2.09.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA/PRKA / dan DPA/DPPA	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.09.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.09.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil SKPD	0 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %		2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen	12 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.09.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %		2.09.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya selama 12 bulan	240 orang	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100 %		2.09.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik	8 jenis	Kota Malang	
							2.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK	40 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.09.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 bacaan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	1200 kotak 50 kali	Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100 %	2.09.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	3 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang		
			2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100 %	2.09.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat teradministrasi selama 1 tahun	1750 surat	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, listrik dan air	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah luasan yang dibersihkan	20727 m2	Semua Kab/Kota Kota Malang		
			2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	2.09.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	27 kendaraan	Kota Malang		
						2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						2.09.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhabilitasi dan jumlah gedung kantor dipelihara	1 gedung	Semua Kab/Kota Kota Malang		
	<b>2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Rasio Konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras 0.096 -	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Prosentase peningkatan ketersediaan pangan utama	2 %	2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Promosi	3 Promosi	Kota Malang		
						2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat	Jumlah kemitraan	2 Kemitraan	Kota Malang		



No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							dan Toko Tani Indonesia				
			2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pengeluaran per kapita makanan 671058 rupiah			2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah rekomendasi 2 rekomendasi		Kota Malang	
							2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah peserta KIE Penganekaragaman Pangan 100 peserta		Kota Malang	
	<b>2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Persentase PSAT yang layak konsumsi 2 %	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSAT 15 angka			2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta 100 peserta		Kota Malang	
<b>2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>											
	<b>2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	Persentase kelurahan yang sudah terinventarisir tanah kosong dalam data base 7.02 %	2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	"Jumlah dokumen inventarisasi pemanfaatan tanah kosong" 2 Kelurahan			2.10.08.2.02.01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah dokumen inventarisasi pemanfaatan tanah kosong 1 dokumen		Kota Malang	
<b>2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>											
	<b>2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 100 %	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Sesuai Ketentuan 100 %			2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 2 dokumen		Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.11.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA 4 dokumen		Kota Malang	
							2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 9 dokumen		Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat 2 dokumen		Semua Kab/Kota Kota	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										Malang	
			2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran Gaji	14 bulan		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						2.11.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	14 dokumen		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terinventarisir	100 %	2.11.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	11 dokumen		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %	2.11.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu	1400 stel		Kota Malang	
						2.11.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	25 orang		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Kantor yang terfasilitasi	100 %	2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	10 Jenis		Kota Malang	
						2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor	75 Jenis		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						2.11.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	17 Jenis		Kota Malang	
						2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental	2 kali kegiatan		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	11 Jenis		Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	225 buku	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	36000 kotak 90 kali	Semua Kab/Kota Kota Malang		
			2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	100 %	2.11.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	43 unit	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						2.11.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor	18 jenis	Kota Malang		
			2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	100 %	2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Informasi, publikasi, dan Komunikasi Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	100 kali 8500 surat	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Belanja Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pengemudi/supir dinas Jumlah Petugas Keamanan Luasan ruangan yang dibersihkan	2 orang 3 orang 13500 m2	Semua Kab/Kota Kota Malang		
			2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Voucher BBM	125000 lembar	Kota Malang		
						2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	267 unit	Semua Kab/Kota Kota Malang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan gedung kantor yang dipelihara	13500 m2	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.11.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9 Jenis	Kota Malang	
	<b>2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun dan Sesuai Standart	85 %	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan	4 Dokumen	2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Perencanaan Lingkungan	4 dokumen	Kota Malang	
				2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan	11 Dokumen	2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Kajian Perencanaan Lingkungan	0 dokumen	Kota Malang	
	<b>2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	64,81 %	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	35 titik	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	54 titik	Kota Malang	
							2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah peserta yang memahami tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	80 peserta	Kota Malang	
							2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Lembar Hasil Uji (LHU)	85 LHU	Kota Malang	
				2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Peta Kerawanan Kerusakan Lingkungan	1 Dokumen	2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Titik Kerawanan Kerusakan Lingkungan	2 titik	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Persentase luas RTH Publik yang dikelola	0.87 %	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik yang dikelola	95.31551461 Hektar	2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan RTH	3 dokumen	Kota Malang	
							2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi RTH yang terjaga dan terpelihara	683 Lokasi RTH	Kota Malang	
							2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Lokasi Taman- Taman Aktif dan Kebun Bibit terkelola	11 Lokasi	Kota Malang	
	<b>2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	persentase pelaku usaha yang sudah melakukan pengelolaan limbah B3	23 %	2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Pelaku usaha yang sudah melakukan pengelolaan Limbah B3	20 kegiatan/usaha	2.11.05.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang sudah melakukan penyimpanan Limbah B3	20 kegiatan/usaha	Kota Malang	
	<b>2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Persentase Ketaatan Masyarakat dan Kegiatan/Usaha Pemilik Izin Lingkungan	22 %	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengawasan kegiatan/usaha yang mempunyai Izin Lingkungan	67 Kegiatan/ UsahaUsaha	2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Kegiatan usaha yang mengikuti Sosialisasi	150 kegiatan/usaha	Kota Malang	
							2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan dan penegakan Lingkungan Hidup	67 kali	Kota Malang	
							2.11.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Pelanggaran yang ditangani	20 kegiatan/usaha	Kota Malang	
	<b>2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN</b>	Persentase Komunitas Berbudaya Lingkungan di Kota Malang	47 %	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan	Jumlah Komunitas Berbudaya Lingkungan yang dibina	110 Sekolah	2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk	Jumlah Pembinaan yang di laksanakan	1 pembinaan	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>			Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Lembaga Kemasyarakatan				
							2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah edukasi Lingkungan Hidup	110 Sekolah	Kota Malang	
	<b>2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bernilai baik	31.82 %	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
	<b>2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase pengaduan yang terselesaikan	90 %	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang tertangani	36 pengaduan	2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang masuk	40 pengaduan	Kota Malang	
	<b>2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Persentase Penanganan Sampah	73 %	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Jumlah volume sampah yang tertangani	181578 ton/tahun	2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan Jakstrada	2 dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Sampah yang berkurang	64671.77 ton/tahun	Kota Malang	
							2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Jalan yang dibersihkan Jumlah Sampah yang terproses di TPA volume sampah yang terangkut	376791 m2 178850 ton/tahun 178850 ton/tahun	Kota Malang	
							2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana kebersihan	13 Jenis	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
<b>2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>											
	<b>2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja/RKT	2 dokumen	2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja/RKT	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Zona Integritas	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang akuntabel	2 laporan	2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	14 bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	148 orang	2.12.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	148 Orang	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen, perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50 Titik	Kota Malang	
							2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah macam alat tulis kantor	85 macam	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	409750 Lembar	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	47 Exemplar	Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman Jumlah rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4200 kotak 37 Dalam daerah 37 Luar daerah	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan kantor	20 unit	2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	20 Unit	Semua Kab/Kota Kota Malang		
			2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Surat	6696 Surat	2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	6696 Surat	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telepon air dan listrik	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						2.12.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Peralatan	Kota Malang		
						2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah luasan ruangan yang dibersihkan	1050 m2	Semua Kab/Kota Kota Malang		
			2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Luasan gedung kantor yang dipelihara	2 gedung	2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	29 Kendaraan	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luasan gedung kantor yang dipelihara	2 gedung	Semua Kab/Kota Kota Malang		
	<b>2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	96,5 %	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk ber KTP	762091 Orang	2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk ber KTP-el.	762091 orang	Kota Malang	



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.12.02.2.01.08 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah pendataan dokumen Kependudukan	60000 dokumen KK	Kota Malang		
	<b>2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi pencatatan sipil	93 %	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta kelahiran dan jumlah akta kematian	23396 dokumen	2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah kutipan akta kelahiran Jumlah kutipan akta kematian	19497 dokumen 3899 dokumen	Kota Malang	
						2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah relasi kerjasama	6 instansi	Kota Malang		
	<b>2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Persentase penduduk yang telah tertib administrasi kependudukan	94 %	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah penduduk yang telah tertib administrasi kependudukan	942855 dokumen kependudukan	2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah data base administrasi kependudukan yang disusun Jumlah kapasitas server serta pemeliharaan jaringan & server	6655 berkas 8 unit		
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah informasi yang tersampaikan	6 layanan	2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah media penyebaran informasi	6 jenis media	Kota Malang	
	<b>2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	persentase data hasil pelayanan selama satu tahun	100 %	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Profil perkembangan penduduk	1 dokumen	2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah buku profil perkembangan penduduk	30 buku	Kota Malang	
<b>2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>											
	<b>2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	1.74 -	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	jumlah peserta pembinaan	60 orang	2.14.02.2.01.10 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	jumlah peserta pembinaan	60 orang	Kota Malang	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah admin Alkon,faskes dan klinik swasta yang bina	100 orang	2.14.02.2.02.02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	jumlah data base keluarga	1 dokumen	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.14.02.2.02.03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	jumlah dokumen profil kependudukan	1 dokumen	Kota Malang	
							2.14.02.2.02.14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	jumlah admin Alkon, faskes dan klinik swasta yang bina	100 orang	Kota Malang	
	<b>2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Cakupan peserta KB Aktif	75,8 -	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	jumlah kader IMP yang dibina	933 orang	2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	jumlah kader IMP yang dibina	933 orang	Kota Malang	
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	jumlah peserta pelayanan KB gratis	450 orang	2.14.03.2.04.01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	jumlah peserta pelayanan KB gratis	450 orang	Kota Malang	
	<b>2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Persentase kelompok UPPKS Aktif	94,83 %	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah peserta pelatihan, peserta lomba	345 orang	2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah peserta pelatihan	125 orang	Kota Malang	
							2.14.04.2.01.08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	jumlah peserta lomba	220 orang	Kota Malang	
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah peserta penguatan kelembagaan PKK, penguatan ketahanan keluarga, pendidikan & peningkatan ekonomi, pembinaan peningkatan kesehatan keluarga	4215 orang	2.14.04.2.02.01 Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	jumlah peserta penguatan kelembagaan PKK	1260 orang	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	dan lingkungan pembinaan karakter, pelatihan ketrampilan		dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					
						2.14.04.2.02.03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah peserta penguatan ketahanan keluarga, pendidikan & peningkatan ekonomi, pembinaan peningkatan kesehatan keluarga dan lingkungan dan pembinaan karakter	2955 orang		Kota Malang	
<b>2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>											
	<b>2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	5 dokumen	2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	108 orang	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Berkas	450 Berkas	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada	Jumlah dokumen	1 dokumen	2.15.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kendaraan	6 kendaraan	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
			Perangkat Daerah							Kota Malang	
						2.15.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kegiatan Identifikasi Aset	1 dokumen		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian	213 stel	2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian	110 stel		Kota Malang	
			2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan	7 kegiatan	2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah barang	6 jenis		Kota Malang	
						2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis barang	6 jenis		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan	1 kegiatan		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	14 jenis		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	2880 exemplar		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						2.15.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan, minuman dan snack	3676 kotak		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	457 Kali		Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
			2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat	5000 surat	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Kantor	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						2.15.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa	3 jenis	Kota Malang		
						2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah luasan	2 Gedung	Semua Kab/Kota Kota Malang		
			2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan	56 kegiatan	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	1 gedung	Semua Kab/Kota Kota Malang		
	<b>2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Persentase Penurunan Titik Kemacetan	9 %	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	0 -	2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Kota Malang	
			2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	0 -	2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Simpang	5 Simpang	Kota Malang		
							Jumlah Traffic Light terpasang	5 unit			
							Jumlah Unit	5 Unit			
						2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan	9 jenis	Kota Malang		
						2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			Kota Malang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
			2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	0 -	2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Pengembangan Prasarana Terminal	3 Kegiatan	Kota Malang		
						2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terminal	3 Gedung	Kota Malang		
			2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	0 -	2.15.02.2.04.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengadaan, dan pemeliharaan	4 Kegiatan	Kota Malang		
						2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Pembinaan Petugas Parkir	500 orang	Kota Malang		
			2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	0 -	2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor	14500 kendaraan	Kota Malang		
						2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Bukti lulus uji kendaraan bermotor	14500 buku	Kota Malang		
						2.15.02.2.05.06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	jumlah dokumen	1 dokumen	Kota Malang		
						2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan prasarana PKB	1 Kegiatan	Kota Malang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
			2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	0 -	2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Database Jumlah dokumen Jumlah Orang	1 Database 7 Dokumen 168 Orang	Kota Malang		
						2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jenis bahan perlengkapan Jumlah Simpang Jumlah Unit	4 unit 10 Simpang 2 Unit	Kota Malang		
						2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					
						2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan pengawasan dan pengendalian lalulintas	1 Kegiatan	Kota Malang		
						2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Program kerja forum lalu lintas dan angkutan jalan	1 kegiatan	Kota Malang		
			2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin					
						2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin					
			2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	0 -	2.15.02.2.08.02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor					
						2.15.02.2.08.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal					

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan operasi penertiban lalu lintas	48 Kali	Kota Malang	
							2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah pengawasan dan pembinaan pelaku usaha angkutan umum	1 kegiatan	Kota Malang	
			2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	0 -		2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan laporan hasil pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan lebaran	1 Kegiatan	Kota Malang	
			2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	0 -		2.15.02.2.11.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemantauan dan pelaksanaan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru	1 kegiatan	Kota Malang	
<b>2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>											
	<b>2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai survey kepuasan internal	80 -	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	1 dokumen	2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	3 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 dokumen		2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pencairan gaji dan tunjangan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang	



No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	1 dokumen	2.16.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang		
			2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian PD	1 dokumen	2.16.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	0 kali pelaksanaan	Semua Kab/Kota Kota Malang		
			2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	1 dokumen	2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	7 jenis	Kota Malang		
						2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor	30 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						2.16.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	0 jenis	Kota Malang		
						2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah keikutsertaan	2 keli keikutsertaan	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	5 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						2.16.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	50 kali	Semua Kab/Kota Kota Malang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	1 dokumen	2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	3 jenis	Kota Malang	
							2.16.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	5 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.16.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana	0 jenis	Kota Malang	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penunjang urusan Perangkat Daerah	1 dokumen	2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah luasan ruangan yang dibersihkan	14 ruangan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat Daerah	1 dokumen	2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	23 kendaraan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.16.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	4 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan ruangan yang dipelihara	7 ruangan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.16.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	10 jenis	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah/pemprov /pemda	71 %	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis Pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah/provinsi/kota; 2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah/prov/pemda sesuai dengan strakom; 3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strakom dan SOP yang ditetapkan	58 persen	2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen monitoring dan aspirasi publik	12 dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.16.02.2.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	3 dokumen laporan/tahun	Semua Kab/Kota	
							2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah jenis media	5 jenis		
							2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi publik yang tersampaikan kepada masyarakat	8 dokumen /tahun	Kota Malang	
							2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan	1 kali pelaksanaan	Kota Malang	
	<b>2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	Persentase aplikasi informasi yang terintegrasi	94.55 %	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 persen	2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sarana prasarana komunikasi dan informasi yang terhubung	836 koneksi	Kota Malang	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	90 OPD	2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola e-gov	1 kebijakan	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian	
					2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Prosentase database satuan kerja perangkat daerah yang dikelola pada pusat data pemerintah daerah	85 perangkat daerah		Kota Malang			
					2.16.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah sertifikat ISO sistem keamanan data dan informasi	150 infrastruktur		Kota Malang			
					2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	3 aplikasi		Kota Malang			
					2.16.03.2.02.08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah sarana prasarana penghubung layanan pemerintah	90 perangkat		Kota Malang			
					2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah aplikasi layanan publik terintegrasi	5 Aplikasi					
					2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta Sumber Daya TIK	500 orang					
<b>2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>												
	<b>2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai survey kepuasan internal	80 -	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	13 Dokumen		2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
								2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil survey kepuasan masyarakat	5 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan Keuangan	14 bulan		2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Diskopindag	261 orang	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	1 Dokumen		2.17.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/ dikembangkan kapasitasnya	300 orang		2.17.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas / pakaian khusus	0 stel	Kota Malang	
							2.17.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumberdaya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	300 orang	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, makanan dan minuman, alat tulis kantor, barang cetakan dan penagandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan perkiraan kegiatan peringatan/ kegiatan insidentil	45 kali		2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor	54 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan / kegiatan isidentil	2 kali	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	16 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	3 jenis surat kabar	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	45 kali	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan peralatan ,perlengkapan gedung kantor	11 Jenis		2.17.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan, perlengkapan gedung kantor	11 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik dst	12 bulan		2.17.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang teradministrasi dengan baik	2500 surat	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1182384 m2	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,pengadaan BBM dan pelumas	50 unit		2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	55 unit	Kota Malang	
							2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	6 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan gedung kantor yang dipelihara	630 m2	Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase koperasi aktif	52.7 %	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang akan dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi dalam rangka kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	172 koperasi	2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dimonitoring dan dievaluasi	70 peserta	Kota Malang	
							2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit koperasi yang difasilitasi pembentukan dan perubahannya	75 koperasi	Kota Malang	
	<b>2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	1.5 %	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dan pemberian Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi	494 koperasi	2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Koperasi yang dinilai sehat dan cukup sehat	120 koperasi	Kota Malang	
	<b>2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase SDM Koperasi yang dididik dan dilatih	62 %	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	839 koperasi	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi yang melakukan RAT setelah bimtek dan meningkat pemahamannya tentang perkoperasian dan terbentuknya koperasi	313 koperasi	Kota Malang	
	<b>2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	67.19 %	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	680 koperasi	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi perkoperasian dan jumlah pengurus koperasi yang mengikuti fasilitasi klinik koperasi,fasilitasi produk koperasi, akses permodalan	570 orang	Kota Malang	
	<b>2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Persentase WUB Mikro yang tumbuh	5.18 %	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para	Jumlah MOU ,UM yang memiliki ijin usaha dan yang difasilitasi pendampingan klinik	90 sertifikasi	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah database usaha mikro dan jumlah database yang dimutakhirkan	1 aplikasi	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Pemangku Kepentingan							
							2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang melakukan kerjasama atau temu bisnis	20 MoU	Kota Malang	
							2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	jumlah usaha mikro yang memiliki ijin sertifikasi dan mendapatkan perlindungan usaha jumlah usaha mikro yang memiliki ijin sertifikasi dan mendapatkan perlindungan usaha jumlah usaha mikro yang memiliki ijin sertifikasi dan mendapatkan perlindungan usaha	10 sertifikat halal 10 uji nutrisi 50 merk	Kota Malang	
							2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pendampingan dan pengembangan usaha	1605 UM	Kota Malang	
							2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah stakeholder yang mengikuti forum komunikasi	60 orang	Kota Malang	
	<b>2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang naik menjadi usaha kecil	3.5 %	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikroyang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan dan Jumlah usaha mikro yang menerapkan peningkatan mutu desain produk usaha dan manajemen keamanan pangan	230 UM	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan, menerapkan peningkatan mutu desain produk usaha dan manajemen keamanan pangan dan yang menerapkan pemasaran secara online dan offline	230 UM	Kota Malang	
<b>2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>											
	<b>2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Persentase realisasi penanaman modal	75 %	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal	1 dokumen	2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah perda/perwal yang disusun	1 dokumen	Kota Malang	
	<b>2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase peningkatan jumlah minat investor	50 %	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	2 kali	2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi Jumlah profil yang disusun	20 pelaku usaha 1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	



No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan							
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Daerah Kabupaten/Kota					Keikutsertaan dalam gelar pameran investasi	1 kali			
	<b>2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Penerbitan Ijin Dan Non Ijin Pekerjaan Umum	87.5 %	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan perizinan dan noperizinan pekerjaan umum sesuai standar	5000 izin	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosbud yang diterbitkan	5000 SK	Jumlah Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum yang diterbitkan	5000 SK	Kota Malang
							2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pengajuan ijin yang ditinjau	1100 berkas			Kota Malang
							2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	jumlah pengaduan yang ditangani	50 pengaduan			Kota Malang
	<b>2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM	75 %	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	23 perusahaan	2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Profil hasil pemantauan LKPM	20 proyek			Kota Malang
							2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta bimbingan teknis/ sosialisasi	50 orang			Kota Malang
							2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Penanaman Modal	30 kali	profil hasil pengawasan dan BAP	30 proyek	Kota Malang
	<b>2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	90 %	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kab/kota	75 %	2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi	1 aplikasi	Jumlah data yang diolah	5 fitur 8000 data	Kota Malang
	<b>2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>											

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi	4 dokumen	2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.19.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.19.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	3 dokumen	2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	78 ASN	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.19.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	3 laporan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	0 dokumen	2.19.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen aset	0 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang terfasilitasi	80 orang	2.19.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	80 orang	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi yang terpenuhi	5 administrasi	2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	Kota Malang	
							2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan insidentil yang terfasilitasi	2 kegiatan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	40 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
									Malang		
						2.19.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	4 bahan bacaan	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman Jumlah rapat koordinasi	81482 kotak 1609 kali	Semua Kab/Kota Kota Malang		
			2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	5 barang milik daerah	2.19.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional	0 unit	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						2.19.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	5 paket	Semua Kab/Kota Kota Malang		
			2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang	12 bulan	2.19.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	4500 surat	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah luasan yang dibersihkan	14400 m2	Semua Kab/Kota Kota Malang		
			2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terawat dengan baik	34 barang milik daerah	2.19.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terawat dengan baik Jumlah volume bbm dan pelumas	24 unit 14000 liter	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor	9 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	1 paket	Semua Kab/Kota Kota Malang	
	<b>2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan	1 %	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	99 pemuda	2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor yang terpilih	15 pemuda	Kota Malang	
							2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	411 pemuda	Kota Malang	
							2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda peserta keterampilan	70 pemuda	Kota Malang	
							2.19.02.2.01.04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah peserta sosialisasi	275 pemuda	Kota Malang	
							2.19.02.2.01.05 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD	Jumlah dokumen data potensi pemuda	1 dokumen	Kota Malang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Tingkat Kabupaten/Kota				
							2.19.02.2.01.06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah gedung kepemudaan	1 gedung	Kota Malang	
							2.19.02.2.01.07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah peserta festival	0 pemuda	Kota Malang	
							2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda terpilih	6 orang	Kota Malang	
							2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah paskibraka terpilih	78 paskibraka	Kota Malang	
			2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	24.001 %		2.19.02.2.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah dokumen	6 dokumen	Kota Malang	
							2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus OKP yang menjadi peserta	100 pemuda	Kota Malang	
	<b>2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga	0.15 %	2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	4 event	2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2 Kegiatan	Kota Malang	
							2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	Kota Malang	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat	Jumlah cabang yang dibina dan dikembangkan dalam bidang keolahragaan yang berprestasi	14 cabang olahraga	2.19.03.2.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Jumlah cabang olahraga	0 cabang olahraga	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
			Daerah Provinsi			Keolahragaan (Sport Science)					
						2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga Jumlah Olahraga Prestasi Yang Dibina	14 cabang olahraga 14 cabang olahraga	Kota Malang		
						2.19.03.2.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah dokumen data komunitas olahraga	0 dokumen	Kota Malang		
			2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	70 medali	2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	jumlah organisasi keolahragaan yang mendapat pembinaan	1 organisasi	Kota Malang		
			2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dikembangkan	4 paket	2.19.03.2.05.02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina	1 cabor	Kota Malang		
						2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga lapangan lainnya	1 Paket 1 Paket 2 paket	Kota Malang		
						2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah olahraga tradisional yang dibina	5 Jenis	Kota Malang		
	<b>2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	pertumbuhan anggota pramuka di Kota Malang	11.80 %	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota yang aktif dalam kegiatan kepramukaan	19.955 orang	2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah anggota yang mengikuti pembinaan	18.954 orang	Kota Malang	
<b>2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>											
	<b>2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase keterisian e-database SIPD	100 %	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 persen	2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Valid dan Realibel	65 persen	Kota Malang	
							2.20.02.2.01.02 Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang	Jumlah pelaksanaan pembinaan Jumlah tersedianya SDM di bidang Statistik yg berkualitas	1 kali 3 orang	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Terintegrasi				
							2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Meta Data	100 persen	Kota Malang	
							2.20.02.2.01.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan	100 orang	Kota Malang	
							2.20.02.2.01.05 Pengembangan Infrastruktur	Jumlah tersedianya peralatan infrastruktur	1 paket	Kota Malang	
							2.20.02.2.01.06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	pengembangan konten data dan informasi statistik	2 jenis	Kota Malang	
<b>2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>											
	<b>2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Tingkat keamanan informasi pemerintah	24 %	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	80 persen	2.21.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun	1 dokumen	Kota Malang	
							2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengkajian data	1 dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Prosentase SE yang menerapkan SMKI	60 persen	Kota Malang	
							2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	1 kali	Kota Malang	
				2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	45 persen	2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah insfrastruktur komunikasi yang mendukung JKS	1 kali	Kota Malang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
<b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>											
	<b>2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina	57 %	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kebudayaan masyarakat yang dikelola	50 Persen	2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah seniman yang mengikuti pembinaan SDM	150 Seniman	Semua Kab/Kota	
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kesenian Tradisional yang dikelola	100 Persen	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Budayawan yang mendapatkan perlindungan dan Pengembangan	150 Budayawan	Semua Kab/Kota	
							2.22.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pelaku Seni dan Budaya yang mendapatkan penghargaan	50 Pelaku Seni Budaya	Semua Kab/Kota	
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.22.02.2.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Situs bersejarah yang mendapatkan perlindungan dan Pengembangan	14 Jarahnitra	Kota Malang	
	<b>2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina	57 %	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Lembaga Kesenian Tradisional yang Dikelola	100 Persen	2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Seniman Tradisional yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	100 Seniman		
							2.22.03.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian yang Peningkatan Kapasitas Tata Kelola	10 Komunitas	Kota Malang	
	<b>2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina	57 %	2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Lembaga Sejarah Lokal yang dibina	100 Persen	2.22.04.2.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarawan yang mendapatkan Pengembangan SDM	50 Sejarawan	Kota Malang	
	<b>2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Prosentase Cagar Budaya yang Terlindungi	100 Persen	2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	35 BCB	Kota Malang	



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	Persentase kelestarian keanekaragaman dan kekayaan budaya yang dibina	57 %	2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan Museum	100 Persen	2.22.06.2.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah pengunjung yang memanfaatkan museum	3500 Pengunjung	Kota Malang	
							2.22.06.2.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Museum yang mendapatkan revitalisasi Sarana Prasarana Museum	10 Komunitas	Kota Malang	
	<b>2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>										
	<b>2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja, renstra, laporan capaian kinerja dan evaluasi kinerja	13 dokumen	2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun	3 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang dibuat	12 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 dokumen	2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.23.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah administrasi BMD	1 dokumen	2.23.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen aset yang terdata yang akan dihapus	1 dokumen	Kota Malang	
				2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan kegiatan pengembangan kapasitas SDA	3 orang	2.23.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	3 orang	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen listrik, ATK, kegiatan pawai, cetakan, peserta rapat/tamu dan rakor	5 subkegiatan	2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen listrik	16 jenis	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							2.23.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	71 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah karyawan yang mendapat tambahan nutrisi	77 orang	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	7 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	3500 kotak 30 kali	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	21 jenis		2.23.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan	20 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan PD	3 subkegiatan		2.23.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk	1300 surat	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telekomunikasi yang terbayar	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah hari melaksanakan kebersihan kantor	365 hari	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	5 kegiatan		2.23.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	15 unit	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							2.23.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebelair yang dipelihara	2 jenis	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										Kota Malang	
						2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	10 jenis		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara dan direhabilitasi	3 paket		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						2.23.01.2.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah luasan taman	100 m2		Kota Malang	
	<b>2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	Persentase peningkatan koleksi yang terdigitalisasi	17 %	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	4 subkegiatan	2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah pengembangan aplikasi perpustakaan	1 menu aplikasi	Kota Malang	
						2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akreditasi perpustakaan Jumlah lokasi perpustakaan keliling yang dilayani Jumlah TPOK	1 akreditasi 150 lokasi 14 orang		Kota Malang	
						2.23.02.2.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koleksi Perpustakaan Berdasarkan Kekhasan Daerah	200 eksemplar			
						2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina untuk mengikuti akreditasi perpustakaan	178 perpustakaan		Kota Malang	
						2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kajian Jumlah perpustakaan khusus yang dibina	1 kajian 279 perpustakaan		Kota Malang	
						2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Kabupaten/Kota				
							2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota			Kota Malang	
							2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang diadakan Jumlah TPOK	2300 eksemplar 1 orang	Kota Malang	
							2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang diolah dan preservasi Jumlah TPOK	12200 eksemplar 1 orang	Kota Malang	
							2.23.02.2.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang didata	251 perpustakaan	Kota Malang	
			2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat gemar membaca di masyarakat	10 kegiatan		2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lomba dilaksanakan Jumlah pameran yang dilaksanakan Jumlah seminar dilaksanakan Jumlah workshop dilaksanakan	2 kali 1 kali 1 kali 2 kali	Kota Malang	
							2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Sarana perpustakaan di tempat umum yang dipelihara	1 pemeliharaan	Kota Malang	
							2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta lomba	50 peserta	Kota Malang	
							2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah peserta workshop literasi	100 peserta	Kota Malang	
							2.23.02.2.02.05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pemilihan duta baca	100 peserta	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
	<b>2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	5 %	2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media(digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	12 naskah	2.23.03.2.01.01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah pemilik naskah kuno di Kota Malang	2 orang	Kota Malang	
							2.23.03.2.01.02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang dialihmediakan	10 naskah		
				2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar	200 eksemplar	2.23.03.2.02.01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar	1 sosialisasi		
							2.23.03.2.02.02 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diolah dan disiangi	200 eksemplar		
<b>2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>											
	<b>2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %	2.24.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	21 jenis	2.24.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dibangun	1 gedung	Kota Malang	
	<b>2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	Persentase peningkatan dokumen arsip yang terkelola sesuai kaidah kearsipan	40 %	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD/Kelurahan yang sudah menerapkan pengelolaan arsip sesuai kaidah kearsipan	41 OPD/Kelurahan	2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Ranperwal yang disusun	3 Ranperwal	Kota Malang	
							2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip yang dipelihara	36000 arsip	Kota Malang	
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang terselamatkan	400 data/NA	2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip yang terselamatkan	0 data/NA	Kota Malang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah penambahan database online	100 database	2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah penambahan database online	100 database	Kota Malang	
<b>3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>											
	<b>3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Persentase peningkatan produksi perikanan	2.50 %	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah total produksi perikanan (budidaya)	139.94 ton	3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta	257 orang	Kota Malang	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih budidaya air tawar yang di produksi	243.02 ton	3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pembenihan ikan	6 jenis sarpras	Kota Malang	
	<b>3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Persentase peningkatan produksi perikanan	2.50 %	3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolah dan pemasar ikan skala mikro dan kecil yang menerima peningkatan kapasitas	50 peserta	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peserta	170 peserta	Semua Kab/Kota	
<b>3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>											
	<b>3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Persentase Destinasi Wisata Yang Dibina	60 %	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian	1 dokumen	3.26.02.2.01.04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian	1 dokumen	Kota Malang	
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	42 fasilitas	3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pedagang wisata belanja tugu dan pedagang night market yang dibina	674 pedagang	Kota Malang	
							3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana	1 paket		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku yang mendapatkan pelatihan Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam event pariwisata	100 pelaku 288 peserta	Kota Malang	
							3.26.02.2.03.07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta sosialisasi dan peserta bazar	135 peserta	Kota Malang	
			3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten / kota	2040 TDUP		3.26.02.2.04.03 Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sosialisasi	85 pelaku	Kota Malang	
	<b>3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Persentase Pemasaran Pariwisata	52 %	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berpartisipasi pada event pariwisata	4 peserta	3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pameran dan bazar	4 peserta		
	<b>3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada 7 subsektor yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI	14 %	3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta sosialisasi	50 peserta	3.26.04.2.02.08 Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang siap mengikuti sertifikasi HKI	50 pelaku ekraf	Kota Malang	
	<b>3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Persentase pengembangan ekonomi kreatif	40 %	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina	580 pelaku	3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah duta wisata yang dipilih dan diberdayakan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti event pariwisata	20 duta wisata 170 pelaku	Kota Malang	
							3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekraf yang terwadahi dan terbina dipromosi dan eksebis Jumlah peserta pelaku kreatif yang dibina	420 pelaku 110 pelaku	Kota Malang	
							3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta pelaku kreatif yang dibina dan diperdayakan	0 pelaku	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
<b>3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>											
	<b>3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Jumlah produksi pertanian	64169,49 ton	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah jenis sarana pertanian yang diberikan	4 jenis	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah jenis alat dan mesin pertanian	2 jenis	Kota Malang	
							3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah jenis bantuan	2 jenis	Kota Malang	
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerapan teknologi peternakan	1 teknologi	3.27.02.2.05.05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pelayanan inseminasi buatan	205 pelayanan	Kota Malang	
	<b>3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Persentase Prasarana Pertanian dalam kondisi baik	81 %	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian dalam kondisi baik	1 angka	3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah luas lahan	23.49 Ha	Kota Malang	
	<b>3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	2 %	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	2 %	3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	jumlah hewan besar dan kecil yang diperiksa	1400 ekor	Kota Malang	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pengawasan peredaran produk hewan	1785 pengawasan	3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	jumlah peserta	50 orang	Kota Malang	
							3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah contoh pangan asal hewan yang diperiksa	1785 contoh bahan	Kota Malang	



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Kenaikan Skor Kelompok Tani	950 -	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	30 penyuluh	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah dokumen	6 dokumen	Kota Malang	
							3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Poktan/Gapoktan yang mendapatkan peningkatan kemampuan	41 Poktan	Kota Malang	
<b>3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>											
	<b>3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	Persentase peningkatan fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100 %	3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	5 kali	3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	5 kali	Kota Malang	
				3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	jumlah penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri	139 UKM	3.30.02.2.03.01 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah UKM yang mengikuti sosialisasi perijinan STPW	120 UKM	Kota Malang	
				3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	jumlah pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol	5 kali	3.30.02.2.05.01 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol	5 kali	Kota Malang	
	<b>3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Persentase penetapan pasar rakyat sebagai pasar halal	- %	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang bersih dan layak	9 pasar	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang terpelihara	2 pasar	Semua Kab/Kota	
		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	1.5 %		Jumlah pasar yang di revitalisasi	6 pasar					
							3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional	12 jenis	Kota Malang	
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah peserta Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	220 pedagang	3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah peserta bimtek ekspor bagi UKM	80 UKM	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan pasar rakyat sesuai SNI	80 orang	Semua Kab/Kota	
	<b>3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	1.5 %	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	365 hari	3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya berbasis online Jumlah pemantauan ketersediaan/distribusi bahan pokok dan bahan penting lainnya Jumlah penayangan informasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya di media Jumlah penayangan informasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya di media	365 hari 2 kali 65 kali(running text) 90 kali	Kota Malang	
							3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan pasar murah	1 kali	Kota Malang	
	<b>3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	1.5 %	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pengawasan alat UTPP	10 Lokasi	3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UTPP yang ditera/tera ulang Jumlah Pengawasan Jumlah peserta penyuluhan kemetrologian	13400 UTPP 22 kali 32 peserta	Kota Malang	
							3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah peserta penyuluhan kemetrologian umlah pelaksanaan pengawasan ulang barang non BDKT	400 orang 20 kali	Kota Malang	
	<b>3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	1.5 %	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UKM yang terfasilitasi	20 UKM	3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UKM yang mengikuti pameran	20 UKM	Kota Malang	
							3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah ranperwal tentang Sistem Informasi Menejemen Pasar Jumlah ranperwal tentang Sistem Informasi Menejemen Retribusi	1 NA 1 NA	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
<b>3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>											
	<b>3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	1.5 %	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan	0 -	3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam Jumlah sasaran pembangunan sumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dan jaminan ketersediaan sumber daya alam	4 dokumen	Kota Malang	
							3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah penerima fasilitasi standarisasi dan pengembangan perwilayahan industri	70 IKM	Kota Malang	
							3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil dan menengah	700 IKM	Kota Malang	
							3.31.02.2.01.06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi rencana pembangunan industri Kota Malang	1 dokumen	Kota Malang	
	<b>3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	1.5 %	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	0 -	3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin usaha IKM yang dipantau dan diawasi	100 IKM	Kota Malang	
	<b>3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	Persentase peningkatan fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100 %	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi industri yang dimutakhirkan	1 sistem	3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri	jumlah sistem informasi yang terintegrasi	1 sistem data	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Nasional (SIINas)				
							3.31.04.2.01.02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah dokumen hasil pemetaan IHT 1 dokumen		Kota Malang	
							3.31.04.2.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah mesin pelinting rokok yang diawasi 40 mesin		Kota Malang	
<b>4.01 SEKRETARIAT DAERAH</b>											
	<b>4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	- Nilai 100 %	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja setda 2 dokumen Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan 100 Persen		4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Setda 2 dokumen		Semua Kab/Kota Kota Malang	
							4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen 1 dokumen		Semua Kab/Kota Kota Malang	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu 100 persen		4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah 12 dokumen		Semua Kab/Kota Kota Malang	
							4.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun 1 dokumen		Semua Kab/Kota Kota Malang	
				4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir 100 persen		4.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun 1 dokumen		Kota Malang	
							4.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah pengamanan barang milik daerah pada lingkungan Sekretariat Daerah 27 unit		Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						4.01.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah yang disusun	1 dokumen	Kota Malang		
						4.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah yang disusun	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang		
			4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 persen	4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (pakaian olahraga)	7000 stel	Kota Malang		
						4.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	150 orang	Semua Kab/Kota Kota Malang		
			4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	80 persen	4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	35 jenis	Kota Malang		
						4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	100 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	48 jenis	Kota Malang		
						4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	10 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	10 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						4.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan bahan/material	10 jenis	Kota Malang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan mamin rapat dan mamin tamu dinas	700 kegiatan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	250 kali	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	80 persen		4.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 unit	Kota Malang	
							4.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	1 unit	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	15 jenis	Kota Malang	
							4.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 gedung/bangunan	Kota Malang	
							4.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	20 jenis	Kota Malang	
							4.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	10 jenis	Kota Malang	
			4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100 persen		4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	14500 surat	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	500 kegiatan	Kota Malang	
							4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum pada Sekretariat Daerah	10 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80 persen		4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	3 unit	Kota Malang	
							4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan	60 unit	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							4.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	10 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							4.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya	5 jenis	Kota Malang	
							4.01.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pemeliharaan aset tak berwujud	3 jenis	Kota Malang	
							4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9 gedung/bangunan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							4.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	14 jenis	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							4.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	15 jenis	Kota Malang	
			4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi layanan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan	2 jenis layanan		4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 dokumen	Kota Malang	
							4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dokumen penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30 dokumen	Kota Malang	
			4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah fasilitasi layanan kerumahtanggaan kepala daerah, wakil kepala daerah dan Sekretariat Daerah sesuai ketentuan	50 jenis layanan		4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi layanan kerumahtanggaan kepala daerah	20 jenis	Kota Malang	
							4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi layanan kerumahtanggaan wakil kepala daerah	20 jenis	Kota Malang	
							4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	10 jenis	Kota Malang	
			4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Nilai Hasil Survei Internal Organisasi	2.2 angka		4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen hasil monev tusi perangkat daerah Jumlah dokumen kebijakan bidang kelembagaan Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan	4 ranperwal 1 dokumen 1 dokumen	Kota Malang	
							4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik Jumlah kebijakan bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik	2 dokumen 5 ranperwal	Kota Malang	



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Hasil Monev RB Jumlah dokumen Monev SPIP Sekretariat Daerah Jumlah dokumen pengembangan kinerja dan RB	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Kota Malang		
						4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen Monev Pelayanan Publik	3 dokumen	Kota Malang		
						4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang	1 dokumen	Kota Malang		
			4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	4 layanan	4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah layanan keprotokolan	600 layanan	Kota Malang		
						4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah layanan kehumasan Jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan	3 layanan 650 kali	Kota Malang		
						4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah dokumentasi kebijakan	4 dokumen	Kota Malang		
	<b>4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan	24 dokumen	4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi walikota, wakil walikota, anggota DPRD Jumlah laporan hari jadi daerah yang difasilitasi	5 dokumen 2 laporan	Kota Malang		
						4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen batas daerah Jumlah dokumen pembakuan dan penamaan rupabumi jumlah dokumen pengembangan kapasitas LK Jumlah dokumen penguatan kelembagaan kecamatan	2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Kota Malang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen LKPJ Jumlah dokumen LPPD jumlah dokumen SPM Jumlah kegiatan otoda	1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 2 kegiatan	Kota Malang	
			4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	18 Fasilitasi		4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	Kota Malang	
							4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Kebijakan Kesejahteraan Sosial	4 Dokumen	Kota Malang	
							4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	6 Dokumen	Kota Malang	
			4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	500 kali		4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen usulan program pembentukan Perda dari Pemkot Malang Jumlah peserta Bimtek Legal Drafting Jumlah produk hukum yang disusun Jumlah rancangan produk hukum yang difasilitasi	1 dokumen 80 Orang 1 dokumen 590 dokumen	Kota Malang	
							4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah dokumen hasil fasilitasi permasalahan hukum Jumlah dokumen laporan fasilitasi Jumlah peserta bimbingan teknis Jumlah sidang penegakan hukum daerah Jumlah sidang perkara di Badan Peradilan	1 dokumen 2 dokumen 65 peserta 11 sidang 150 sidang	Kota Malang	
							4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah buku himpunan perda yang dicetak Jumlah peserta pembinaan kadarkum Jumlah peserta penyampaian informasi perda	5000 buku 300 Orang 500 Orang	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
								Jumlah peserta Penyuluhan Hukum 500 Orang Jumlah produk hukum yang didigitalisasi 4 dokumen Jumlah rekomendasi perubahan perda dan perwal 10 Produk hukum			
			4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen kerja sama daerah 16 dokumen	4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	jumlah dokumen 20 dokumen			Kota Malang		
	<b>4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Persentase kebijakan bidang perekonomian, Infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti 100 %	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen pengembangan kebijakan bidang perekonomian 2 dokumen	4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen 1 dokumen			Kota Malang		
					4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen 2 dokumen			Kota Malang		
			4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program PI yang difasilitasi 1 dokumen	4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen 1 dokumen			Kota Malang		
			4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan 100 persen	4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil proses pengadaan barang/jasa 200 dokumen			Kota Malang		
					4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik 508 layanan			Kota Malang		
					4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa 258 layanan			Kota Malang		
			4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program SDA 1 dokumen	4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen 1 dokumen			Kota Malang		
	<b>4.02 SEKRETARIAT DPRD</b>										
	<b>4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu 100 %	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan 85 persen	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Renja/Renja Perubahan, dokumen Renstra, RKA/PRKA, DPA/DPPA 7 dokumen			Semua Kab/Kota Kota Malang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen SAKIP/LAKIP, LPPD, LKT, PK/PK Perubahan	5 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentaase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	90 persen		4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah penyediaann gaji dan tunjangan ASN	12 kali	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen laporan akhir tahun SKPD	3 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							4.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan	2 dokumen	Kota Malang	
			4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase barang milik daerah yang terinventarisir	60 persen		4.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah pengamanan barang milik daerah SKPD	1 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	90 persen		4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor	96 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah bagian peralatan rumah tangga	2 jenis	Kota Malang	
							4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik yang tersedia	8 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	5 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah jenis rapat dan koordinasi yang dilaksanakan	11 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	70 persen	4.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	10 unit	Kota Malang		
			4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	90 persen	4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pelayanan umum kantor	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang		
			4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang terpelihara	80 persen	4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jkendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	28 jenis	Kota Malang		
						4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah jenis pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	15 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang		
			4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	persentase pelayanan administrasi yang tepat waktu	90 persen	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	12 kali	Kota Malang		
						4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD	135 stel	Kota Malang		
						4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah peserta medical cek up DPRD	45 orang	Kota Malang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
			4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	jumlah pelayanan administrasi yang tepat waktu	27 jenis	4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	jumlah jenis kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	27 jenis	Kota Malang		
	<b>4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Persentase pelaksanaan pembahasan Ranperda	100 %	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah pemenuhan kelengkapan administrasi	21 keputusan	4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	jumlah dokumen program pembentukan peraturan daerah	2 keputusan	Kota Malang	
						4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	jumlah dokumen rancangan peraturan daerah	12 keputusan	Kota Malang		
						4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	jumlah dokumen Penjelasan/Keterangan dan/atau naskah akademik	4 keputusan	Kota Malang		
			4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah ketepatan jadwal pembahasan anggaran	6 keputusan	4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	jumlah dokumen KUA dan PPAS	1 keputusan	Kota Malang		
						4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS	1 keputusan	Kota Malang		
						4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	jumlah dokumen APBD	1 keputusan	Kota Malang		
						4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	jumlah dokumen APBD perubahan	1 keputusan	Kota Malang		
						4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester	jumlah dokumen laporan semester	1 keputusan	Kota Malang		
						4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	jumlah dokumen pertanggungjawaban APBD	1 keputusan	Kota Malang		
			4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	persentase pelaksanaan penyelenggaraan tepat waktu	40 rekomendasi	4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	3 rekomendasi	Kota Malang		
						4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	3 rekomendasi	Kota Malang		
						4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	3 rekomendasi	Kota Malang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	3 rekomendasi	Kota Malang	
							4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah dokumen Laporan Pertanggungjawaban kepala Daerah	1 dokumen		
			4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	persentase kapasitas DPRD	95 persen		4.02.02.2.04.02 Bimbingan Teknis DPRD	jumlah peserta bimbingan teknis DPRD	213 orang	Kota Malang	
							4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	jumlah jenis publikasi dan dokumentasi Dewan	7 jenis	Kota Malang	
							4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	jumlah kelompok pakar dan tim ahli	9 orang	Kota Malang	
							4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	jumlah tenaga ahli fraksi	6 orang	Kota Malang	
							4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	jumlah jenis pelaksanaan hubungan masyarakat	3 jenis	Kota Malang	
			4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	jumlah penghimpunan aspirasi	3 kali		4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	jumlah reses	3 kali	Kota Malang	
			4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	jumlah penyusunan dan pembahasan kode etik DPRD	2 jenis		4.02.02.2.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD	jumlah penyusunan kode etik DPRD	1 kali	Kota Malang	
			4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah pelaksanaan administrasi fasilitasi tugas DPRD	603 kali		4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	468 kali	Kota Malang	
							4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	jumlah dokumen laporan kinerja DPRD	1 keputusan	Kota Malang	
							4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah pelaksanaan badan musyawarah	1 kali	Kota Malang	
							4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	jumlah fasilitasi tugas pimpinan DPRD	134 kali	Kota Malang	
<b>5.01 PERENCANAAN</b>											

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penanggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Renstra dan Renja	4 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan	1250 SPM	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan	5 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100 %	5.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	26 kendaraan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah	6 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %	5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	47 orang	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100 %	5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 jenis	Kota Malang	



No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							Kantor				
							5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat tulis kantor	79 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah makanan dan minuman jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	9781 kotak 51 kali	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100 %		5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor	43 buah	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100 %		5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpn, Air dan Listrik Jumlah publikasi dan informasi perencanaan pembangunan	12 bulan 250 publikasi	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %		5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara jumlah/volume bbm dan pelumas	26 kendaraan 6194 liter	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	72 buah	Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara 2 ruangan		Semua Kab/Kota Kota Malang	
	<b>5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100 %	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan	3 dokumen	5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisa Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	Kota Malang	
							5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah peserta Pelaksanaan Konsultasi Publik	225 orang	Kota Malang	
							5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	225 orang	Kota Malang	
							5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPD Jumlah Dokumen RPJMD	2 dokumen 0 dokumen	Kota Malang	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan	37 jenis data	5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah tahapan pemantauan/pemutakhiran SIPD	4 tahapan	Kota Malang	
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat capaian kinerja output perangkat daerah dengan kriteria sangat tinggi	80 %	5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi	32 dokumen	Kota Malang	
	<b>5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase Penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan tahapan dan tata cara.	100 %	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase rekomendasi pengendalian dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Renstra dan Renja) yang ditindaklanjuti	100 %	5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat yang diverifikasi Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema	35 dokumen 4 musrenbang	Kota Malang	
							5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Subbidang Perencanaan Pemerintahan yang	25 dokumen	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Pemerintahan	diverifikasi			
							5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	3 dokumen	Kota Malang	
							5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia yang diverifikasi	10 dokumen	Kota Malang	
							5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia	1 dokumen	Kota Malang	
			5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase rekomendasi pengendalian dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Renstra dan Renja) yang ditindaklanjuti	100 %		5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Subbidang Perencanaan Penanaman Modal Pariwisata yang diverifikasi Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema	10 dokumen 1 musrenbang	Kota Malang	
							5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Subbidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan yang diverifikasi	15 dokumen	Kota Malang	
							5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Subbidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan	1 dokumen	Kota Malang	
							5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema	1 musrenbang	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema	1 rakortek		
						5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam yang diverifikasi	10 dokumen		Kota Malang	
						5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema	1 Rakortek		Kota Malang	
			5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase rekomendasi pengendalian dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Renstra dan Renja) yang ditindaklanjuti	100 %	5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Subbidang Perencanaan Perhubungan dan Komunikasi Informatika yang diverifikasi Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema	10 Dokumen 1 Rakortek		Kota Malang	
						5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Subbidang Perencanaan Infrastruktur yang diverifikasi	5 Dokumen		Kota Malang	
						5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Subbidang Perencanaan Infrastruktur	7 Dokumen		Kota Malang	
						5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah pelaksanaan musrenbang/Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema	1 Rakortek		Kota Malang	
						5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Subbidang Perencanaan Kewilayahan yang	25 Dokumen		Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							Kewilayahan	diverifikasi			
							5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Subbidang Perencanaan Kewilayahan	1 dokumen	Kota Malang	
							5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah pelaksanaan musrenbang/ Rapat Koordinasi Teknis sesuai tema	1 Rakortek	Kota Malang	
<b>5.02 KEUANGAN</b>											
	<b>5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	7 Dokumen 100 %	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Renstra dan dokumen Renja yang disusun	6 Dokumen 2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	8 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen 4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	161 Dokumen 100 %	5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	75 Pegawai 12 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan	500 SPM	Semua Kab/Kota Kota Malang	



No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	9 Kali 1 kali	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan	6 jenis 15 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 surat kabar 9 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	12 Kali	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	24 Kali 120 kali	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan gedung kantor Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor	10 Jenis 100 %	5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	6 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor	2 jenis 15 Jenis	Kota Malang	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah surat	5000 Surat	5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	5000 Surat	Semua Kab/Kota Kota	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan							
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %			Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	39000 surat	Malang		
									5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan pembayaran belanja telepon dan internet Jumlah bulan pembayaran pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
									5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	Kota Malang	
									5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan Luasan ruangan yang dibersihkan	850 m2 1180 m2	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	11 Jenis 100 %			5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	38 unit 71 Unit	Semua Kab/Kota Kota Malang	
									5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	9 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
	<b>5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100 %	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100 %		5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen		Kota Malang	
								5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen		Kota Malang	
								5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi	132 SKPD		Kota Malang	



No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi	132 SKPD	Kota Malang	
							5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Ranperda yang tersusun Jumlah Ranperwal yang tersusun	1 Ranperda 1 Ranperwal	Kota Malang	
							5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Ranperda yang tersusun Jumlah Ranperwal yang tersusun	1 Ranperda 1 Ranperwal	Kota Malang	
							5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Ranperwal yang tersusun	6 Ranperwal	Kota Malang	
							5.02.02.2.01.13 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan	132 orang	Kota Malang	
			5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		persentase kesesuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen laporan hasil penatausahaan keuangan	12 dokumen	Kota Malang	
							5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen arsip Perangkat Daerah yang tertata	28000 dokumen	Kota Malang	
							5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Ranperwal yang tersusun	1 Ranperwal	Kota Malang	
							5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan	190 orang	Kota Malang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase L/K SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 100 %		5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen laporan yang tersusun	7 dokumen	Kota Malang	
							5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Ranperda yang tersusun Jumlah Ranperwal yang tersusun	1 Ranperda 1 Ranperwal	Kota Malang	
							5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen yang tersusun	4 dokumen	Kota Malang	
							5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Ranperwal yang tersusun	1 Ranperwal	Kota Malang	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak 100 %		5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah kali pendanaan darurat dan mendesak	5 kali	Kota Malang	
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	persentase ketersediaan data dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 100 %		5.02.02.2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sistem Informasi yang dipelihara	1 sistem informasi	Kota Malang	
							5.02.02.2.05.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat pembinaan	132 SKPD	Kota Malang	
	<b>5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD 0,9 %		5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD berupa Tanah yang telah bersertifikat 12,68 %		5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah ranperwal yang tersusun	1 ranperwal	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah ranperwal yang tersusun	1 ranperwal	Kota Malang		
						5.02.03.2.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen	Kota Malang		
						5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen laporan Barang Milik Daerah	12 dokumen	Kota Malang		
						5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah obyek aset dan barang milik daerah yang terinventarisasi	180 obyek	Kota Malang		
						5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengakuan aset tanah Jumlah papan himbauan/patok yang terpasang Jumlah Sertifikat	100 dokumen 140 papan 2500 sertifikat	Kota Malang		
						5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	jumlah dokumen hasil penilaian BMD	10 dokumen	Kota Malang		
						5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen laporan yang tersusun	5 dokumen	Kota Malang		
						5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Ijin yang diterbitkan	150 ijin	Kota Malang		
						5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah entitas peserta rekonsiliasi	136 entitas	Kota Malang		
						5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan BMD	2 dokumen	Kota Malang		
						5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah entitas yang mendapat pembinaan	132 entitas	Kota Malang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
	<b>5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	83,44 %	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jenis Pajak Daerah Yang Dikelola	9 Jenis Pajak Daerah	5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pengembangan Daerah serta Dokumen Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	Kota Malang	
							5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang tersosialisasi	80000 WP	Semua Kab/Kota	
							5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan pajak Daerah yang Terintegrasi dan Terpelihara	4 Aplikasi	Semua Kab/Kota	
							5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	0 0		
							5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1. Jumlah Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah I 2. Jumlah pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah II	321508 Berkas	Semua Kab/Kota	
							5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah				
							5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				
							5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah penurunan piutang Pajak Daerah Jumlah piutang yang tertagih	32000000000 Rupiah 2085 WP	Semua Kab/Kota	
							5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah keberatan dan sengketa yang terselesaikan/diproses	900 WP	Semua Kab/Kota	
							5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang diperiksa dan dilakukan pengawasan	1200 wajib pajak	Semua Kab/Kota	
							5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan dan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>5.03 KEPEGAWAIAN</b>										
	<b>5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penanggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	5 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	3 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	49 orang	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan	500 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	3 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100 %	5.03.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	3 unit	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %	5.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	46 orang		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100 %	5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor	4084 buah		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental	1 kali		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5863 rim/dos		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	544 buah		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 kali		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100 %	5.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	1 unit		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan	15 unit		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100 %	5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar	4000 surat		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik	12 bulan		Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							5.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan sewa peralatan kantor	12 bulan	Kota Malang	
							5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan pelayanan umum	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %		5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	18 unit	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	127 unit	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan gedung	1 gedung	Semua Kab/Kota Kota Malang	
	<b>5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Persentase terisinya jab struktural dan pelaksana	62 %	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pengadaan dan pemberhentian pegawai	974 ORANG	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen rencana kebutuhan ASN	1 dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.03.02.2.01.04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumla ASN yg diterima	425 orang	Semua Kab/Kota	
							5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Pensiun dan MPP	549 orang	Semua Kab/Kota	
							5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah peserta fasilitasi profesi	200 orang	Semua Kab/Kota	
							5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah update data	9400 data	Semua Kab/Kota	
			5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah mutasi kepegawaian	974 dokumen		5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah kenaikan pangkat tepat waktu	1000 orang	Semua Kab/Kota	
							5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah SPMT	500 dokumen	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang dipetakan berdasarkan dengan kompetensinya, Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi	1498 orang	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Peserta Ujian KPPI dan Ujian Dinas	80 orang	Semua Kab/Kota	
							5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah peserta assesment	456 orang	Semua Kab/Kota	
							5.03.02.2.03.07 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah peserta evaluasi diklat	110 orang	Semua Kab/Kota	
							5.03.02.2.03.10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah peserta JF	16 orang	Semua Kab/Kota	
							5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah peserta sosialisasi Jabatan fungsional	100 orang	Semua Kab/Kota	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dievaluasi	6600 orang	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Peserta Sosialisasi Penilaian Evaluasi kinerja aparatur	125 orang	Semua Kab/Kota	
							5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti evaluasi hasil penilaian kinerja	125 orang	Semua Kab/Kota	
							5.03.02.2.04.06 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah kajian	1 dokumen		
							5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN terfasilitasi disiplin	6600 orang	Semua Kab/Kota	
<b>5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>											
	<b>5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	74,86 %	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar	74 orang%	5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta diklat teknis & fungsional	273 orang	Semua Kab/Kota	



No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
			5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah peserta diklat Diklat PIM IV, PIM III, PIM II, prajab	Jumlah Peserta 55 orang	5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta Diklat PIM IV, PIM III, PIM II, prajab	55 orang	Semua Kab/Kota Kota Malang		
<b>5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>											
	<b>5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase implementasi rencana kelitbangan	70 %	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	1 dokumen	5.05.02.2.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah	1 dokumen	Kota Malang	
				5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	1 dokumen	5.05.02.2.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	1 dokumen	Kota Malang	
				5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3 dokumen	5.05.02.2.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2 dokumen	Kota Malang	
							5.05.02.2.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 dokumen	Kota Malang	
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2 dokumen	5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang inovasi	1 dokumen	Kota Malang	
							5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah dokumen publikasi/ sosialisasi/ fasilitasi/ pendampingan hasil penelitian dan pengembangan	2 jurnal penelitian	Kota Malang	
<b>6.01 INSPEKTORAT DAERAH</b>											

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan/ penganggaran/ kinerja	3 dokumen	6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen kinerja	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen keuangan	2 dokumen	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							6.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	jumlah laporan	2 laporan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah dokumen kepegawaian	2 dokumen	6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah laporan penilaian angka kredit	2 laporan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah peserta diklat	30 orang	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah layanan administrasi umum yang dilaksanakan	6 layanan	6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor	20 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah bahan cetak dan penggandaan	4 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan	36 ekslembar	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah kunjungan tamu	55 kunjungan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah pelaksanaan rapat	110 rapat	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa penunjang yang dilaksanakan	3 layanan		6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah alat tulis kantor	20 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyediaan layanan komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah penyediaan layanan kebersihan kantor	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	50 unit		6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	14 unit	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	36 unit	Semua Kab/Kota Kota Malang	
	<b>6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Persentase PD yang menindaklanjuti temuan pengawasan	- %	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah pengawasan internal yang diselenggarakan	5 jenis	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan	10 laporan		
							6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	jumlah laporan	1 laporan	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	jumlah laporan	1 laporan	Semua Kab/Kota	
							6.01.02.2.01.06 Kerjasama Pengawasan Internal	jumlah kerjasama	1 kerjasama	Semua Kab/Kota	
							6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	jumlah laporan	2 laporan	Semua Kab/Kota	
			6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang diselenggarakan	2 jenis		6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	jumlah penyelesaian kerugian daerah/ negara	6 peristiwa	Semua Kab/Kota	
							6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jumlah laporan	34 laporan	Kota Malang	
	<b>6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Cakupan kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	100 %	6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan	3 kebijakan	6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	jumlah dokumen	9 dokumen	Semua Kab/Kota	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	jumlah pendampingan dan asistensi	3 jenis	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah perangkat daerah yang dievaluasi	8 Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota	
							6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	jumlah koordinasi pemberantasan korupsi	2 jenis	Semua Kab/Kota	
							6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	jumlah perangkat daerah yang didampingi	1 perangkat daerah	Semua Kab/Kota	
	<b>7.01 KECAMATAN</b>										
	<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monografi, Profil Kecamatan, Pembuatan / Pengembangan / Updating Sistem Informasi / Data Base Informasi Pembangunan, RKA/DPA, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP, SKM,	10 Dokumen	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja/RKT Jumlah dokumen Renja/RKT Jumlah dokumen Renja/RKT Jumlah dokumen Renja/RKT, dan Renatra	2 Dokumen 2 dokumen 2 Dokumen 3 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
				Standart Pelayanan Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	18 Dokumen 2 Laporan 5 Dokumrn 9 dokumen			Jumlah dokumen Renja/RKT dan Renstra Jumlah dokumen Renstra Jumlah dokumen Renstra Jumlah Dokumen Renstra	4 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		
						7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	2 dokumen 4 dokumen 4 Dokumen	Kota Malang		
						7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	2 dokumen 4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	3 dokumen 1 Dokumen 4 dokumen 7 Dokumen 9 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Jumlah dokumen hasil survei kepuasan Jumlah dokumen evaluasimasyarakat Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	2 dokumen 3 Dokumen 2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
								Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	2 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	2 Dokumen		
								Jumlah dokumen standar pelayanan	2 dokumen		
								Jumlah dokumen standar pelayanan	2 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Standar Pelayanan	1 Dokumen		
								Jumlah ZI	80 %		
			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan (Lap bulanan, Lap semesteran, lap akhir tahun) "Jumlah dokumen laporan keuangan dan capaian kinerja yang disusun tepat waktu" Jumlah dokumen laporan keuangan dan capaian kinerja yang disusun tepat waktu Jumlah dokumen laporan keuangan dan capaian kinerja yang disusun tepat waktu	131 Orang 2 Dokumen 16 dokumen 4 Dokumen 12 Dokumen	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Jumlah ASN Jumlah ASN Jumlah ASN Jumlah ASN	128 Orang 134 Orang 142 orang 147 Orang 150 Orang ASN		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan Jumlah laporan keuangan	2 dokumen 4 Dokumen 17 Laporan 4 dokumen		Semua Kab/Kota Kota Malang	
						7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	2 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah petugas pengamanan kantor	2 Orang	7.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah petugas pengamanan kantor	2 orang		Semua Kab/Kota Kota Malang	
			7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan "Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur"	1 Kegiatan 1 kegiatan	7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/ dikembangkan kapasitasnya	60 Orang		Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
				Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan ketrampilan dan kemampuan teknis aparatur Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	25 ASN 1 Kegiatan 20 ASN		Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya Jumlah sumber daya aparatur yang ditngkatkan/dikembangkan kappasitasnya	50 Orang 134 ASN 50 orang 75 orang			
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah Jumlah bulan terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah Jumlah kegiatan administrasi umum Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Jumlah Alat Tulis Kantor, Jumlah barang cetakan dan penggandaan, Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Jumlah layanan administrasi umum	12 bulan 12 Bulan 7 Kegiatan 2 Jenis 12 Bulan	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/enerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangn bangunan kantor	8 jenis 4 Jenis 6 Jenis 10 Jenis 10 jenis	Kota Malang		
						7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah peralatan gedung	36 Jenis 46 jenis 46 Jenis 63 Jenis 50 jenis 6 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	10 Jenis	Kota Malang		
						7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor Jumlah fasilitasi kegiatan insidentil yang diselenggarakan kegiatan insidentil	9 Jenis 2 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang		

No	Program			Kegiatan		Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah makanan dan minuman	6 Jenis			
							Jumlah makanan dan minuman	1327 kotak			
							Jumlah makanan dan minuman	3800 Kotak			
							Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidental	3 kegiatan			
						7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis		Semua Kab/Kota Kota Malang	
							Jumlah barang cetakan dan penggandaan	6 jenis			
							Jumlah barang cetakan dan penggandaan	8 Jenis Barang Cetak			
							jumlah barang cetak dan penggandaan	5 jenis			
							Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis			
						7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis		Semua Kab/Kota Kota Malang	
							Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis			
							Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis			
							Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	120 Eksp			
							Jumlah Bulan	12 Bulan			
						7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman fasilitasi tamu	475 Orang		Semua Kab/Kota Kota Malang	
							Jumlah Makanan, Minuman	12 Bulan			
						7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman	1900 kotak		Semua Kab/Kota Kota Malang	
							Jumlah makanan dan minuman	3800 Kotak			
							Jumlah Makanan, Minuman	5 Jenis			
							Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 kali			
							Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	11 kali			
							Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Kegiatan			



No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	2 Jenis		
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan Jumlah bulan terpeliharanya barang milik daerah Jumlah Kegiatan Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah jumlah peralatan gedung kantor, perlengkapan gedung kantor	3 Jenis 12 bulan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 8 Unit	7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional lapangan	1 unit	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	0 Jenis	Kota Malang		
						7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	3 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara Jumlah perlengkapan gedung kantor Jumlah taman yang dipelihara	7 jenis 9 Jenis 4 jenis 1 Unit	Kota Malang		
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelayanan urusan pemerintahan Jumlah Bulan Pembayaran Belanja Telpon, Air dan Listrik Jumlah kegiatan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah Jumlah surat keluar terkirim, jumlah bulan pembayaran belanja telpon, listrik, air, Jumlah peralatan penunjang kantor yang diperbaiki, Luasan ruangan yang dibersihkan, Jumlah petugas	12 Bulan 12 Bulan 3 Kegiatan 2 kegiatan 12 Bulan	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang teradministrasi dengan baik Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	650 surat 850 Surat 1025 surat 1075 Surat 1700 Surat	Semua Kab/Kota Kota Malang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
				pengamanan kantor							
					7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan			Semua Kab/Kota Kota Malang	
						Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 Bulan				
						Jumlah Bulan Pembayaran Belanja Telpon, Air dan Listrik	12 Bulan				
						jumlah tagihan belanja telepon, air dan listrik	12 bulan				
						Jumlah tagihan belanja telpon, air dan listrik	12 Tagihan				
					7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor	8 jenis			Kota Malang	
						Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara	6 Jenis				
					7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan	12 Bulan			Semua Kab/Kota Kota Malang	
						Jumlah petugas pengamanan kantor	2 Orang				
						Jumlah Petugas, Pengamanan Kantor	2 Orang				
						Jumlah petugas pengolah informasi	1 Orang				
						Jumlah tenaga kebersihan	2 Orang				
						Jumlah tenaga pramu bhakti	1 Orang				
						Jumlah tenaga sopir dinas	1 Orang				
						Luasan ruangan yang dibersihkan	1383 m2				
						Luasan ruangan yang dibersihkan	2000 m2				
						Luasan ruangan yang dibersihkan	4000 meter				
						Luasan Ruangan yang dibersihkan	6 Gedung				
						Luas ruangan yang dibersihkan	3.4 M2				

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan terpeliharanya barang milik daerah Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang dipelihara Jumlah Kegiatan Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah Jumlah Kendaraan, Peralatan, Gedung, Luasan	12 bulan 12 Dokumen 3 Kegiatan 3 Kegiatan 9.138 Unit,Unit,Gedung,M2	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua yang direhabilitasi Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat yang direhabilitasi Jumlah/volume BBM dan pelumas endaraan dinas/operasional roda dua dan roda empat	10 Buah 2 Buah 12 Buah	Kota Malang		
						7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM dan Pelumas yang disediakan selama 1 tahun Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan di proses perizinannya Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan proses perizinannya	3500 liter 10 unit 6 unit 11 Unit	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	9 Unit 2 Jenis 4 kegiatan 9 Jenis 9 Unit	Semua Kab/Kota Kota Malang		
						7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi Jumlah luasan gedung kantor yang dipelihara Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	1 Unit 1 gedung kantor 1 gedung	Semua Kab/Kota Kota Malang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	1 gedung		
						7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi Luasan Gedung kantor yang dipelihara	2 Paket 380 m2	Kota Malang	
	<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	80.3 -	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan, Bulan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PATEN, Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan, Jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan Persentase penyelesaian layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan Persentase Penyelesaian Layanan Berdasarkan Pelimpahan Kewenangan Terpenuhinya kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan	21.2 Keg.Surat 12 Bulan 97 Layanan 100 % 28 Kewenangan 144.1 bulan	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Mendukung Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan Jumlah Kegiatan Mendukung Peningkatan Kualitas pelayanan Administrasi Kelurahan Jumlah kegiatan pendukung operasional kantor yang bisa dilaksanakan jumlah kegiatan peningkatankwalitas Pelayanan administrasi kelurahan subersari Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PATEN Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan PATEN Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan admnistrasi kelurahan jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 20 kegiatan 12 bulan 1 dokumen 1 Kegiatan 12 bulan 27 kegiatan	Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan 28 kewenangan			
								Jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan 14 Kegiatan			
								Jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan 27 kegiatan			
								Jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan 27 Kegiatan			
								Jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan 97 Layanan			
								Jumlah Penyelenggaraan Layanan berdasarkan Pelimpahan Kewenangan 28 Kewenangan			
								Jumlah Penyelenggaraan Layanan Berdasarkan Pelimpahan Kewenangan 27 kegiatan			
								Jumlah Penyelenggaraan Layanan Berdasarkan Pelimpahan Kewenangan 27 Kegiatan			
			7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Jumlah dokumen (akumulasi) Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2 Dokumen 2 Dokumen 12 Dokumen 2 Dokumen 37 Dokumen	7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah ddk yang dikerjakan jumlah dokumen Jumlah Dokumen Jumlah dokumen data monografi Jumlah dokumen data monografi kecamatan Jumlah dokumen data Monografi Kecamatan Jumlah Dokumen Data Monografi Kecamatan	1400 buah 3 kali 3 Dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 Dokumen	Kota Malang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				<p>dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</p> <p>Jumlah dokumen tersusun 2 Dokumen</p> <p>Jumlah Kegiatan 12 Bulan</p> <p>Penyelenggaraan PATEN, Jumlah kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan,</p> <p>Jumlah tersedianya dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan 27 bulan</p> <p>Jumlah tersedianya dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan 27 dokumen</p> <p>Jumlah tersedianya dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan 27 kegiatan</p> <p>Persentase Penyelesaian Layanan Berdasarkan Pelimpahan Kewenangan 28 Kewenangan</p>				<p>Jumlah Dokumen Data Monografi Kelurahan Sebagai Arah Pembangunan 2 Dokumen</p> <p>jumlah dokumen data monograsi kecamatan 2 dokumen</p> <p>jumlah dokumen data profil kecamatan 1 dokumen</p> <p>Jumlah dokumen data profil kecamatan 1 dokumen</p> <p>Jumlah dokumen informasi pembangunan 1 dokumen</p> <p>jumlah dokumen monografi 2 Dok</p> <p>Jumlah dokumen monografi 1 doklumen</p> <p>Jumlah dokumen monografi 2 dokumen</p> <p>Jumlah dokumen monografi 2 Dokumen</p> <p>Jumlah dokumen Monografi 2 dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen monografi 2 dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Monografi 2 dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Monografi 2 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Monografi dan profil 3 dokumen</p> <p>Jumlah dokumen monografi dan profil 3 Dokumen</p> <p>jumlah dokumen monografi Kecamatan 2 dokumen</p> <p>jumlah dokumen monografi kelurahan 2 dokumen</p> <p>jumlah dokumen monografi kelurahan 2 Dokumen</p> <p>Jumlah dokumen monografi kelurahan 2 dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Monografi Kelurahan 2 dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Monografi Kelurahan 2 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Monografil Kelurahan 2 Dokumen</p> <p>Jumlah Dokumen Pemutakhiran Profil Kelurahan 1 Dokumen</p>			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah dokumen profil	1 dokume		
								Jumlah dokumen profil	1 dokumen		
								Jumlah dokumen profil	1 Dokumen		
								Jumlah dokumen profil	10 buku		
								Jumlah dokumen Profil	1 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Profil	1 dokumen		
								Jumlah Dokumen Profil	1 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Profil	2 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Profil	2 dokumen		
								jumlah dokumen profil Kecamatan	1 dokumen		
								Jumlah dokumen profil kecamatan	1 dokumen		
								Jumlah dokumen Profil Kecamatan	1 dokumen		
								Jumlah Dokumen Profil Kecamatan	1 Dokumen		
								jumlah dokumen profil Kelurahan	1 dokumen		
								jumlah dokumen profil Kelurahan	1 Dokumen		
								Jumlah dokumen profil kelurahan	1 Dokumen		
								Jumlah dokumen profil kelurahan	2 dokumen		
								Jumlah dokumen Profil Kelurahan	1 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Profil Kelurahan	1 Dokumen		
								JUmlah dokumen profil Kelurahan	1 Dokumen		
								Jumlah dokumen updating sistem informasi	1 Dokumen		
								jumlah dokumen updating sistem informasi pembangunan	1 dokumen		
								JUmlah Profil yang terupdate	1 Dokumen		
								Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi	1 Dokumen		
	<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	4.34 %	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	0 Kegiatan	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah dokumen	2 Dukumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
		Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	30 %		Jumlah Dokumen	1 Dokumen		Jumlah dokumen hasil musrenbang	1 dokumen		
					Jumlah Dokumen Data base kondisi Sarpras di wilayah Kecamatan (dan prioritas	12 Dokumen		Jumlah dokumen hasil musrenbangkel	1 dokumen		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	30 %	pelaksanaan pembangunan sapras)				Jumlah dokumen hasil Musrenbangkel	1 dokumen		
		Persentase Usulan Masyarakat Untuk Sarana Prasarana di Wilayah Yang Diakomodir	38 %	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang	1 Dokumen			Jumlah Dokumen Hasil Musrenbangkel	1 Dokumen		
				Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang,,Jumlah dokumen monev dan database kondisi sapras di wilayah kecamatan	1.4 Dokumen			jumlah dokumen hasil pelaksanaan Musrenbang	1 dokumen		
				Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang,Jumlah dokumen monev dan database kondisi sapras di wilayah kecamatan	1.4 Dokumen			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang	1 Dokumen		
				Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang,Jumlah unsur kemasyarakatan yang terfasilitasi, Jumlah kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	1 Dokumen			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Musrenbang	1 dokumen		
				Jumlah dokumen hasil pelaksanaan musrenbang,Jumlah unsur kemasyarakatan yang terfasilitasi, Jumlah kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	1.12 Dokumen			jumlah dokumen Musrenbangkel	1 dokumen		
				Jumlah dokumen monev dan database kondisi sapras di wilayah kecamatan	4 Dokumen			jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	1 dokumen		
				jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	11 kegiatan			jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam Musrenbang	1 Dokumen		
				Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	11 kegiatan			jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam Musrenbang	5 unsur		
				Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	11 kegiatan			jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam Musrenbang	6 unsur		
				Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	11 Kegiatan			Jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam Musrenbang	6 unsur		
				Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	3 Kegiatan			Jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	6 unsur		
								Jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam Musrenbang	6 unsur/lembaga		
								Jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam Musrenbang	9 Unsur		
								Jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam Musrenbang	9 Unsur		
								Jumlah Unsur Kemasyarakatan yang aktif dalam Musrenbang	6 unsur		
								Jumlah Unsur Kemasyarakatan yang Aktif dalam Musrenbang	9 Lembaga		
								Jumlah Unsur Kemasyarakatan yang Aktif dalam Musrenbang	12 Lembaga		
								Jumlah Unsur Kemasyarakatan Yang Aktif Dalam Musrenbang	13 Lembaga		





No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Jumlah kegiatan peningkatan prasarana dan sarana publik lingkungan kelurahan Jumlah Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik lingkungan Kelurahan Jumlah kegiatan peningkatan prasaran dan sarana publik lingkungan kelurahan Jumlah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan kelurahan Jumlah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan kelurahan Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana lingkungan Kelurahan Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Jumlah Kegiatan Sarana dan Prasaranan di Lingkungan Kelurahan Jumlah Pengadaan Sarana Jumlah peningkatan sarana dan Prasarana Jumlah Pokir Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun Jumlah Sarana dan Prasarana yang di Bangun Jumlah Sarana dan Prasarana yang di Bangun Jumlah Sarana dan Prasarana yang di Bangun Jumlah Sarana dan Prasarana yang di Bangun	19 paket 16 Paket 2 kegiatan 12 paket 11 paket 19 paket 15 RW 18 bulan 1 Kegiatan 5 Kegiatan 12 paket 12 Kegiatan 8 kegiatan 6 Titik 7 Lokasi 7 RW 9 Lokasi	Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang di Bangun	10 Lokasi			
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang di Bangun	14 Lokasi			
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang di Bangun	14 Paket			
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang di Bangun	15 Paket			
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang di Bangun	16 Paket			
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang di Bangun	21 RW			
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang di Bangun	24 Paket			
							jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	3 lokasi			
							jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	4 lokasi			
							jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	8 lokasi			
							jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	9 lokasi			
							jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	10 lokasi			
							jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	12 lokasi			
							jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	17 lokasi			
							jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	18 lokasi			
							jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	20 lokasi			
							jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	20 Lokasi			
							jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	26 lokasi			
							Jumlah sarana dan prasarana yang sudah dibangun	8 Kegiatan			
							Jumlah sarana dan prasarana yang sudah dibangun	10 kegiatan			



No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah fasilitas pendukung kegiatan sosial kemasyarakatan	2 kegiatan			Semua Kab/Kota Kota Malang	
						jumlah guru ngaji	63 orang/bulan				
						Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	95 Orang/Bulan				
						Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	144 Orang/Bulan				
						Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu terfasilitasi	130 orang				
						Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu terfasilitasi	186 Orang				
						Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu terfasilitasi	249 orang				
						Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu yang terfasilitasi	104 Orang				
						Jumlah Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu yang terfasilitasi	152 Orang				
						jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	55 orang				
						Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	15 orang				
						Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	40 orang				
						Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	41 orang				
						Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	43 orang				
						Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	45 orang				
						Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	46 orang				
						Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	88 orang				

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	92 orang			
							Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	97 Orang			
							Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	103 orang			
							Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	106 orang			
							Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	108 orang			
							Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	109 Orang			
							Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	115 orang			
							Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	120 OB			
							Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	122 Orang			
							Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	180 Orang			
							Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	202 Orang			
							Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	1373 OB			
							Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	1440 Orang			
							Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu	2785 kali			
							Jumlah Guru Ngaji dan sekolah minggu	15 Orang			
							Jumlah Guru Ngaji dan sekolah minggu	106 Orang			
							Jumlah Guru Ngaji dan sekolah minggu	109 Orang			
							Jumlah Guru Ngaji dan sekolah minggu	139 Orang			
							Jumlah Guru Ngaji dan sekolah minggu	140 Orang			
							Jumlah Guru Ngaji dan sekolah minggu	148 Orang			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Guru Ngaji dan sekolah minggu	185 Orang			
							Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu	54 Orang/Bulan Minggu			
							Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu	79 Orang/Bulan Minggu			
							Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu	80 orang			
							Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu	84 Orang/Bulan Minggu			
							Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu	106 Orang/Bulan Minggu			
							Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu	107 Orang/Bulan Minggu			
							Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu	118 Orang/Bulan Minggu			
							Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu	155 Orang			
							Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu	165 Orang/Bulan Minggu			
							Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu	183 Orang/Bulan Minggu			
							Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu	648 Orang/Bulan Minggu			
							Jumlah guru ngaji dan sekolah mingguJumlah modin dan perawat jenazah	21 Orang			
							Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu terfasilitasi	112 Orang			
							Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	154 Orang			
							Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu Terfasilitasi	65 Orang			
							Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu Terfasilitasi	68 Orang			
							Jumlah guru ngaji dan sekolah minggu yang terfasilitasi dan dibina	34 Oramg			
							Jumlah guru Ngaji yang terfasilitasi	38 orang			
							jumlah kegiatan	2 kegiatan			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								jumlah kegiatan	3 kali		
								Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan		
								Jumlah Kegiatan	3 Kali		
								jumlah kegiatan fasilitasi	8 kegiatan		
								Jumlah Kegiatan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat yang terfasilitasi	4 Kegiatan		
								jumlah kegiatan masyarakat di wilayah Kelurahan	0 bulan		
								Jumlah kegiatan pelatihan (pokir)	2 Kegiatan		
								Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	3 kegiatan		
								Jumlah kegiatan pembinaan dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat	1 kali		
								Jumlah kegiatan pembinaan dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat	2 kali		
								Jumlah kegiatan pembinaan dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat	2 kegiatan		
								Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat	7 Kegiatan		
								Jumlah kegiatan pembinaan dan peningkatan keterampilan masyarakat	3 kegiatan		
								Jumlah kegiatan peningkatan ketrampilan	5 kali		
								Jumlah Kegiatan Pokir	3 kegiatan		
								jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan	1 kegiatan		
								Jumlah Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah di Tingkat Kelurahan yang Terfasilitasi	12 bulan		
								Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan yang terfasilitasi	12 bulan		



No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah/tingkat kelurahan yang terfasilitasi	12 bulan			
						Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah / tingkat kelurahan yang terfasilitasi	12 bulan			
						Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah/ tingkat kelurahan yang terfasilitasi	12 bulan			
						Jumlah Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di wilayah/Tingkat Kelurahan yang Terfasilitasi	3 Kegiatan			
						Jumlah Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di wilayah/Tingkat Kelurahan yang Terfasilitasi	10 Kegiatan			
						Jumlah Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan yang terfasilitasi	1 Kegiatan			
						Jumlah Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan yang terfasilitasi	12 Bulan			
						Jumlah Kegiatan Sosial Kemasyarakatan yang di Fasilitasi	1 Kegiatan			
						Jumlah Kegiatan Sosial Kemasyarakatan yang di Fasilitasi	3 kegiatan			
						Jumlah Kegiatan Sosial Kemasyarakatan yang di Fasilitasi	3 Kegiatan			
						Jumlah Kegiatan Sosial Kemasyarakatan yang di Fasilitasi	4 Kegiatan			
						Jumlah Kegiatan Sosial Kemasyarakatan yang di Fasilitasi	5 Kegiatan			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi	5 Kegiatan		
								Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi	2 kegiatan		
								Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi	2 Kegiatan		
								Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi	2 Kegiatan		
								Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi	3 kegiatan		
								Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi	3 Lembaga		
								Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi	4 Kegiatan		
								Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi	5 kegiatan		
								Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi	5 Kegiatan		
								Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah difasilitasi	12 kegiatan		
								Jumlah kegiatan sosial/tingkat kelurahan yang terfasilitasi	12 Bulan		
								Jumlah Kegiatan Sosial / tingkat kelurahan yang terfasilitasi	12 bulan		
								Jumlah Kegiatan Sosial / Tingkat Kelurahan yang terfasilitasi	12 Bulan		
								jumlah kegi. sosial masyarakat yang terfasilitasi	2 kegiatan		
								Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Kegiatan		
								Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	3 Kegiatan		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	4 kelompok		
								Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	5 kegiatan		
								Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	8 kelompok		
								Jumlah Kelompok Masyarakat yang di Tingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga		
								Jumlah Kelompok Masyarakat yang di Tingkatkan Kapasitasnya	1 Kegiatan		
								Jumlah Kelompok Masyarakat yang di Tingkatkan Kapasitasnya	3 Kegiatan		
								Jumlah Kelompok Masyarakat yang di Tingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga		
								Jumlah Kelompok Masyarakat yang di Tingkatkan Kapasitasnya	4 Kegiatan		
								Jumlah Kelompok Masyarakat yang di Tingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga		
								Jumlah Kelompok Masyarakat yang di Tingkatkan Kapasitasnya	12 Kegiatan		
								Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	11 kegiatan		
								Jumlah Marbot dan Penjaga Makam yang terfasilitasi	20 orang		
								Jumlah Modhin dan Perawat Jenazah	20 orang		
								jumlah modin dan pengurus jenazah	16 Orang		
								Jumlah modin dan perawat jenazah	19 orang		
								Jumlah modin dan perawat jenazah	33 Orang		
								Jumlah modin dan perawat jenazah	55 orang		
								Jumlah modin dan perawat jenazah yang terfasilitasi dan dibina	15 Orang		
								jumlah modin dan perawat jenazah	16 orang		
								jumlah modin dan perawat jenazah	29 orang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah modin dan perawat jenazah	12 OB			
							Jumlah modin dan perawat jenazah	12 orang			
							Jumlah modin dan perawat jenazah	14 orang			
							Jumlah modin dan perawat jenazah	15 Orang			
							Jumlah modin dan perawat jenazah	16 Orang			
							Jumlah modin dan perawat jenazah	17 orang			
							Jumlah modin dan perawat jenazah	17 Orang			
							Jumlah modin dan perawat jenazah	19 orang			
							Jumlah modin dan perawat jenazah	21 orang			
							Jumlah modin dan perawat jenazah	22 orang			
							Jumlah modin dan perawat jenazah	24 Orang			
							Jumlah modin dan perawat jenazah	32 orang			
							Jumlah modin dan perawat jenazah	40 Orang			
							Jumlah modin dan perawat jenazah	45 Orang			
							Jumlah modin dan perawat jenazah	132 OB			
							Jumlah modin dan perawat jenazah	146 orang			
							Jumlah modin dan perawat jenazah	343 kali			
							Jumlah Modin dan perawat jenazah	10 orang			
							Jumlah Modin dan Perawat Jenazah	9 Orang/Bulan			
							Jumlah Modin dan Perawat Jenazah	12 Orang			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Modin dan Perawat Jenazah	14 Orang/Bulan			
							Jumlah Modin dan Perawat Jenazah	15 Orang/Bulan			
							Jumlah Modin dan Perawat Jenazah	17 Orang			
							Jumlah Modin dan Perawat Jenazah	24 Orang/Bulan			
							Jumlah Modin dan Perawat Jenazah	26 Orang/Bulan			
							Jumlah Modin dan Perawat Jenazah	27 Orang/Bulan			
							Jumlah Modin dan Perawat Jenazah	30 Orang/Bulan			
							Jumlah Modin dan Perawat Jenazah	41 Orang/Bulan			
							Jumlah Modin dan Perawat Jenazah	66 Orang/Bulan			
							Jumlah Modin dan Perawat Jenazah	240 Orang/Bulan			
							Jumlah modin dan perawat jenazah terfasilitasi	14 Orang			
							Jumlah Modin dan perawat jenazah terfasilitasi	52 Orang			
							Jumlah Modin dan Perawat Jenazah terfasilitasi	25 orang			
							Jumlah Modin dan Perawat Jenazah Terfasilitasi	8 Orang			
							Jumlah Modin dan Perawat Jenazah Terfasilitasi	22 Orang			
							Jumlah Modin dan Perawat Jenazah yang terfasilitasi	15 Orang			
							Jumlah Modin dan Perawat Jenazah yang terfasilitasi	21 Orang			
							Jumlah Modin dan Perawat Jenazah yang terfasilitasi	36 Orang			
							Jumlah modin/perawat jenasah yang mendapatkan	409 orang			
							jumlah modin perawat jenazah	13 orang/bulan			
							Jumlah modin perawat jenazah	180 Orang			
							Jumlah Modin Perawat Jenazah	29 Orang			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Modin perawat jenazah yang terfasilitasi	14 orang		
								Jumlah moodin dan perawat jenazah	21 orang		
								jumlah pelatihan	2 kali		
								jumlah penjaga makam dan penjaga tempat ibadah	16 orang		
								Jumlah penjaga makam dan penjaga tempat ibadah	35 orang		
								Jumlah Penjaga Makam dan Penjaga Tempat Ibadah	26 Orang/Bulan		
								jumlah penjaga makam dan tempat ibadah	28 Orang		
								jumlah penjaga tempat ibadah dan makam	26 orang/bulan dan makam		
								Jumlah penjaga tempat ibadah dan makam	27 orang		
								Jumlah penjaga Tempat ibadah dan Makam	39 Orang/Bulan dan Makam		
								Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Makam	30 orang		
								Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Makam	43 Orang/Bulan dan Makam		
								Jumlah Penjaga Tempat Ibadah dan Makam	21 Orang/Bulan dan Makam		
								Jumlah Penjaga Tempat Ibadah dan Makam	29 Orang/Bulan dan Makam		
								Jumlah Penjaga Tempat Ibadah dan Makam	42 Orang/Bulan dan Makam		
								Jumlah Penjaga Tempat Ibadah dan Makam	50 Orang/Bulan dan Makam		
								Jumlah Penjaga Tempat Ibadah dan Makam	53 Orang/Bulan dan Makam		
								Jumlah Penjaga Tempat Ibadah dan Makam	62 Orang/Bulan dan Makam		
								Jumlah Penjaga Tempat Ibadah dan Makam	70 Orang/Bulan dan Makam		
								Jumlah Penjaga Tempat Ibadah dan Makam	648 Orang/Bulan dan Makam		
								jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	21 orang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	8 orang		
								Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	12 Orang		
								Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	14 orang		
								Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	16 orang		
								Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	18 orang		
								Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	19 Orang		
								Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	20 orang		
								Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	22 orang		
								Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	37 orang		
								Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	39 orang		
								Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	43 OB		
								Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	47 Orang		
								Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	48 Orang		
								Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	50 orang		
								Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	50 Orang		
								Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	72 Orang		
								Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	94 Orang		
								Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	105 Orang		
								Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	422 OB		
								Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	444 Orang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam	1096 kali		
								Jumlah Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	36 Orang		
								Jumlah Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	50 Orang		
								Jumlah Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	63 Orang		
								Jumlah Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	73 Orang		
								Jumlah Penjaga tempat ibadah dan Penjaga Makam terfasilitasi	45 orang		
								Jumlah Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Terfasilitasi	20 Orang		
								Jumlah Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam Terfasilitasi	25 Orang		
								Jumlah penjaga tempat ibadah dan penjaga makam yang memperoleh pembinaan	528 orang		
								Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam yang terfasilitasi	46 Orang		
								Jumlah Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam yang terfasilitasi	31 Orang		
								Jumlah Penjaga Tempat ibadah dan Penjaga Makam yang terfasilitasi dan dibina	36 Orang		
								Jumlah Penjaga tempat ibadah dan sekolah minggu	50 orang		
								Jumlah penjaga tempat ibadah terfasilitasi	26 Orang		
								Jumlah peserta guru ngaji dan sekolah minggu yang	2099 orang		
								Jumlah tempat ibadah dan makam	44 orang		
								Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat di Wilayah Kelurahan	1 Kegiatan		
								Peningkatan kemampuan dan Keterampilan yang terfasilitasi	1 kegiatan		





No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi  Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi  Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi  Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi  Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi  Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi  Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi  Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi  Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi  Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi  Jumlah Lembaga yang aktif  Jumlah unsur kemasyarakatan yang terfasilitasi  Jumlah unsur kemasyarakatan yang terfasilitasi  Jumlah unsur kemasyarakatan yang terfasilitasi  Jumlah unsur kemasyarakatan yang terfasilitasi	1341 orang/bulan.kegiatan  9 Lembaga  12.4 Bulan.Kegiatan  12.4 Bulan.Kegiatan  12.4 Bulan.kegiatan  12.4 Bulan.Kegiatan  12.4 Buulan.Kegiatan  5 Lembaga  12 Lembaga  4 Lembaga  5 Lembaga  7 Lembaga  12 Dokumen  12 Lembaga	7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5 kegiatan  8 Lembaga yang terfasilitasi (LPMK.BKM,Posyandu, Pokja Kelurahan Sehat. KLA,Karabg Taruna, Karang Werda,Karling)  Jumlah bulan kegiatan mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kelurahan  Jumlah kegiatan lembaga yg terfasilitasi  Jumlah Kegiatan  Jumlah Kegiatan Fasilitasi KLA  jumlah kegiatan karang werdha  Jumlah Kegiatan Karang Werdha  Jumlah Kegiatan Karang Werdha  jumlah kegiatan kellurahan sehat  jumlah kegiatan kla  Jumlah Kegiatan KLA  jumlah kegiatan lpmk  jumlah kegiatan masyarakat di wilayah Kelurahan  Jumlah Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi PPK Kelurahan  Jumlah Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi PPK Kelurahan  Jumlah kegiatan pelatihan sosialisasi pertemuan PKK Kelurahan  Jumlah Kegiatan pelatihan/sosialisasi / pertemuan PKK kelurahan  Jumlah Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/pertemuan PKK Kelurahan  Jumlah Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/Pertemuan PKK Kelurahan	12 bulan  8 keg/lembaga  12 Bulan  8 kegiatan  3 kegiatan  1 kegiatan  2 kali  1 kegiatan  2 kegiatan  1 kali  2 kali  1 kegiatan  12 bulan  0 bulan  8 Kegiatan  13 Kegiatan  12 Kegiatan  3 Kegiatan  8 kegiatan  4 Kegiatan	Semua Kab/Kota Kota Malang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Persentase peningkatan lembaga ekonomi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100 %			Jumlah Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/Pertemuan PKK Kelurahan terfasilitasi	4 Kegiatan		
								Jumlah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	9 kegiatan		
								Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	1 kegiatan		
								Jumlah Kegiatan Pengarustamaan Gender	1 kegiatan		
								jumlah kegiatan pkk	3 kali		
								Jumlah Kegiatan PKK	3 Kegiatan		
								Jumlah Kegiatan PKK	4 Kegiatan		
								Jumlah Kegiatan PKK	10 Kegiatan		
								jumlah kegiatan PKK terfasilitasi	3 kali		
								Jumlah kegiatan PKK terfasilitasi	5 kegiatan		
								Jumlah Kegiatan PKK Terfasilitasi	4 kegiatan		
								Jumlah kegiatan PKK yang terfasilitasi	5 kegiatan		
								Jumlah Kegiatan PKK yang terfasilitasi	5 Kegiatan		
								jumlah kegiatan pug	2 kali		
								Jumlah Kegiatan PUG	1 kegiatan		
								Jumlah kegiatan sosialisasi PKK	2 kali		
								Jumlah kegiatan sosialisasi PKK	4 kali		
								Jumlah kegiatan sosialisasi PKK	7 kali		
								Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah/ tingkat kelurahan yang terfasilitasi	12 bulan		
								Jumlah Ketua RT dan Ketua RW	74 Orang		
								Jumlah Lembaga Anak / KLA	1 Lembaga		
								Jumlah Lembaga Disabilitas	1 Lembaga		
								jumlah lembaga kemasyarakatan	8 lembaga		
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah lembaga kemasyarakatan diwilayah Kecamatan yang dibina dan difasilitasi	2 Lembaga			
							Jumlah lembaga kemasyarakatan diwilayah Kecamatan yang dibina dan difasilitasi	2 Lembaga			
							Jumlah lembaga kemasyarakatan diwilayah Kecamatan yang dibina dan difasilitasi	3 Kegiatan			
							Jumlah lembaga kemasyarakatan diwilayah Kecamatan yang dibina dan difasilitasi	3 Lembaga			
							Jumlah lembaga kemasyarakatan diwilayah Kecamatan yang dibina dan difasilitasi	5 Lembaga			
							Jumlah lembaga kemasyarakatan diwilayah Kecamatan yang dibina dan difasilitasi	6 Lembaga			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan yang dibina dan di Fasilitasi	12 Lembaga			
							Jumlah lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	5 lembaga			
							Jumlah lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	5 Lembaga			
							Jumlah lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	6 Lembaga			
							Jumlah lembaga kemasyarakatan diwilayah Kelurahan yang dibina dan difasilitasi	5 lembaga			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan yang dibina dan di Fasilitasi	8 Lembaga			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan yang dibina dan di Fasilitasi	9 lembaga			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan yang dibina dan di Fasilitasi	9 Lembaga			
							Jumlah lembaga kemasyarakatan terfasilitasi	6 lembaga			
							Jumlah lembaga kemasyarakatan terfasilitasi	12 lembaga			
							Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang terfasilitasi	10 kegiatan			
							Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan terfasilitasi	5 lembaga			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang terfasilitasi	9 Lembaga			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan yang terfasilitasi	4 Lembaga			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Yang Terfasilitasi	5 Lembaga			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Yang Terfasilitasi	9 Lembaga			
							Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina dan di fasilitasi	3 lembaga			
							jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	8 lembaga			
							Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	3 kegiatan			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	5 lembaga			
							Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	7 lembaga			
							Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	8 lembaga			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi	8 Lembaga			
							Jumlah Lembaga Lansia / Karang Werda	1 Lembaga			
							Jumlah Lembaga Perempuan / PUG	1 Lembaga			
							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi	4 Lembaga			
							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi	8 Kegiatan			
							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi	8 Lembaga			
							Jumlah PKK Kecamatan dan Kelurahan yang aktif	5 Pokja			
							Jumlah PKK Kecamatan dan Kelurahan yang Aktif	12 Kelompok			
							Jumlah PKK RT/RW yang aktif	60 PKK			
							Jumlah PKK RT/RW yang Aktif	39 Kelompok			
							Jumlah PKK RT/RW yang Aktif	45 Kelompok			
							Jumlah PKK RT/RW yang Aktif	52 Kelompok			
							Jumlah PKK RT/RW yang Aktif	65 Kelompok			
							Jumlah PKK RT/RW yang Aktif	81 Kelompok			
							Jumlah PKK RT/RW yang Aktif	82 Kelompok			
							Jumlah PKK RT/RW yang Aktif	93 Kelompok			
							Jumlah PKK RT/RW yang Aktif	108 Kelompok			
							Jumlah PKK RT/RW yang Aktif	153 Kelompok			
							Jumlah PKK RT/RW yang Aktif	168 Kelompok			
							Jumlah PKK RT/RW yang Aktif	181 Kelompok			
							Jumlah RT dan RW	39 Orang/Bulan			
							Jumlah RT dan RW	45 Orang/Bulan			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah RT dan RW	52 Orang/Bulan		
								Jumlah RT dan RW	65 Orang/Bulan		
								Jumlah RT dan RW	81 Orang/Bulan		
								Jumlah RT dan RW	82 Orang/Bulan		
								Jumlah RT dan RW	93 Orang/Bulan		
								Jumlah RT dan RW	108 Orang/Bulan		
								Jumlah RT dan RW	153 Orang/Bulan		
								Jumlah RT dan RW	168 orang		
								Jumlah RT dan RW	181 Orang/Bulan		
								Jumlah RT dan RW terfasilitasi	12 bulan		
								Jumlah RT dan RW terfasilitasi	58 orang		
								Jumlah RT dan RW yang terfasilitasi	83 Orang		
								jumlah RT/RW	60 orang		
								Jumlah RT /RW	67 Orang		
								Jumlah RT/RW	56 Orang		
								Jumlah RT/RW	68 Orang		
								Jumlah RT/RW	75 OB		
								Jumlah RT/RW	81 Orang		
								Jumlah RT/RW	97 Orang		
								Jumlah RT/RW	98 Orang		
								Jumlah RT/RW	122 Orang		
								Jumlah RT/RW	145 Orang		
								Jumlah RT/RW	151 Orang		
								Jumlah RT/ RW	51 Orang		
								Jumlah RT/ RW	122 orang		
								Jumlah RT / RW terfasilitasi	99 Orang		
								Jumlah RT / RW terfasilitasi	150 Orang		
								Jumlah RT RW terfasilitasi	59 orang		
								Jumlah RT RW terfasilitasi	91 orang		
								Jumlah RT-RW terfasilitasi	143 orang		
								Jumlah RT/RW terfasilitasi	77 orang		
								Jumlah RT/RW terfasilitasi	87 orang		
								Jumlah RT/RW terfasilitasi	105 orang		
								Jumlah RT/RW terfasilitasi	136 RT RW		
								Jumlah RT / RW Terfasilitasi	81 orang		
								Jumlah RT/RW Terfasilitasi	53 Orang		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah RT/RW Terfasilitasi	56 Orang		
								Jumlah RT-RW terfasilitasi	152 Orang		
								jumlah rt/rw yang terfasilitasi	468 orang/bulan		
								Jumlah RT RW yang terfasilitasi	64 orang		
								Jumlah RT RW yang terfasilitasi	67 Orang		
								Jumlah RT/RW yang terfasilitasi	47 orang		
								Jumlah RT/RW yang terfasilitasi	67 orang		
								Jumlah RT/RW yang terfasilitasi	74 OB		
								Jumlah RT/RW yang terfasilitasi	119 orang		
								Jumlah RT/RW yang Terfasilitasi	93 Orang		
								Jumlah RT terfasilitasi	35 RT		
								Jumlah RT terfasilitasi	96 RT		
								Jumlah RT Terfasilitasi	57 RT		
								Jumlah RT yang terfasilitasi dan dibina	49 RT		
								Jumlah RW terfasilitasi	6 RW		
								Jumlah RW terfasilitasi	10 RW		
								Jumlah RW terfasilitasi	11 RW		
								Jumlah RW Terfasilitasi	7 RW		
								Jumlah RW yang terfasilitasi dan dibina	8 RW		
								Kegiatan PKK yang terfasilitasi	4 kegiatan		
								Pemberdayaan Lansia + Perempuan/PUG +Anak dan Disabilitas	4 kegiatan		
								Profil kelurahan layak anak	1 dokumen		
	<b>7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN</b>	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang	94 %	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	cakupan wilayah yang termonitoring	1025 RT	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Cakupan wilayah yang termonitoring	58 RT	Kota Malang	



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>KETERTIBAN UMUM</b>	dapat diselesaikan		Ketertiban Umum	Cakupan Wilayah yang Termonitoring	34 RT	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan wilayah yang termonitoring	96 RT		
		Rasio Linmas per RT	--		Cakupan Wilayah yang Termonitoring	38 RT		Jumlah Kegiatan	1 kegiatan		
					Cakupan Wilayah yang Termonitoring	45 RT		jumlah kegiatan monitoring peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan Kelurahan	144 kali		
					Cakupan Wilayah yang Termonitoring	55 RT		Jumlah Kegiatan Monitoring Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan Gadang	144 Patroli/Monitoring		
					Cakupan Wilayah yang Termonitoring	70 RT		Jumlah Kegiatan Penguatan Linmas	1 kegiatan		
					Cakupan Wilayah yang Termonitoring	74 RT		Jumlah Kegiatan Peningkatan Keamana, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan	2 Kegiatan		
					Cakupan Wilayah yang Termonitoring	85 RT		jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan	2 Kegiatan		
					Cakupan Wilayah yang Termonitoring	95 RT		Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan	1 Kali		
					Cakupan Wilayah yang Termonitoring	137 RT		Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan	1 kegiatan		
					Cakupan Wilayah yang Termonitoring	147 RT		Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan	2 kegiatan		
					Cakupan Wilayah yang Termonitoring	157 RT		Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan	12 kegiatan		
					Cakupan Wilayah yang Termonitoring	937 RT					
					Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	35 RT					
					Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	45 RT					
					Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	47 RT					
					Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	50 RT					
					Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	57 RT					
					Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	58 RT					
					Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	67 RT					
					Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	78 RT					

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	96 RT		Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	oli		
				Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	678 RT		Peningkatan Keamanan				
				Jumlah dokumen monitoring peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan Kecamatan	12 Dokumen		Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan				
				Jumlah kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 kegiatan		Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan			
				Jumlah kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	1 kegiatan		Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan				
				Jumlah kegiatan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 kegiatan		Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan	1 kegiatan			
				Jumlah monitoring, pembinaan dan fasilitasi	24 Kali		Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan (monitoring/patrol /koordinasi)	2 Kegiatan			
				Jumlah monitoring, pembinaan dan fasilitasi	144 kali		Jumlah kegiatan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan ( Monitoring/patrol /koordinasi	144 kali			
				Jumlah monitoring, pembinaan dan Fasilitasi	144 Kali		Jumlah kegiatan peningkatan keamanan , ketentraman ,ketertiban kecamatan	1 kegiatan			
							Jumlah kegiatan sosialisasi untuk keamanan dan ketertiban	1 kegiatan			
							Jumlah Kegiatan Sosialisasi untuk Ketentraman dan Ketertiban	1 Kegiatan			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah monitoring peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan kecamatan	12 bulan		
							Jumlah patroli	48 Kali		
							Jumlah patroli	144 kali		
							Jumlah patroli	144 Kali		
							Jumlah Patroli	48 Kali		
							Jumlah Patroli	144 kali		
							Jumlah Patroli	144 Kali		
							jumlah patroli dan monitoring wilayah	36 kali		
							jumlah patroli dan monitoring wilayah	48 kali		
							jumlah patroli dan monitoring wilayah	96 kali		
							jumlah patroli dan monitoring wilayah	144 kali		
							Jumlah patroli dan monitoring wilayah	12 Patroli/Monitoring		
							Jumlah patroli dan monitoring wilayah	48 patroli		
							Jumlah patroli dan monitoring wilayah	96 patroli		
							Jumlah patroli dan monitoring wilayah	144 Patroli		
							Jumlah patroli dan monitoring wilayah	144 Patroli/Monitoring		
							Jumlah patroli dan Monitoring wilayah	144 kali		
							Jumlah Patroli dan Monitoring Wilayah	24 Kali		
							Jumlah Patroli dan Monitoring Wilayah	24 Patroli		
							Jumlah Patroli dan Monitoring Wilayah	48 Kali		
							Jumlah Patroli dan Monitoring Wilayah	114 Kali		
							Jumlah Patroli dan Monitoring Wilayah	114 Patroli		





No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
<b>8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>											
	<b>8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	15 dokumen	8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renstra	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	15 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN	28 orang	8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN	28 pegawai	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	50 unit	8.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen laporan barang milik daerah	50 unit	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	28 orang	8.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	28 orang	Kota Malang	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	104 eksemplar	8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	104 eksemplar	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	152 OH	Semua Kab/Kota Kota Malang	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan gedung kantor	12 jenis	8.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peraltan gedung kantor	12 jenis	Kota Malang	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	1000 surat	8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar selama 1 tahun	1000 surat	Semua Kab/Kota Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah luasan bangunan dan lahan yg dibersihkan serta yg di jaga keamanannya	2050 m2	Semua Kab/Kota Kota Malang	
			8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	19 jenis		8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yg dipelihara	13 unit	Semua Kab/Kota Kota Malang	
							8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah gedung kantor yg direhabilitasi jumlah peralatan gedung kantor yg dipelihara	200 m2 19 jenis	Semua Kab/Kota Kota Malang	
	<b>8.01.02 PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	12 %	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	jumlah peserta pertemuan	900 orang	8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah peserta pertemuan	900 orang	Kota Malang	
	<b>8.01.03 PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	57,5 %	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Parpol Penerima Hibah	10 parpol	8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	jumlah parpol penerima hibah	10 parpol	Kota Malang	
							8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	jumlah pelaku sosialisasi jumlah stakeholder yg terlibat	150 orang 2 kali	Kota Malang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
	<b>8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	32,5 %	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	jumlah ormas yg terdata	120 ormas	8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah ormas yg tersedia	120 ormas	Kota Malang	
	<b>8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan	72,5 %	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah dokumen	1 dokumen	8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah peserta pertemuan jumlah peserta rakor	1565 orang 250 orang	Kota Malang	
	<b>8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan	72,5 %	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah personil pemantau, personil wasdin, personil FKDM, personil KPRM, personil Timdu konflik sosial, personil Forkopimda	1617 orang	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah personil tim pemantau dan jumlah peserta pertemuan jumlah personil wasdin, personil fkdm, personil puskommin, personil penanganan gangguan konflik	100 orang 200 orang	Kota Malang	



# **LAMPIRAN II**

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN  
PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB  
KEGIATAN

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>582.370.507.678</b>	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>582.370.507.678</b>	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>445.683.407.678</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>364.998.530.710</b>	
<b>1.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.100.000.000</b>	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000.000	
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	150.000.000	
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.000.000	
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.000.000	
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	25.000.000	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	125.000.000	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000.000	
<b>1.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>353.492.405.646</b>	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	353.051.285.646	
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	241.120.000	
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	
1.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	50.000.000	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.000.000	
<b>1.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>232.730.000</b>	
1.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	82.730.000	
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	150.000.000	
<b>1.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>175.000.000</b>	
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	75.000.000	
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4.653.318.800</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.466.000	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.640.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	158.000.000	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.375.000	
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	117.837.800	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000.000	
<b>1.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>932.102.500</b>	
1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000	
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	229.203.600	
1.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.000.000	
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.898.900	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.974.060.000</b>	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	195.440.000	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	625.000.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.153.620.000	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.229.913.764</b>	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.000.000	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	765.280.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	960.000.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	194.455.764	
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	193.178.000	
<b>1.01.01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>209.000.000</b>	
1.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	209.000.000	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>80.191.091.968</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>27.931.864.000</b>	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	685.280.000	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.435.280.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.435.280.000	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	100.000.000	
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	352.000.000	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	100.000.000	
1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	202.590.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	19.558.800.000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	120.000.000	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200.000.000	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.602.634.000	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100.000.000	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	40.000.000	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>22.888.442.968</b>	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.000.000.000	
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	432.416.968	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	400.000.000	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	100.000.000	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	177.280.000	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	135.280.000	
1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	15.022.700.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	300.000.000	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200.000.000	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.845.486.000	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	135.280.000	
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	40.000.000	
<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>25.126.165.000</b>	
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	440.410.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	100.000.000	
1.01.02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	136.550.000	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	150.000.000	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	197.500.000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	135.280.000	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	6.668.225.000	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	50.000.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	17.248.200.000	
<b>1.01.02.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>4.244.620.000</b>	
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	51.220.000	
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	100.000.000	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	100.000.000	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.843.400.000	
<b>1.01.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>1.01.03.2.01</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>100.000.000</b>	
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100.000.000	
<b>1.01.04</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>393.785.000</b>	
<b>1.01.04.2.01</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>393.785.000</b>	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	262.585.000	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	131.200.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0001</b>	<b>SMP NEGERI 01 MALANG</b>	<b>1.722.264.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.722.264.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>1.722.264.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	934.380.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	787.884.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0002</b>	<b>SMP NEGERI 02 MALANG</b>	<b>2.392.728.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>2.392.728.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>2.392.728.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.297.260.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.095.468.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0003</b>	<b>SMP NEGERI 03 MALANG</b>	<b>1.908.504.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.908.504.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>1.908.504.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.035.180.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	873.324.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0004</b>	<b>SMP NEGERI 04 MALANG</b>	<b>1.934.112.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.934.112.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>1.934.112.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.049.040.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	885.072.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0005</b>	<b>SMP NEGERI 05 MALANG</b>	<b>1.966.704.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.966.704.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>1.966.704.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.066.680.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	900.024.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0006</b>	<b>SMP NEGERI 06 MALANG</b>	<b>1.712.952.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.712.952.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>1.712.952.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	929.340.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	783.612.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.01.2.22.0.00.02.0007</b>	<b>SMP NEGERI 07 MALANG</b>	<b>1.854.960.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.854.960.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>1.854.960.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.006.200.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	848.760.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0008</b>	<b>SMP NEGERI 08 MALANG</b>	<b>1.754.856.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.754.856.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>1.754.856.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	952.020.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	802.836.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0009</b>	<b>SMP NEGERI 09 MALANG</b>	<b>1.717.608.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.717.608.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>1.717.608.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	931.860.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	785.748.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0010</b>	<b>SMP NEGERI 10 MALANG</b>	<b>1.990.648.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.990.648.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>1.990.648.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.091.880.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	898.768.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0011</b>	<b>SMP NEGERI 11 MALANG</b>	<b>1.822.368.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.822.368.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>1.822.368.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	988.560.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	833.808.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0012</b>	<b>SMP NEGERI 12 MALANG</b>	<b>1.538.352.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.538.352.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>1.538.352.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	834.840.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	703.512.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0013</b>	<b>SMP NEGERI 13 MALANG</b>	<b>1.822.368.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.822.368.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>1.822.368.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	988.560.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	833.808.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0014</b>	<b>SMP NEGERI 14 MALANG</b>	<b>1.740.888.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.740.888.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>1.740.888.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	944.460.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	796.428.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0015</b>	<b>SMP NEGERI 15 MALANG</b>	<b>2.048.184.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>2.048.184.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>2.048.184.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.110.780.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	937.404.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0016</b>	<b>SMP NEGERI 16 MALANG</b>	<b>1.664.064.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.664.064.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>1.664.064.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	902.880.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	761.184.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0017</b>	<b>SMP NEGERI 17 MALANG</b>	<b>1.969.032.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.969.032.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>1.969.032.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.067.940.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	901.092.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0018</b>	<b>SMP NEGERI 18 MALANG</b>	<b>1.901.520.000</b>	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.901.520.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>1.901.520.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.031.400.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	870.120.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0019</b>	<b>SMP NEGERI 19 MALANG</b>	<b>2.024.904.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>2.024.904.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>2.024.904.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.098.180.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	926.724.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0020</b>	<b>SMP NEGERI 20 MALANG</b>	<b>1.885.224.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.885.224.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>1.885.224.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.022.580.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	862.644.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0021</b>	<b>SMP NEGERI 21 MALANG</b>	<b>1.959.720.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.959.720.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>1.959.720.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.062.900.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	896.820.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0022</b>	<b>SMP NEGERI 22 MALANG</b>	<b>1.407.984.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.407.984.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>1.407.984.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	764.280.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	643.704.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0023</b>	<b>SMP NEGERI 23 MALANG</b>	<b>1.489.464.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.489.464.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>1.489.464.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	808.380.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	681.084.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0024</b>	<b>SMP NEGERI 24 MALANG</b>	<b>1.540.680.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.540.680.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>1.540.680.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	836.100.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	704.580.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0025</b>	<b>SMP NEGERI 25 MALANG</b>	<b>926.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>926.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>926.500.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	480.060.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	446.440.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0026</b>	<b>SMP NEGERI 26 MALANG</b>	<b>1.335.816.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.335.816.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>1.335.816.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	725.220.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	610.596.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0027</b>	<b>SMP NEGERI 27 MALANG</b>	<b>954.220.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>954.220.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>954.220.000</b>	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	507.780.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	446.440.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0028</b>	<b>SD NEGERI KLOJEN</b>	<b>748.800.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>748.800.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>748.800.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	385.200.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	363.600.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0029</b>	<b>SD NEGERI ARJOSARI 01</b>	<b>600.456.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>600.456.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>600.456.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	300.228.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	300.228.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0030</b>	<b>SD NEGERI ARJOSARI 02</b>	<b>288.600.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>288.600.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>288.600.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	144.300.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	144.300.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0031</b>	<b>SD NEGERI ARJOSARI 03</b>	<b>276.336.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>276.336.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>276.336.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	138.168.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	138.168.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0032</b>	<b>SD NEGERI ARJOWINANGUN 01</b>	<b>354.960.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>354.960.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>354.960.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	180.000.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	174.960.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0033</b>	<b>SD NEGERI ARJOWINANGUN 02</b>	<b>713.712.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>713.712.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>713.712.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	361.800.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	351.912.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0034</b>	<b>SD NEGERI BAKALAN KRAJAN 01</b>	<b>840.816.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>840.816.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>840.816.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	432.504.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	408.312.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0035</b>	<b>SD NEGERI BAKALAN KRAJAN 02</b>	<b>563.064.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>563.064.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>563.064.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	289.716.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	273.348.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0036</b>	<b>SD NEGERI BALEARJOSARI 01</b>	<b>507.696.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>507.696.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>507.696.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	257.400.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	250.296.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0037</b>	<b>SD NEGERI BALEARJOSARI 02</b>	<b>207.552.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>207.552.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>207.552.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	105.300.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	102.252.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0038</b>	<b>SD NEGERI BANDULAN 01</b>	<b>393.432.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>393.432.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>393.432.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	155.688.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	237.744.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0039</b>	<b>SD NEGERI BANDULAN 02</b>	<b>450.179.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>450.179.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>450.179.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	252.048.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	198.131.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0040</b>	<b>SD NEGERI BANDULAN 03</b>	<b>360.420.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>360.420.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>360.420.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	202.992.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	157.428.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0041</b>	<b>SD NEGERI BANDULAN 04</b>	<b>320.887.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>320.887.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>320.887.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	167.076.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	153.811.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0042</b>	<b>SD NEGERI BANDULAN 05</b>	<b>290.424.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>290.424.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>290.424.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	149.556.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	140.868.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0043</b>	<b>SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 01</b>	<b>849.336.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>849.336.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>849.336.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	436.884.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	412.452.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0044</b>	<b>SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 02</b>	<b>588.624.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>588.624.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>588.624.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	302.856.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	285.768.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0045</b>	<b>SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 03</b>	<b>571.584.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>571.584.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>571.584.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	294.096.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	277.488.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0046</b>	<b>SD NEGERI BANDUNGREJOSARI 04 (EX.9)</b>	<b>353.472.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>353.472.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>353.472.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	181.968.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	171.504.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0047</b>	<b>SD NEGERI BARENG 01</b>	<b>494.904.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>494.904.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>494.904.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	254.676.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	240.228.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0048</b>	<b>SD NEGERI BARENG 02</b>	<b>649.968.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>649.968.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>649.968.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	334.392.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	315.576.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0049</b>	<b>SD NEGERI BARENG 03</b>	<b>834.000.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>834.000.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>834.000.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	429.000.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	405.000.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0050</b>	<b>SD NEGERI BARENG 04</b>	<b>193.296.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>193.296.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>193.296.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	99.624.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	93.672.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0051</b>	<b>SD NEGERI BARENG 05</b>	<b>186.480.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>186.480.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>186.480.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	96.120.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	90.360.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0052</b>	<b>SD NEGERI BLIMBING 01</b>	<b>616.224.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>616.224.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>616.224.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	308.112.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	308.112.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0053</b>	<b>SD NEGERI BLIMBING 02</b>	<b>291.024.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>291.024.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>291.024.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	147.600.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	143.424.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0054</b>	<b>SD NEGERI BLIMBING 03</b>	<b>639.120.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>639.120.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>639.120.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	324.000.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	315.120.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0055</b>	<b>SD NEGERI BLIMBING 04</b>	<b>548.544.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>548.544.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>548.544.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	278.100.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	270.444.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0056</b>	<b>SD NEGERI BLIMBING 05</b>	<b>280.368.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>280.368.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>280.368.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	142.200.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	138.168.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0057</b>	<b>SD NEGERI BUMIAYU 01</b>	<b>441.984.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>441.984.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>441.984.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	224.100.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	217.884.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0058</b>	<b>SD NEGERI BUMIAYU 02</b>	<b>438.432.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>438.432.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>438.432.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	222.300.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	216.132.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0059</b>	<b>SD NEGERI BUMIAYU 03</b>	<b>509.472.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>509.472.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>509.472.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	258.300.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	251.172.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0060</b>	<b>SD NEGERI BUMIAYU 04</b>	<b>308.784.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>308.784.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>308.784.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	156.600.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	152.184.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0061</b>	<b>SD NEGERI BUNULREJO 01</b>	<b>759.888.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>759.888.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>759.888.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	385.200.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	374.688.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0062</b>	<b>SD NEGERI BUNULREJO 02</b>	<b>912.624.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>912.624.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>912.624.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	462.600.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	450.024.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0063</b>	<b>SD NEGERI BUNULREJO 03</b>	<b>381.600.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>381.600.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>381.600.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	193.500.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	188.100.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0064</b>	<b>SD NEGERI BUNULREJO 04</b>	<b>562.752.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>562.752.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>562.752.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	285.300.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	277.452.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0065</b>	<b>SD NEGERI BUNULREJO 05</b>	<b>283.920.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>283.920.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>283.920.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	144.000.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	139.920.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0066</b>	<b>SD NEGERI BUNULREJO 06</b>	<b>500.592.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>500.592.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>500.592.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	253.800.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	246.792.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0067</b>	<b>SD NEGERI BURING</b>	<b>1.038.720.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.038.720.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>1.038.720.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	526.500.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	512.220.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0068</b>	<b>SD NEGERI CEMOROKANDANG 01</b>	<b>298.128.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>298.128.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>298.128.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	151.200.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	146.928.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0069</b>	<b>SD NEGERI CEMOROKANDANG 02</b>	<b>349.632.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>349.632.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>349.632.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	177.300.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	172.332.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0070</b>	<b>SD NEGERI CEMOROKANDANG 03</b>	<b>195.120.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>195.120.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>195.120.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	99.000.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	96.120.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0071</b>	<b>SD NEGERI CEMOROKANDANG 04</b>	<b>285.696.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>285.696.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>285.696.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	144.900.000	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	140.796.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0072</b>	<b>SD NEGERI CIPTOMULYO 01</b>	<b>845.928.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>845.928.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>845.928.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	435.132.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	410.796.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0073</b>	<b>SD NEGERI CIPTOMULYO 02</b>	<b>387.552.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>387.552.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>387.552.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	199.488.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	188.064.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0074</b>	<b>SD NEGERI CIPTOMULYO 03</b>	<b>326.208.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>326.208.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>326.208.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	167.952.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	158.256.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0075</b>	<b>SD NEGERI DINOYO 01</b>	<b>329.616.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>329.616.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>329.616.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	169.704.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	159.912.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0076</b>	<b>SD NEGERI DINOYO 02</b>	<b>844.968.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>844.968.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>844.968.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	425.892.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	419.076.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0077</b>	<b>SD NEGERI DINOYO 03</b>	<b>281.904.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>281.904.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>281.904.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	145.176.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	136.728.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0078</b>	<b>SD NEGERI DINOYO 04</b>	<b>285.312.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>285.312.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>285.312.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	146.928.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	138.384.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0079</b>	<b>SD NEGERI GADANG 01</b>	<b>843.264.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>843.264.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>843.264.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	425.016.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	418.248.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0080</b>	<b>SD NEGERI GADANG 02</b>	<b>254.640.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>254.640.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>254.640.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	131.160.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	123.480.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0081</b>	<b>SD NEGERI GADANG 03</b>	<b>416.520.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>416.520.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>416.520.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	214.380.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	202.140.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0082</b>	<b>SD NEGERI GADANG 04</b>	<b>588.624.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>588.624.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>588.624.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	302.856.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	285.768.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0083</b>	<b>SD NEGERI GADING KASRI</b>	<b>261.456.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>261.456.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>261.456.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	134.664.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	126.792.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0084</b>	<b>SD NEGERI JATIMULYO 01</b>	<b>223.968.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>223.968.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>223.968.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	115.392.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	108.576.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0085</b>	<b>SD NEGERI JATIMULYO 02</b>	<b>280.944.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>280.944.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>280.944.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	146.700.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	134.244.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0086</b>	<b>SD NEGERI JATIMULYO 03</b>	<b>281.904.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>281.904.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>281.904.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	145.176.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	136.728.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0087</b>	<b>SD NEGERI JATIMULYO 04</b>	<b>186.480.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>186.480.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>186.480.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	96.120.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	90.360.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0088</b>	<b>SD NEGERI JATIMULYO 05</b>	<b>200.112.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>200.112.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>200.112.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	103.128.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	96.984.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0089</b>	<b>SD NEGERI JODIPAN</b>	<b>864.192.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>864.192.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>864.192.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	438.300.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	425.892.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0090</b>	<b>SD NEGERI KARANGBESUKI 01</b>	<b>283.608.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>283.608.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>283.608.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	146.052.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	137.556.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0091</b>	<b>SD NEGERI KARANGBESUKI 02</b>	<b>271.680.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>271.680.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>271.680.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	139.920.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	131.760.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0092</b>	<b>SD NEGERI KARANGBESUKI 03</b>	<b>333.024.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>333.024.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>333.024.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	171.456.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	161.568.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0093</b>	<b>SD NEGERI KARANGBESUKI 04</b>	<b>249.528.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>249.528.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>249.528.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	128.532.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	120.996.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0094</b>	<b>SD NEGERI KASIN</b>	<b>791.491.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>791.491.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>791.491.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	432.000.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	359.491.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0095</b>	<b>SD NEGERI KAUMAN 01</b>	<b>1.217.484.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.217.484.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>1.217.484.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	697.680.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	519.804.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0096</b>	<b>SD NEGERI KAUMAN 02</b>	<b>498.312.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>498.312.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>498.312.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	256.428.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	241.884.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0097</b>	<b>SD NEGERI KAUMAN 03</b>	<b>384.144.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>384.144.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>384.144.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	197.736.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	186.408.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0098</b>	<b>SD NEGERI KEBONSARI 01</b>	<b>251.232.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>251.232.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>251.232.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	129.408.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	121.824.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0099</b>	<b>SD NEGERI KEBONSARI 02</b>	<b>845.928.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>845.928.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>845.928.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	435.132.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	410.796.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0100</b>	<b>SD NEGERI KEBONSARI 03</b>	<b>390.876.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>390.876.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>390.876.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	245.040.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	145.836.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0101</b>	<b>SD NEGERI KEBONSARI 04</b>	<b>293.172.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>293.172.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>293.172.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	154.812.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	138.360.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0102</b>	<b>SD NEGERI KEDUNGKANDANG 01</b>	<b>410.016.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>410.016.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>410.016.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	207.900.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	202.116.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0103</b>	<b>SD NEGERI KEDUNGKANDANG 02</b>	<b>603.600.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>603.600.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>603.600.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	306.000.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	297.600.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0104</b>	<b>SD NEGERI KESATRIAN 01</b>	<b>1.032.912.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.032.912.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>1.032.912.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	523.800.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	509.112.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0105</b>	<b>SD NEGERI KESATRIAN 02</b>	<b>282.144.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>282.144.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>282.144.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	143.100.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	139.044.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0106</b>	<b>SD NEGERI KETAWANGGEDE</b>	<b>658.488.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>658.488.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>658.488.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	338.772.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	319.716.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0107</b>	<b>SD NEGERI KIDULDALEM 01</b>	<b>212.040.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>212.040.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>212.040.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	109.260.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	102.780.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0108</b>	<b>SD NEGERI KIDULDALEM 02</b>	<b>247.824.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>247.824.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>247.824.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	127.656.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	120.168.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0109</b>	<b>SD NEGERI KOTALAMA 01</b>	<b>845.311.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>845.311.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>845.311.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	428.400.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	416.911.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0110</b>	<b>SD NEGERI KOTALAMA 02</b>	<b>608.928.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>608.928.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>608.928.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	308.700.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	300.228.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0111</b>	<b>SD NEGERI KOTALAMA 03</b>	<b>461.520.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>461.520.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>461.520.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	234.000.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	227.520.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0112</b>	<b>SD NEGERI KOTALAMA 04</b>	<b>301.680.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>301.680.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>301.680.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	153.000.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	148.680.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0113</b>	<b>SD NEGERI KOTALAMA 05</b>	<b>527.232.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>527.232.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>527.232.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	267.300.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	259.932.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0114</b>	<b>SD NEGERI KOTALAMA 06</b>	<b>291.024.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>291.024.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>291.024.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	147.600.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	143.424.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0115</b>	<b>SD NEGERI LESANPURO 01</b>	<b>337.200.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>337.200.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>337.200.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	171.000.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	166.200.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0116</b>	<b>SD NEGERI LESANPURO 02</b>	<b>283.920.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>283.920.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>283.920.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	144.000.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	139.920.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0117</b>	<b>SD NEGERI LESANPURO 03</b>	<b>607.152.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>607.152.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>607.152.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	307.800.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	299.352.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0118</b>	<b>SD NEGERI LESANPURO 04</b>	<b>814.944.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>814.944.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>814.944.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	413.100.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	401.844.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0119</b>	<b>SD NEGERI LOWOKWARU 01</b>	<b>385.848.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>385.848.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>385.848.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	198.612.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	187.236.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0120</b>	<b>SD NEGERI LOWOKWARU 02</b>	<b>947.784.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>947.784.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>947.784.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	469.584.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	478.200.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0121</b>	<b>SD NEGERI LOWOKWARU 03</b>	<b>910.680.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>910.680.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>910.680.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	468.420.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	442.260.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0122</b>	<b>SD NEGERI LOWOKWARU 04</b>	<b>523.872.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>523.872.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>523.872.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	269.568.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	254.304.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0123</b>	<b>SD NEGERI LOWOKWARU 05</b>	<b>280.200.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>280.200.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>280.200.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	144.300.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	135.900.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0124</b>	<b>SD NEGERI MADYOPURO 01</b>	<b>578.736.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>578.736.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>578.736.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	293.400.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	285.336.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0125</b>	<b>SD NEGERI MADYOPURO 02</b>	<b>308.784.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>308.784.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>308.784.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	156.600.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	152.184.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0126</b>	<b>SD NEGERI MADYOPURO 03</b>	<b>381.600.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>381.600.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>381.600.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	193.500.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	188.100.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0127</b>	<b>SD NEGERI MADYOPURO 04</b>	<b>607.152.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>607.152.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>607.152.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	307.800.000	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	299.352.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0128</b>	<b>SD NEGERI MADYOPURO 05</b>	<b>623.136.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>623.136.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>623.136.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	315.900.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	307.236.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0129</b>	<b>SD NEGERI MADYOPURO 06</b>	<b>257.280.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>257.280.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>257.280.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	130.500.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	126.780.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0130</b>	<b>SD NEGERI MERGOSONO 01</b>	<b>624.912.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>624.912.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>624.912.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	316.800.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	308.112.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0131</b>	<b>SD NEGERI MERGOSONO 02</b>	<b>521.904.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>521.904.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>521.904.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	264.600.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	257.304.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0132</b>	<b>SD NEGERI MERGOSONO 03</b>	<b>276.816.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>276.816.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>276.816.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	140.400.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	136.416.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0133</b>	<b>SD NEGERI MERGOSONO 04</b>	<b>257.280.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>257.280.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>257.280.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	130.500.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	126.780.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0134</b>	<b>SD NEGERI MERGOSONO 05</b>	<b>260.832.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>260.832.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>260.832.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	132.300.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	128.532.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0135</b>	<b>SD NEGERI MERJOSARI 01</b>	<b>283.608.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>283.608.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>283.608.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	146.052.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	137.556.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0136</b>	<b>SD NEGERI MERJOSARI 02</b>	<b>288.720.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>288.720.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>288.720.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	148.680.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	140.040.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0137</b>	<b>SD NEGERI MERJOSARI 03</b>	<b>273.384.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>273.384.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>273.384.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	140.796.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	132.588.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0138</b>	<b>SD NEGERI MERJOSARI 04</b>	<b>294.732.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>294.732.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>294.732.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	133.788.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	160.944.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0139</b>	<b>SD NEGERI MERJOSARI 05</b>	<b>317.232.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>317.232.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>317.232.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	165.600.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	151.632.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0140</b>	<b>SD NEGERI MODEL KOTA MALANG</b>	<b>2.639.904.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>2.639.904.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>2.639.904.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.413.720.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.226.184.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0141</b>	<b>SD NEGERI MOJOLANGU 01</b>	<b>210.336.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>210.336.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>210.336.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	108.384.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	101.952.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0142</b>	<b>SD NEGERI MOJOLANGU 02</b>	<b>276.792.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>276.792.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>276.792.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	142.548.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	134.244.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0143</b>	<b>SD NEGERI MOJOLANGU 03</b>	<b>290.424.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>290.424.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>290.424.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	149.556.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	140.868.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0144</b>	<b>SD NEGERI MOJOLANGU 04</b>	<b>215.448.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>215.448.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>215.448.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	111.012.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	104.436.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0145</b>	<b>SD NEGERI MOJOLANGU 05</b>	<b>251.232.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>251.232.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>251.232.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	129.408.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	121.824.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0146</b>	<b>SD NEGERI MULYOREJO 01</b>	<b>462.528.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>462.528.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>462.528.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	238.032.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	224.496.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0147</b>	<b>SD NEGERI MULYOREJO 02</b>	<b>573.288.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>573.288.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>573.288.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	294.972.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	278.316.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0148</b>	<b>SD NEGERI MULYOREJO 03</b>	<b>694.272.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>694.272.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>694.272.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	357.168.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	337.104.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0149</b>	<b>SD NEGERI ORO-ORO DOWO</b>	<b>195.000.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>195.000.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>195.000.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	100.500.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	94.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0150</b>	<b>SD NEGERI PANDANWANGI 01</b>	<b>836.256.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>836.256.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>836.256.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	423.900.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	412.356.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0151</b>	<b>SD NEGERI PANDANWANGI 02</b>	<b>285.696.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>285.696.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>285.696.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	144.900.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	140.796.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0152</b>	<b>SD NEGERI PANDANWANGI 03</b>	<b>774.096.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>774.096.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>774.096.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	392.400.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	381.696.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0153</b>	<b>SD NEGERI PANDANWANGI 04</b>	<b>280.368.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>280.368.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>280.368.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	142.200.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	138.168.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0154</b>	<b>SD NEGERI PANDANWANGI 05</b>	<b>292.800.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>292.800.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>292.800.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	148.500.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	144.300.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0155</b>	<b>SD NEGERI PENANGGUNGAN</b>	<b>522.168.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>522.168.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>522.168.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	268.692.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	253.476.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0156</b>	<b>SD NEGERI PERCOBAAN 01</b>	<b>641.448.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>641.448.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>641.448.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	330.012.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	311.436.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0157</b>	<b>SD NEGERI PERCOBAAN 02</b>	<b>1.116.864.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.116.864.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>1.116.864.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	574.416.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	542.448.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0158</b>	<b>SD NEGERI PISANGCANDI 02</b>	<b>324.504.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>324.504.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>324.504.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	167.076.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	157.428.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0159</b>	<b>SD NEGERI PISANGCANDI 03</b>	<b>186.480.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>186.480.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>186.480.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	96.120.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	90.360.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0160</b>	<b>SD NEGERI PISANGCANDI 04</b>	<b>186.480.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>186.480.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>186.480.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	96.120.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	90.360.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0161</b>	<b>SD NEGERI PISANGCANDI 01</b>	<b>387.552.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>387.552.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>387.552.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	199.488.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	188.064.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0162</b>	<b>SD NEGERI POLEHAN 01</b>	<b>278.592.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>278.592.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>278.592.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	141.300.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	137.292.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0163</b>	<b>SD NEGERI POLEHAN 02</b>	<b>653.328.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>653.328.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>653.328.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	331.200.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	322.128.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0164</b>	<b>SD NEGERI POLEHAN 03</b>	<b>766.992.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>766.992.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>766.992.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	388.800.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	378.192.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0165</b>	<b>SD NEGERI POLEHAN 04</b>	<b>299.904.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>299.904.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>299.904.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	152.100.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	147.804.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0166</b>	<b>SD NEGERI POLEHAN 05</b>	<b>218.208.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>218.208.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>218.208.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	110.700.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	107.508.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0167</b>	<b>SD NEGERI POLOWIJEN 01</b>	<b>259.056.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>259.056.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>259.056.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	131.400.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	127.656.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0168</b>	<b>SD NEGERI POLOWIJEN 02</b>	<b>251.952.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>251.952.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>251.952.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	127.800.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	124.152.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0169</b>	<b>SD NEGERI POLOWIJEN 03</b>	<b>280.368.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>280.368.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>280.368.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	142.200.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	138.168.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0170</b>	<b>SD NEGERI PURWANTORO 01</b>	<b>862.896.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>862.896.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>862.896.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	437.400.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	425.496.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0171</b>	<b>SD NEGERI PURWANTORO 02</b>	<b>559.200.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>559.200.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>559.200.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	283.500.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	275.700.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0172</b>	<b>SD NEGERI PURWANTORO 03</b>	<b>239.520.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>239.520.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>239.520.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	121.500.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	118.020.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0173</b>	<b>SD NEGERI PURWANTORO 04</b>	<b>273.264.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>273.264.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>273.264.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	138.600.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	134.664.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0174</b>	<b>SD NEGERI PURWANTORO 05</b>	<b>195.120.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>195.120.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>195.120.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	99.000.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	96.120.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0175</b>	<b>SD NEGERI PURWANTORO 06</b>	<b>251.952.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>251.952.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>251.952.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	127.800.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	124.152.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0176</b>	<b>SD NEGERI PURWANTORO 07</b>	<b>195.120.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>195.120.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>195.120.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	99.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	96.120.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0177</b>	<b>SD NEGERI PURWANTORO 08</b>	<b>504.144.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>504.144.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>504.144.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	255.600.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	248.544.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0178</b>	<b>SD NEGERI PURWODADI 01</b>	<b>568.080.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>568.080.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>568.080.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	288.000.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	280.080.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0179</b>	<b>SD NEGERI PURWODADI 02</b>	<b>275.040.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>275.040.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>275.040.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	139.500.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	135.540.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0180</b>	<b>SD NEGERI PURWODADI 03</b>	<b>218.208.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>218.208.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>218.208.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	110.700.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	107.508.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0181</b>	<b>SD NEGERI PURWODADI 04</b>	<b>275.040.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>275.040.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>275.040.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	139.500.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	135.540.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0182</b>	<b>SD NEGERI RAMPAL CELAKET 01</b>	<b>530.688.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>530.688.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>530.688.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	273.072.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	257.616.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0183</b>	<b>SD NEGERI RAMPAL CELAKET 02</b>	<b>496.608.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>496.608.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>496.608.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	255.552.000	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	241.056.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0184</b>	<b>SD NEGERI SAWOJAJAR 01</b>	<b>894.864.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>894.864.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>894.864.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	453.600.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	441.264.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0185</b>	<b>SD NEGERI SAWOJAJAR 02</b>	<b>285.696.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>285.696.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>285.696.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	144.900.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	140.796.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0186</b>	<b>SD NEGERI SAWOJAJAR 03</b>	<b>299.904.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>299.904.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>299.904.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	152.100.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	147.804.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0187</b>	<b>SD NEGERI SAWOJAJAR 04</b>	<b>276.816.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>276.816.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>276.816.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	140.400.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	136.416.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0188</b>	<b>SD NEGERI SAWOJAJAR 05</b>	<b>610.704.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>610.704.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>610.704.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	309.600.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	301.104.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0189</b>	<b>SD NEGERI SAWOJAJAR 06</b>	<b>679.968.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>679.968.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>679.968.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	344.700.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	335.268.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0190</b>	<b>SD NEGERI SUKOHARJO 01</b>	<b>486.220.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>486.220.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>486.220.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	243.540.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	242.680.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0191</b>	<b>SD NEGERI SUKOHARJO 02</b>	<b>264.864.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>264.864.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>264.864.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	136.416.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	128.448.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0192</b>	<b>SD NEGERI SUKUN 01</b>	<b>808.440.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>808.440.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>808.440.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	415.860.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	392.580.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0193</b>	<b>SD NEGERI SUKUN 02</b>	<b>595.440.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>595.440.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>595.440.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	306.360.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	289.080.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0194</b>	<b>SD NEGERI SUKUN 03</b>	<b>595.440.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>595.440.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>595.440.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	306.360.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	289.080.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0195</b>	<b>SD NEGERI SUMBERSARI 01</b>	<b>361.992.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>361.992.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>361.992.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	186.348.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	175.644.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0196</b>	<b>SD NEGERI SUMBERSARI 02</b>	<b>206.928.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>206.928.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>206.928.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	106.632.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	100.296.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0197</b>	<b>SD NEGERI SUMBERSARI 03</b>	<b>266.568.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>266.568.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>266.568.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	137.292.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	129.276.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0198</b>	<b>SD NEGERI TANJUNGREJO 01</b>	<b>287.016.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>287.016.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>287.016.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	147.804.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	139.212.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0199</b>	<b>SD NEGERI TANJUNGREJO 02</b>	<b>648.264.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>648.264.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>648.264.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	333.516.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	314.748.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0200</b>	<b>SD NEGERI TANJUNGREJO 03 (EX IV)</b>	<b>288.720.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>288.720.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>288.720.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	148.680.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	140.040.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0201</b>	<b>SD NEGERI TANJUNGREJO 04</b>	<b>288.720.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>288.720.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>288.720.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	148.680.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	140.040.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0202</b>	<b>SD NEGERI TANJUNGREJO 05</b>	<b>404.592.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>404.592.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>404.592.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	208.248.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	196.344.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0203</b>	<b>SD NEGERI TASIKMADU 01</b>	<b>476.160.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>476.160.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>476.160.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	245.040.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	231.120.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0204</b>	<b>SD NEGERI TASIKMADU 02</b>	<b>540.912.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>540.912.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>540.912.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	278.328.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	262.584.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0205</b>	<b>SD NEGERI TLOGOMAS 01</b>	<b>246.120.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>246.120.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>246.120.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	126.780.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	119.340.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0206</b>	<b>SD NEGERI TLOGOMAS 02</b>	<b>782.880.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>782.880.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>782.880.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	402.720.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	380.160.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0207</b>	<b>SD NEGERI TLOGOWARU 01</b>	<b>338.976.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>338.976.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>338.976.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	171.900.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	167.076.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0208</b>	<b>SD NEGERI TLOGOWARU 02</b>	<b>195.120.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>195.120.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>195.120.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	99.000.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	96.120.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0209</b>	<b>SD NEGERI TULUSREJO 01</b>	<b>246.120.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>246.120.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>246.120.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	126.780.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	119.340.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0210</b>	<b>SD NEGERI TULUSREJO 02</b>	<b>244.416.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>244.416.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>244.416.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	125.904.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	118.512.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0211</b>	<b>SD NEGERI TULUSREJO 03</b>	<b>273.384.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>273.384.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>273.384.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	140.796.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	132.588.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0212</b>	<b>SD NEGERI TULUSREJO 04</b>	<b>186.480.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>186.480.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>186.480.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	96.120.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	90.360.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0213</b>	<b>SD NEGERI TUNGGULWULUNG 01</b>	<b>288.720.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>288.720.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>288.720.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	148.680.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	140.040.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0214</b>	<b>SD NEGERI TUNGGULWULUNG 02</b>	<b>298.944.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>298.944.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>298.944.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	153.936.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	145.008.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0215</b>	<b>SD NEGERI TUNGGULWULUNG 03</b>	<b>258.048.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>258.048.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>258.048.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	132.912.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	125.136.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0216</b>	<b>SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 01</b>	<b>835.704.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>835.704.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>835.704.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	429.876.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	405.828.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0217</b>	<b>SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 02</b>	<b>232.488.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>232.488.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>232.488.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	119.772.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	112.716.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0218</b>	<b>SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 03</b>	<b>464.232.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>464.232.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>464.232.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	238.908.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	225.324.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0219</b>	<b>SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 04</b>	<b>191.592.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>191.592.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>191.592.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	98.748.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	92.844.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0220</b>	<b>SD NEGERI TUNJUNGSEKAR 05</b>	<b>361.992.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>361.992.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>361.992.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	186.348.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	175.644.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0221</b>	<b>SD NEGERI WONOKOYO 01</b>	<b>294.576.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>294.576.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>294.576.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	149.400.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	145.176.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0222</b>	<b>SD NEGERI WONOKOYO 02</b>	<b>195.120.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>195.120.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>195.120.000</b>	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	99.000.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	96.120.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0223</b>	<b>TK N PEMBINA 01</b>	<b>73.000.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>73.000.000</b>	
<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>73.000.000</b>	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	73.000.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0224</b>	<b>TK N PEMBINA 03</b>	<b>30.000.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>30.000.000</b>	
<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>30.000.000</b>	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	30.000.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0225</b>	<b>TK N PEMBINA 2</b>	<b>41.000.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>41.000.000</b>	
<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>41.000.000</b>	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	41.000.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0226</b>	<b>TK NEGERI PEMBINA 5</b>	<b>30.000.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>30.000.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>30.000.000</b>	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	30.000.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0227</b>	<b>UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus</b>	<b>700.000.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>700.000.000</b>	
<b>1.01.02.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>700.000.000</b>	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	700.000.000	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0228</b>	<b>Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar</b>	<b>700.000.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>700.000.000</b>	
<b>1.01.02.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>700.000.000</b>	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	700.000.000	
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>375.069.394.002</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>375.069.394.002</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>304.668.364.587</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>118.291.950.131</b>	
<b>1.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>53.750.000</b>	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.750.000	
<b>1.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>114.780.026.282</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	114.501.066.282	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	278.960.000	
<b>1.02.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>308.000.000</b>	
1.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000	
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	293.000.000	
<b>1.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>120.000.000</b>	
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.000.000	
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.314.173.849</b>	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.673.849	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	470.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.500.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	442.000.000	
<b>1.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>110.000.000</b>	
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.000.000	
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>726.000.000</b>	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.000.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	396.000.000	
<b>1.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>430.000.000</b>	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	135.000.000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.000.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.000.000	
<b>1.02.01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>450.000.000</b>	
1.02.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	450.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>177.068.184.456</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>17.370.991.000</b>	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	10.000.000.000	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.000.000.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	867.023.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.533.033.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.500.000.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	470.935.000	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>159.388.701.456</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	180.190.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	39.390.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	22.995.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	66.250.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.000.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	111.320.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	87.995.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	121.560.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	113.770.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	210.950.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	181.110.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.632.702.300	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	203.895.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	101.260.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	182.580.000	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	33.540.186	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	129.380.000	
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	4.427.980.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	513.583.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	149.230.380.970	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	50.760.000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	22.280.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.719.830.000	
<b>1.02.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>308.492.000</b>	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	177.582.000	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	130.910.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>408.420.000</b>	
<b>1.02.03.2.02</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>408.420.000</b>	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	408.420.000	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>423.230.000</b>	
<b>1.02.04.2.01</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>182.080.000</b>	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	182.080.000	
<b>1.02.04.2.03</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>241.150.000</b>	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	241.150.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>8.476.580.000</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>718.200.000</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	718.200.000	
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.758.380.000</b>	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.758.380.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>UPT Laboratorium Kesehatan Daerah</b>	<b>2.150.000.000</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>2.150.000.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.150.000.000</b>	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.150.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.01.0002	Rumah Sakit Umum Daerah	40.000.000.000	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	15.000.000.000	
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	15.000.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	15.000.000.000	
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	25.000.000.000	
1.02.02.2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	7.500.000.000	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.500.000.000	
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	13.000.000.000	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	13.000.000.000	
1.02.02.2.04	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	4.500.000.000	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.500.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0003	<b>Puskesmas Janti</b>	2.268.000.000	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	2.100.000.000	
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	2.100.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.100.000.000	
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	168.000.000	
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	168.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	168.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0004	<b>Puskesmas Dinoyo</b>	2.376.000.000	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	2.000.000.000	
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	2.000.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000	
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	376.000.000	
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	376.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	376.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0005</b>	<b>Puskesmas Mojolangu</b>	<b>1.194.299.000</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.026.299.000</b>	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.026.299.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.026.299.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>168.000.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>168.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	168.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0006</b>	<b>Puskesmas Kendalsari</b>	<b>1.927.149.000</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.551.149.000</b>	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.551.149.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.551.149.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>376.000.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>376.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	376.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0007</b>	<b>Puskesmas Arjuno</b>	<b>1.340.000.000</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.172.000.000</b>	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.172.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.172.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>168.000.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>168.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	168.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0008</b>	<b>Puskesmas Rampal Celaket</b>	<b>1.007.124.000</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>839.124.000</b>	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>839.124.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	839.124.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>168.000.000</b>	
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>168.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	168.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0009	<b>Puskesmas Bareng</b>	<b>1.292.716.000</b>	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.124.716.000</b>	
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.124.716.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.124.716.000	
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>168.000.000</b>	
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>168.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	168.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0010	<b>Puskesmas Kedungkandang</b>	<b>3.556.000.000</b>	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.180.000.000</b>	
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>3.180.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.180.000.000	
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>376.000.000</b>	
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>376.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	376.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0011	<b>Puskesmas Gribig</b>	<b>1.222.669.800</b>	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.054.669.800</b>	
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.054.669.800</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.054.669.800	
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>168.000.000</b>	
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>168.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	168.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0012	<b>Puskesmas Arjowinangun</b>	<b>1.937.120.900</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.769.120.900</b>	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.769.120.900</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.769.120.900	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>168.000.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>168.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	168.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0013</b>	<b>Puskesmas Mulyorejo</b>	<b>1.847.349.000</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.471.349.000</b>	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.471.349.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.471.349.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>376.000.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>376.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	376.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0014</b>	<b>Puskesmas Ciptomulyo</b>	<b>1.589.662.000</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.421.662.000</b>	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.421.662.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.421.662.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>168.000.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>168.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	168.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0015</b>	<b>Puskesmas Kedalkerep</b>	<b>2.205.403.100</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.829.403.100</b>	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.829.403.100</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.829.403.100	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>376.000.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>376.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	376.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0016</b>	<b>Puskesmas Pandanwangi</b>	<b>1.682.111.550</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.514.111.550</b>	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.514.111.550</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.514.111.550	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>168.000.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>168.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	168.000.000	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0017</b>	<b>Puskesmas Polowijen</b>	<b>1.504.082.665</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>947.000.000</b>	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>947.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	947.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>557.082.665</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>557.082.665</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	557.082.665	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0018</b>	<b>Puskesmas Cisadea</b>	<b>1.301.342.400</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.133.342.400</b>	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.133.342.400</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.133.342.400	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>168.000.000</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>168.000.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	168.000.000	
<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>258.093.817.215</b>	
<b>1.03.1.04.2.10.10.0000</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>258.093.817.215</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.03.1.04.2.10.10.0000</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>255.091.817.215</b>	
<b>1.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>32.909.473.028</b>	
<b>1.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.727.250.000</b>	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	409.098.100	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.820.000	
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.140.000	
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.820.000	
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	17.140.000	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	583.407.888	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	668.824.012	
<b>1.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>24.682.223.028</b>	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.182.223.028	
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	125.000.000	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	375.000.000	
<b>1.03.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100.000.000</b>	
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000	
<b>1.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>99.732.000</b>	
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.732.000	
<b>1.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>935.965.000</b>	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	73.386.200	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.773.900	
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	65.231.400	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	202.752.000	
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	182.270.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.551.500	
<b>1.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>457.446.800</b>	
1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	457.446.800	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.638.629.900</b>	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	567.329.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.397.610.000	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.814.900	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	539.876.000	
<b>1.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.268.226.300</b>	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.223.328.700	
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.044.897.600	
<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>1.960.000.000</b>	
<b>1.03.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.700.000.000</b>	
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	200.000.000	
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.500.000.000	
<b>1.03.02.2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>260.000.000</b>	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	260.000.000	
<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>1.600.000.000</b>	
<b>1.03.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.600.000.000</b>	
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	100.000.000	
1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	100.000.000	
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	1.400.000.000	
<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>4.325.500.000</b>	
<b>1.03.05.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.325.500.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	600.000.000	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.300.000.000	
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	100.000.000	
1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	100.000.000	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2.025.500.000	
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	200.000.000	
<b>1.03.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>37.900.867.200</b>	
<b>1.03.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>37.900.867.200</b>	
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2.500.000.000	
1.03.06.2.01.02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	250.000.000	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	5.755.370.000	
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	26.267.414.000	
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	3.128.083.200	
<b>1.03.07</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>11.784.262.500</b>	
<b>1.03.07.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.784.262.500</b>	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7.052.530.000	
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4.731.732.500	
<b>1.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>93.217.248.787</b>	
<b>1.03.08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>93.217.248.787</b>	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	150.000.000	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	90.907.248.787	
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.960.000.000	
<b>1.03.09</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>6.900.000.000</b>	
<b>1.03.09.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.900.000.000</b>	
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	400.000.000	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	6.500.000.000	
<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>61.021.585.700</b>	
<b>1.03.10.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>61.021.585.700</b>	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	100.000.000	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	12.939.866.500	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	13.442.510.800	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	30.874.208.400	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	2.690.000.000	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	350.000.000	
1.03.10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	625.000.000	
<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>400.000.000</b>	
<b>1.03.11.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>100.000.000</b>	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100.000.000	
<b>1.03.11.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>250.000.000</b>	
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	50.000.000	
1.03.11.2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	200.000.000	
<b>1.03.11.2.03</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>	<b>50.000.000</b>	
1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	50.000.000	
<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>3.072.880.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.03.12.2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>1.950.000.000</b>	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1.800.000.000	
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	150.000.000	
<b>1.03.12.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>497.880.000</b>	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	150.000.000	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	347.880.000	
<b>1.03.12.2.04</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>625.000.000</b>	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	625.000.000	
<b>1.03.1.04.2.10.10.0001</b>	<b>UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi</b>	<b>894.000.000</b>	
<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>894.000.000</b>	
<b>1.03.10.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>894.000.000</b>	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	894.000.000	
<b>1.03.1.04.2.10.10.0002</b>	<b>UPT Pengolahan Air Limbah Daerah</b>	<b>2.108.000.000</b>	
<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>2.108.000.000</b>	
<b>1.03.05.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.108.000.000</b>	
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	500.000.000	
1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	500.000.000	
1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	1.108.000.000	
<b>1.04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>4.042.620.000</b>	
<b>1.03.1.04.2.10.10.0000</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>4.042.620.000</b>	
<b>1.03.1.04.2.10.10.0000</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>1.293.870.000</b>	
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>660.000.000</b>	
<b>1.04.02.2.01</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>330.000.000</b>	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	330.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.04.02.2.02</b>	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>330.000.000</b>	
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	330.000.000	
<b>1.04.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>282.370.000</b>	
<b>1.04.03.2.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>282.370.000</b>	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	172.370.000	
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	110.000.000	
<b>1.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>351.500.000</b>	
<b>1.04.05.2.01</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>351.500.000</b>	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	351.500.000	
<b>1.03.1.04.2.10.10.0003</b>	<b>UPT Rumah Susun Sederhana Sewa</b>	<b>2.748.750.000</b>	
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>2.748.750.000</b>	
<b>1.04.02.2.05</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>2.748.750.000</b>	
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.748.750.000	
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>47.136.234.176</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>37.767.037.549</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>35.598.231.549</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>20.814.680.149</b>	
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>164.072.200</b>	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.207.000	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	91.865.200	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16.587.795.748</b>	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.495.930.548	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	91.865.200	
<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>852.462.400</b>	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	632.462.400	
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	220.000.000	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.105.851.000</b>	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.000.000	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	842.851.000	
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>435.740.801</b>	
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	274.531.800	
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	161.209.001	
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>338.758.000</b>	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	236.892.800	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.865.200	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.330.000.000</b>	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.200.000.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>14.783.551.400</b>	
<b>1.05.02.2.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>13.483.112.600</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	5.181.532.200	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	387.850.000	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	7.813.730.400	
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.000.000	
<b>1.05.02.2.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>1.300.438.800</b>	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.000.438.800	
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	300.000.000	
<b>1.05.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>UPT Pemadam Kebakaran</b>	<b>2.168.806.000</b>	
<b>1.05.04</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>2.168.806.000</b>	
<b>1.05.04.2.01</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.068.806.000</b>	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.718.806.000	
<b>1.05.04.2.04</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>100.000.000</b>	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100.000.000	
<b>1.05.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>9.369.196.627</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>9.369.196.627</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.584.196.627</b>	
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>409.000.000</b>	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.000.000	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	125.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	124.000.000	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000	
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.649.196.627</b>	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.599.196.627	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	
<b>1.05.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>15.000.000</b>	
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	
<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100.000.000</b>	
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>571.000.000</b>	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400.000.000	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000	
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>420.000.000</b>	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.000.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	275.000.000	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>420.000.000</b>	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.000.000	
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.000.000	
<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>2.785.000.000</b>	
<b>1.05.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>150.000.000</b>	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	150.000.000	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.05.03.2.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>1.645.000.000</b>	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	670.000.000	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	290.000.000	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	550.000.000	
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	135.000.000	
<b>1.05.03.2.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>755.000.000</b>	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	580.000.000	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	175.000.000	
<b>1.05.03.2.04</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>235.000.000</b>	
1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	235.000.000	
<b>1.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>43.549.767.734</b>	
<b>1.06.2.08.2.14.06.0000</b>	<b>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>43.549.767.734</b>	
<b>1.06.2.08.2.14.06.0000</b>	<b>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>43.549.767.734</b>	
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>24.011.487.734</b>	
<b>1.06.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>287.000.000</b>	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	180.000.000	
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	45.000.000	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	
<b>1.06.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16.950.866.834</b>	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.939.866.834	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.000.000	
<b>1.06.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>167.200.000</b>	
1.06.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	167.200.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.06.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>357.000.000</b>	
1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	357.000.000	
<b>1.06.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>3.035.620.900</b>	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190.000.000	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.000.000	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.642.620.900	
<b>1.06.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>610.000.000</b>	
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	610.000.000	
<b>1.06.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.510.200.000</b>	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	135.000.000	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	310.000.000	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.065.200.000	
<b>1.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.093.600.000</b>	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	773.600.000	
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.000.000	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	225.000.000	
<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>2.708.200.000</b>	
<b>1.06.02.2.02</b>	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>35.000.000</b>	
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	35.000.000	
<b>1.06.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.673.200.000</b>	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.562.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.111.200.000	
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>15.795.080.000</b>	
<b>1.06.04.2.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>14.035.080.000</b>	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	12.315.080.000	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	10.000.000	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	200.000.000	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15.000.000	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	360.000.000	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	620.000.000	
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	15.000.000	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	500.000.000	
<b>1.06.04.2.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>1.760.000.000</b>	
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	50.000.000	
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	553.000.000	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	657.000.000	
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	10.000.000	
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	20.000.000	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	390.000.000	
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	10.000.000	
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10.000.000	
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000	
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	50.000.000	
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>425.000.000</b>	
<b>1.06.05.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>17.500.000</b>	
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	10.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	7.500.000	
<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>407.500.000</b>	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	232.500.000	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>260.000.000</b>	
<b>1.06.06.2.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>180.000.000</b>	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	150.000.000	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	15.000.000	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	15.000.000	
<b>1.06.06.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>80.000.000</b>	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	80.000.000	
<b>1.06.07</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>350.000.000</b>	
<b>1.06.07.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>350.000.000</b>	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	350.000.000	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>16.531.161.534</b>	
<b>2.07.2.18.0.00.02.0000</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>16.531.161.534</b>	
<b>2.07.2.18.0.00.02.0000</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>16.531.161.534</b>	
<b>2.07.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15.683.107.984</b>	
<b>2.07.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>187.000.000</b>	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000	
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.000.000	
<b>2.07.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.819.307.984</b>	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.692.107.984	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	127.200.000	
<b>2.07.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>8.300.000</b>	
2.07.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.300.000	
<b>2.07.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>15.000.000</b>	
2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	
<b>2.07.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>715.000.000</b>	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.500.000	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.500.000	
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.000.000	
2.07.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	
<b>2.07.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>50.000.000</b>	
2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	
<b>2.07.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>288.500.000</b>	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	148.500.000	
<b>2.07.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>600.000.000</b>	
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	
<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>508.053.550</b>	
<b>2.07.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>437.882.500</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	437.882.500	
<b>2.07.03.2.02</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>70.171.050</b>	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	70.171.050	
<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>85.000.000</b>	
<b>2.07.04.2.01</b>	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000</b>	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	50.000.000	
<b>2.07.04.2.03</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>25.000.000</b>	
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	25.000.000	
<b>2.07.04.2.04</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.000.000</b>	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	10.000.000	
<b>2.07.05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>255.000.000</b>	
<b>2.07.05.2.01</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>45.000.000</b>	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	45.000.000	
<b>2.07.05.2.02</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>210.000.000</b>	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	165.000.000	
<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>2.467.782.100</b>	
<b>1.06.2.08.2.14.06.0000</b>	<b>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>2.467.782.100</b>	
<b>1.06.2.08.2.14.06.0000</b>	<b>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>2.467.782.100</b>	
<b>2.08.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>786.584.000</b>	
<b>2.08.02.2.01</b>	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>140.000.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	140.000.000	
<b>2.08.02.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>150.000.000</b>	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	150.000.000	
<b>2.08.02.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>496.584.000</b>	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	120.000.000	
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	376.584.000	
<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>323.790.000</b>	
<b>2.08.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>173.790.000</b>	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	155.600.000	
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.190.000	
<b>2.08.03.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>150.000.000</b>	
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	
<b>2.08.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>797.340.100</b>	
<b>2.08.04.2.01</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>797.340.100</b>	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	797.340.100	
<b>2.08.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>60.000.000</b>	
<b>2.08.05.2.01</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>60.000.000</b>	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000	
<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>500.068.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.08.07.2.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>117.500.000</b>	
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	117.500.000	
<b>2.08.07.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>382.568.000</b>	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96.810.000	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	125.000.000	
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	105.758.000	
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	55.000.000	
<b>2.09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>14.579.504.948</b>	
<b>2.09.3.27.3.25.02.0000</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</b>	<b>14.579.504.948</b>	
<b>2.09.3.27.3.25.02.0000</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</b>	<b>14.579.504.948</b>	
<b>2.09.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>13.586.104.948</b>	
<b>2.09.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>166.086.936</b>	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	153.136.936	
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.150.000	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.800.000	
<b>2.09.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.585.584.332</b>	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.449.004.948	
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	136.579.384	
<b>2.09.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>44.260.000</b>	
2.09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44.260.000	
<b>2.09.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>491.239.000</b>	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.711.000	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.780.000	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	382.948.000	
<b>2.09.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>85.940.000</b>	
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.940.000	
<b>2.09.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.013.824.000</b>	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	561.325.000	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	206.488.000	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	246.011.000	
<b>2.09.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>199.170.680</b>	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.614.400	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.258.000	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.298.280	
<b>2.09.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>903.400.000</b>	
<b>2.09.03.2.01</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>160.500.000</b>	
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	120.500.000	
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	40.000.000	
<b>2.09.03.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>742.900.000</b>	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	100.000.000	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	642.900.000	
<b>2.09.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>90.000.000</b>	
<b>2.09.05.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>90.000.000</b>	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>1.03.1.04.2.10.10.0000</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>1.03.1.04.2.10.10.0000</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>2.10.08</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>2.10.08.2.02</b>	<b>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>	<b>100.000.000</b>	
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	100.000.000	
<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>160.673.336.011</b>	
<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>160.673.336.011</b>	
<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>149.462.540.311</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>113.747.274.311</b>	
<b>2.11.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>265.000.000</b>	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	115.500.000	
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.500.000	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	137.000.000	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
<b>2.11.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>83.759.765.011</b>	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	83.534.765.011	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	225.000.000	
<b>2.11.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>649.440.000</b>	
2.11.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	649.440.000	
<b>2.11.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1.150.000.000</b>	
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.050.000.000	
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	
<b>2.11.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.209.872.500</b>	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	125.000.000	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	261.617.500	
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	257.050.000	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.391.205.000	
<b>2.11.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>275.000.000</b>	
2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	275.000.000	
<b>2.11.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>9.721.259.800</b>	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350.500.000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.075.199.800	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	295.560.000	
<b>2.11.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>15.716.937.000</b>	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.146.937.000	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.055.000.000	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	365.000.000	
2.11.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	
<b>2.11.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>375.000.000</b>	
<b>2.11.02.2.01</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>375.000.000</b>	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	375.000.000	
<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>216.200.000</b>	
<b>2.11.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>135.800.000</b>	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	95.800.000	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	40.000.000	
<b>2.11.03.2.02</b>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>80.400.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	80.400.000	
<b>2.11.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>22.550.000.000</b>	
<b>2.11.04.2.01</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>22.550.000.000</b>	
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1.350.000.000	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	21.200.000.000	
<b>2.11.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>65.000.000</b>	
<b>2.11.05.2.01</b>	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>65.000.000</b>	
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	65.000.000	
<b>2.11.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>575.000.000</b>	
<b>2.11.06.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>575.000.000</b>	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	250.000.000	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	225.000.000	
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	100.000.000	
<b>2.11.08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>375.000.000</b>	
<b>2.11.08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>375.000.000</b>	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	325.000.000	
<b>2.11.09</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>225.000.000</b>	
<b>2.11.09.2.01</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>225.000.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	225.000.000	
<b>2.11.10</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>2.11.10.2.01</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	100.000.000	
<b>2.11.11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>11.234.066.000</b>	
<b>2.11.11.2.01</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>11.234.066.000</b>	
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	25.000.000	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	160.000.000	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	10.524.066.000	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	525.000.000	
<b>2.11.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>UPT Laboratorium Lingkungan</b>	<b>783.800.000</b>	
<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>783.800.000</b>	
<b>2.11.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>783.800.000</b>	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	783.800.000	
<b>2.11.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>UPT Pengelolaan Sampah</b>	<b>6.926.995.700</b>	
<b>2.11.11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>6.926.995.700</b>	
<b>2.11.11.2.01</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>6.926.995.700</b>	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.926.995.700	
<b>2.11.0.00.0.00.01.0003</b>	<b>UPT Pengelolaan Pemakaman Umum</b>	<b>500.000.000</b>	
<b>2.11.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>500.000.000</b>	
<b>2.11.04.2.01</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>500.000.000</b>	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	500.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.0.00.0.00.01.0004	UPT Pengelolaan Taman	3.000.000.000	
2.11.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	3.000.000.000	
2.11.04.2.01	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	3.000.000.000	
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	3.000.000.000	
2.12	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	15.249.353.735	
2.12.0.00.0.00.01.0000	<b>Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	15.249.353.735	
2.12.0.00.0.00.01.0000	<b>Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	15.249.353.735	
2.12.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	11.935.984.835	
2.12.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	165.000.000	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95.000.000	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000	
2.12.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	9.097.353.735	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.949.353.735	
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	148.000.000	
2.12.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	261.822.000	
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	261.822.000	
2.12.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	847.660.000	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.400.000	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	330.000.000	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	113.289.000	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	374.011.000	
2.12.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	806.715.500	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	806.715.500	
2.12.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	434.946.600	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	125.796.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.960.000	
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.873.100	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.317.500	
<b>2.12.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>322.487.000</b>	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	283.987.000	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.500.000	
<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>1.351.152.000</b>	
<b>2.12.02.2.01</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>1.351.152.000</b>	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.217.124.000	
2.12.02.2.01.08	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	134.028.000	
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>1.635.122.000</b>	
<b>2.12.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>1.635.122.000</b>	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	1.560.122.000	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	75.000.000	
<b>2.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>266.594.900</b>	
<b>2.12.04.2.01</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>250.094.900</b>	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	250.094.900	
<b>2.12.04.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>16.500.000</b>	
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	16.500.000	
<b>2.12.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>60.500.000</b>	
<b>2.12.05.2.01</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>60.500.000</b>	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	60.500.000	
<b>2.14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>3.679.300.000</b>	
<b>1.06.2.08.2.14.06.0000</b>	<b>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>3.679.300.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.2.08.2.14.06.0000	<b>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>3.679.300.000</b>	
2.14.02	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>275.000.000</b>	
2.14.02.2.01	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>70.000.000</b>	
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	70.000.000	
2.14.02.2.02	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>205.000.000</b>	
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	85.000.000	
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	55.000.000	
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	65.000.000	
2.14.03	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>480.000.000</b>	
2.14.03.2.02	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>250.000.000</b>	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	250.000.000	
2.14.03.2.04	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>230.000.000</b>	
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	230.000.000	
2.14.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>2.924.300.000</b>	
2.14.04.2.01	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>600.000.000</b>	
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	200.000.000	
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	400.000.000	
2.14.04.2.02	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>2.324.300.000</b>	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.724.300.000	
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	600.000.000	
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>54.062.905.418</b>	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>54.062.905.418</b>	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>50.744.420.418</b>	
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>23.305.639.486</b>	
<b>2.15.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>103.692.000</b>	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.980.000	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.712.000	
<b>2.15.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>18.072.647.437</b>	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.010.418.437	
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.620.000	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.609.000	
<b>2.15.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>73.740.453</b>	
2.15.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	48.046.453	
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.694.000	
<b>2.15.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>62.080.000</b>	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	62.080.000	
<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.124.735.160</b>	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.277.500	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.571.760	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.640.000	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	134.674.300	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.390.000	
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	141.941.600	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	679.240.000	
<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.012.816.736</b>	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	178.376.336	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.575.640.000	
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.665.000	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	188.135.400	
<b>2.15.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.855.927.700</b>	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.620.867.700	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	235.060.000	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>27.438.780.932</b>	
<b>2.15.02.2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>109.690.000</b>	
2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	109.690.000	
<b>2.15.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>8.910.896.350</b>	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6.822.123.950	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.088.772.400	
<b>2.15.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>14.414.980.000</b>	
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	13.829.831.500	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	585.148.500	
<b>2.15.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>2.543.729.250</b>	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.096.227.600	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	201.610.700	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	890.231.050	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	355.659.900	
<b>2.15.02.2.08</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>338.730.000</b>	
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	150.950.000	
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	187.780.000	
<b>2.15.02.2.09</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>964.787.332</b>	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	964.787.332	
<b>2.15.02.2.11</b>	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>155.968.000</b>	
2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	155.968.000	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan</b>	<b>3.318.485.000</b>	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>3.318.485.000</b>	
<b>2.15.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>745.080.000</b>	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	745.080.000	
<b>2.15.02.2.05</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>2.573.405.000</b>	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.394.741.400	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	439.920.000	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	738.743.600	
<b>2.16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>26.474.625.202</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>26.474.625.202</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>26.474.625.202</b>	
<b>2.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.354.694.730</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.16.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>150.000.000</b>	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	
<b>2.16.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.884.500.372</b>	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.758.950.572	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	125.549.800	
<b>2.16.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100.000.000</b>	
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000	
<b>2.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>983.548.808</b>	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.000.000	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	115.000.000	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	662.548.808	
<b>2.16.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100.000.000</b>	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	
<b>2.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>500.000.000</b>	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.000.000	
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>636.645.550</b>	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	430.805.550	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.840.000	
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>4.573.073.009</b>	
<b>2.16.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.573.073.009</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	472.800.000	
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	797.745.000	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2.119.718.301	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	574.110.000	
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	608.699.708	
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>11.546.857.463</b>	
<b>2.16.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.301.365.463</b>	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	9.301.365.463	
<b>2.16.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.245.492.000</b>	
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	175.200.145	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	180.200.500	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	100.000.000	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1.542.491.355	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	247.600.000	
<b>2.17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>53.427.585.140</b>	
<b>2.17.3.31.3.30.07.0000</b>	<b>Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>53.427.585.140</b>	
<b>2.17.3.31.3.30.07.0000</b>	<b>Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>53.427.585.140</b>	
<b>2.17.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>45.106.055.640</b>	
<b>2.17.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>195.000.000</b>	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.000.000	
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.000.000	
<b>2.17.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>37.154.654.140</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.127.004.140	
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.650.000	
<b>2.17.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	
2.17.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	
<b>2.17.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>217.718.000</b>	
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	217.718.000	
<b>2.17.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.474.323.000</b>	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	650.000.000	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	336.200.000	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.408.123.000	
<b>2.17.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>414.441.000</b>	
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	414.441.000	
<b>2.17.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.632.898.000</b>	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	925.611.000	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	457.200.000	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	250.087.000	
<b>2.17.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.007.021.500</b>	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.421.709.000	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.525.312.500	
<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>344.847.600</b>	
<b>2.17.03.2.01</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>344.847.600</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	168.938.800	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	175.908.800	
<b>2.17.04</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>223.040.000</b>	
<b>2.17.04.2.01</b>	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>223.040.000</b>	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	223.040.000	
<b>2.17.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>545.592.225</b>	
<b>2.17.05.2.01</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>545.592.225</b>	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	545.592.225	
<b>2.17.06</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>1.189.393.325</b>	
<b>2.17.06.2.01</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.189.393.325</b>	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.189.393.325	
<b>2.17.07</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>3.034.654.750</b>	
<b>2.17.07.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>3.034.654.750</b>	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	412.777.100	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	123.696.200	
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	220.449.600	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.214.746.250	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	62.985.600	
<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>2.984.001.600</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.17.08.2.01</b>	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>2.984.001.600</b>	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2.984.001.600	
<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.910.946.450</b>	
<b>2.07.2.18.0.00.02.0000</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>1.910.946.450</b>	
<b>2.07.2.18.0.00.02.0000</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>1.910.946.450</b>	
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>2.18.02.2.01</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100.000.000	
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>110.000.000</b>	
<b>2.18.03.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>110.000.000</b>	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000	
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.347.246.450</b>	
<b>2.18.04.2.01</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>1.347.246.450</b>	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.292.996.450	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	2.000.000	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	52.250.000	
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>156.700.000</b>	
<b>2.18.05.2.01</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>156.700.000</b>	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	13.800.000	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	78.800.000	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	64.100.000	
<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>197.000.000</b>	
<b>2.18.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>197.000.000</b>	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	197.000.000	
<b>2.19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>32.556.386.212</b>	
<b>2.19.3.26.0.00.02.0000</b>	<b>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</b>	<b>32.556.386.212</b>	
<b>2.19.3.26.0.00.02.0000</b>	<b>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</b>	<b>32.556.386.212</b>	
<b>2.19.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>17.761.921.132</b>	
<b>2.19.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>307.000.000</b>	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	165.800.000	
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.200.000	
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.000.000	
<b>2.19.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12.272.431.212</b>	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.176.181.212	
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	96.250.000	
<b>2.19.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>208.000.000</b>	
2.19.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	208.000.000	
<b>2.19.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.030.281.500</b>	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.562.000	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	196.099.500	
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	34.450.000	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.755.170.000	
<b>2.19.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>50.000.000</b>	
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.19.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.133.628.120</b>	
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	174.860.000	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.120.116.620	
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	838.651.500	
<b>2.19.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>760.580.300</b>	
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	378.330.300	
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.600.000	
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	313.650.000	
<b>2.19.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>1.944.235.000</b>	
<b>2.19.02.2.01</b>	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>1.719.054.000</b>	
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	76.125.000	
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	176.685.000	
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	125.000.000	
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	128.570.000	
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	99.000.000	
2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	232.864.000	
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	36.550.000	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	844.260.000	
<b>2.19.02.2.02</b>	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>225.181.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	225.181.000	
<b>2.19.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>12.350.230.080</b>	
<b>2.19.03.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.650.000.000</b>	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	900.000.000	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	750.000.000	
<b>2.19.03.2.03</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>250.000.000</b>	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	250.000.000	
<b>2.19.03.2.04</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>10.000.000.000</b>	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	10.000.000.000	
<b>2.19.03.2.05</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>450.230.080</b>	
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	50.000.000	
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	350.230.080	
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	50.000.000	
<b>2.19.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>500.000.000</b>	
<b>2.19.04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>500.000.000</b>	
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	500.000.000	
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>936.980.000</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>936.980.000</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>936.980.000</b>	
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>936.980.000</b>	
<b>2.20.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>936.980.000</b>	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	264.360.000	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	178.200.000	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	71.120.000	
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	248.040.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	99.260.000	
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	76.000.000	
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>454.520.370</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>454.520.370</b>	
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>454.520.370</b>	
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>454.520.370</b>	
<b>2.21.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>331.636.000</b>	
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	66.000.000	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	67.860.000	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	120.916.000	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	76.860.000	
<b>2.21.02.2.02</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>122.884.370</b>	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	122.884.370	
<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>1.750.000.000</b>	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>1.750.000.000</b>	
<b>1.01.2.22.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>1.750.000.000</b>	
<b>2.22.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>682.290.000</b>	
<b>2.22.02.2.02</b>	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>565.290.000</b>	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	206.240.000	
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	359.050.000	
<b>2.22.02.2.03</b>	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>117.000.000</b>	
2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	117.000.000	
<b>2.22.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>144.050.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.22.03.2.01</b>	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>144.050.000</b>	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	75.000.000	
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	69.050.000	
<b>2.22.04</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>54.050.000</b>	
<b>2.22.04.2.01</b>	<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>54.050.000</b>	
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	54.050.000	
<b>2.22.05</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>565.670.000</b>	
<b>2.22.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>565.670.000</b>	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	565.670.000	
<b>2.22.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>303.940.000</b>	
<b>2.22.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>	<b>303.940.000</b>	
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	194.890.000	
2.22.06.2.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	109.050.000	
<b>2.23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>12.536.142.424</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.02.0000</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>	<b>12.536.142.424</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.02.0000</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>	<b>12.536.142.424</b>	
<b>2.23.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.298.917.424</b>	
<b>2.23.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>178.000.000</b>	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.000.000	
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.000.000	
<b>2.23.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.183.047.424</b>	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.121.047.424	
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	62.000.000	
<b>2.23.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>50.000.000</b>	
2.23.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	
<b>2.23.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>20.000.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	
<b>2.23.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>505.750.000</b>	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.250.000	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.500.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	
<b>2.23.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>240.000.000</b>	
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	240.000.000	
<b>2.23.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>579.700.000</b>	
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.500.000	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	302.200.000	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.000.000	
<b>2.23.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>542.420.000</b>	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	330.000.000	
2.23.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.420.000	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000	
2.23.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	40.000.000	
<b>2.23.02</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>1.987.225.000</b>	
<b>2.23.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.662.225.000</b>	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	75.000.000	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	87.225.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	25.000.000	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	25.000.000	
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	275.000.000	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	150.000.000	
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
<b>2.23.02.2.02</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>325.000.000</b>	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	150.000.000	
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	50.000.000	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	50.000.000	
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
<b>2.23.03</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>250.000.000</b>	
<b>2.23.03.2.01</b>	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>	
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	50.000.000	
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	50.000.000	
<b>2.23.03.2.02</b>	<b>Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>150.000.000</b>	
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	75.000.000	
2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	75.000.000	
<b>2.24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	<b>5.172.130.000</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.02.0000</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>	<b>5.172.130.000</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.02.0000</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>	<b>5.172.130.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.24.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.000.000.000</b>	
<b>2.24.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>5.000.000.000</b>	
2.24.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000.000	
<b>2.24.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>172.130.000</b>	
<b>2.24.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>171.130.000</b>	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	79.630.000	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	91.500.000	
<b>2.24.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>1.000.000</b>	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	1.000.000	
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		
<b>3.25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>1.786.660.000</b>	
<b>2.09.3.27.3.25.02.0000</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</b>	<b>1.786.660.000</b>	
<b>2.09.3.27.3.25.02.0000</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</b>	<b>1.786.660.000</b>	
<b>3.25.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>1.706.660.000</b>	
<b>3.25.04.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>1.307.820.000</b>	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1.307.820.000	
<b>3.25.04.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>398.840.000</b>	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	398.840.000	
<b>3.25.06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>80.000.000</b>	
<b>3.25.06.2.02</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>80.000.000</b>	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	80.000.000	
<b>3.26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>6.192.380.000</b>	
<b>2.19.3.26.0.00.02.0000</b>	<b>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</b>	<b>6.192.380.000</b>	
<b>2.19.3.26.0.00.02.0000</b>	<b>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</b>	<b>6.192.380.000</b>	
<b>3.26.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>3.579.880.000</b>	
<b>3.26.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100.000.000	
<b>3.26.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>3.388.905.000</b>	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	104.460.000	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.500.000.000	
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	402.445.000	
3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	382.000.000	
<b>3.26.02.2.04</b>	<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>90.975.000</b>	
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	90.975.000	
<b>3.26.03</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>159.000.000</b>	
<b>3.26.03.2.01</b>	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>159.000.000</b>	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	159.000.000	
<b>3.26.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>50.000.000</b>	
<b>3.26.04.2.02</b>	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	<b>50.000.000</b>	
3.26.04.2.02.08	Perlindungan Hasil Kreativitas	50.000.000	
<b>3.26.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>2.403.500.000</b>	
<b>3.26.05.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>2.403.500.000</b>	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1.597.500.000	
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	806.000.000	
<b>3.27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>800.000.000</b>	
<b>2.09.3.27.3.25.02.0000</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</b>	<b>800.000.000</b>	
<b>2.09.3.27.3.25.02.0000</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</b>	<b>800.000.000</b>	
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>258.750.000</b>	
<b>3.27.02.2.01</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>183.750.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	58.750.000	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	125.000.000	
<b>3.27.02.2.05</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>75.000.000</b>	
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	75.000.000	
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>200.000.000</b>	
<b>3.27.03.2.01</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>200.000.000</b>	
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	200.000.000	
<b>3.27.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>275.000.000</b>	
<b>3.27.04.2.01</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>123.000.000</b>	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	123.000.000	
<b>3.27.04.2.04</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>152.000.000</b>	
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	25.910.000	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	126.090.000	
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>66.250.000</b>	
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>66.250.000</b>	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	43.810.000	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	22.440.000	
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>63.580.046.000</b>	
<b>2.17.3.31.3.30.07.0000</b>	<b>Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>63.580.046.000</b>	
<b>2.17.3.31.3.30.07.0000</b>	<b>Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>57.167.000.000</b>	
<b>3.30.02</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>205.000.000</b>	
<b>3.30.02.2.02</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>65.000.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	65.000.000	
<b>3.30.02.2.03</b>	<b>Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri</b>	<b>90.000.000</b>	
3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	90.000.000	
<b>3.30.02.2.05</b>	<b>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</b>	<b>50.000.000</b>	
3.30.02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	50.000.000	
<b>3.30.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>55.535.000.000</b>	
<b>3.30.03.2.01</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>55.104.522.000</b>	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	55.104.522.000	
<b>3.30.03.2.02</b>	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>430.478.000</b>	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100.000.000	
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	330.478.000	
<b>3.30.04</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>302.000.000</b>	
<b>3.30.04.2.02</b>	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>302.000.000</b>	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	226.000.000	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	76.000.000	
<b>3.30.07</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>1.125.000.000</b>	
<b>3.30.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>1.125.000.000</b>	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1.000.000.000	
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	125.000.000	
<b>2.17.3.31.3.30.07.0001</b>	<b>UPT Metrologi Legal</b>	<b>763.046.000</b>	
<b>3.30.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>763.046.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>3.30.06.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>763.046.000</b>	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	663.046.000	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	100.000.000	
<b>2.17.3.31.3.30.07.0002</b>	<b>UPT Pasar</b>	<b>5.650.000.000</b>	
<b>3.30.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>5.650.000.000</b>	
<b>3.30.03.2.01</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>5.650.000.000</b>	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.650.000.000	
<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>5.328.798.000</b>	
<b>2.17.3.31.3.30.07.0000</b>	<b>Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>5.328.798.000</b>	
<b>2.17.3.31.3.30.07.0000</b>	<b>Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>5.328.798.000</b>	
<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>5.128.798.000</b>	
<b>3.31.02.2.01</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>5.128.798.000</b>	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.800.000.000	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.300.000.000	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.878.798.000	
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	150.000.000	
<b>3.31.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>3.31.03.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>	
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	100.000.000	
<b>3.31.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>3.31.04.2.01</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	100.000.000	
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>75.677.745.850</b>	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>75.677.745.850</b>	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>Bagian Pemerintahan</b>	<b>2.398.474.000</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15.000.000</b>	
<b>4.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.000.000</b>	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>2.383.474.000</b>	
<b>4.01.02.2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>2.208.474.000</b>	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	140.000.000	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1.133.474.000	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	935.000.000	
<b>4.01.02.2.04</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>175.000.000</b>	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	175.000.000	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan</b>	<b>10.163.600.000</b>	
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>10.163.600.000</b>	
<b>4.01.02.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>10.163.600.000</b>	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.144.000.000	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	2.580.000.000	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	3.439.600.000	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0003</b>	<b>Bagian Hukum</b>	<b>5.108.369.000</b>	
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>5.108.369.000</b>	
<b>4.01.02.2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>5.108.369.000</b>	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1.760.000.000	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.809.475.000	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1.538.894.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>4.01.0.00.0.00.01.0004</b>	<b>Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam</b>	<b>1.026.424.000</b>	
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>1.026.424.000</b>	
<b>4.01.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>826.424.000</b>	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	85.321.700	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	741.102.300	
<b>4.01.03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>100.000.000</b>	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100.000.000	
<b>4.01.03.2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>100.000.000</b>	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	100.000.000	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0005</b>	<b>Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa</b>	<b>1.549.897.000</b>	
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>1.549.897.000</b>	
<b>4.01.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>1.549.897.000</b>	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	550.000.000	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	150.000.000	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	849.897.000	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0006</b>	<b>Bagian Organisasi</b>	<b>1.659.501.000</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.659.501.000</b>	
<b>4.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>109.845.400</b>	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	109.845.400	
<b>4.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>1.549.655.600</b>	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	426.563.000	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	57.989.000	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	642.065.100	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	341.768.500	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	81.270.000	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0007</b>	<b>Bagian Hubungan Masyarakat</b>	<b>10.865.261.000</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.865.261.000</b>	
<b>4.01.01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>10.865.261.000</b>	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	329.000.000	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	9.657.941.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	878.320.000	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0008</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>42.906.219.850</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>42.906.219.850</b>	
<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>29.873.120.000</b>	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.500.000.000	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	373.120.000	
<b>4.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>475.840.000</b>	
4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	270.000.000	
4.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	155.840.000	
<b>4.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>150.000.000</b>	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000	
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.974.200.000</b>	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350.000.000	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.000.000	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	175.000.000	
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.529.200.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000	
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>800.000.000</b>	
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	100.000.000	
4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.518.820.000</b>	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.000.000.000	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	800.000.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.518.820.000	
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.278.959.850</b>	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	358.399.850	
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	50.000.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	270.560.000	
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	
<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>800.000.000</b>	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	
<b>4.01.01.2.12</b>	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>2.035.280.000</b>	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.000.000.000	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	800.000.000	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	235.280.000	
<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>104.216.126.961</b>	
<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>104.216.126.961</b>	
<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>104.216.126.961</b>	
<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>70.216.126.961</b>	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>4.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>330.558.000</b>	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.558.000	
<b>4.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.249.708.611</b>	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.118.756.611	
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	110.042.000	
4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.910.000	
<b>4.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>9.435.000.000</b>	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.000.000	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	195.000.000	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81.000.000	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	155.000.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.699.000.000	
<b>4.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.955.290.200</b>	
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.955.290.200	
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.450.000.000</b>	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	950.000.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.500.000.000	
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.865.000.000</b>	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.250.000.000	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.000.000	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.500.000.000	
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>41.680.570.150</b>	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	41.097.370.350	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	396.930.000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	186.269.800	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>2.250.000.000</b>	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.250.000.000	
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>34.000.000.000</b>	
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>7.573.004.000</b>	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	219.110.000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5.002.150.000	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	2.351.744.000	
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>1.314.660.000</b>	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	219.110.000	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	219.110.000	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	219.110.000	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	219.110.000	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	219.110.000	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	219.110.000	
<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>8.050.576.000</b>	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1.946.610.500	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.946.610.500	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.946.610.500	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.991.634.500	
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	219.110.000	
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>4.200.397.593</b>	
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	1.445.637.593	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.522.450.000	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	353.640.000	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	572.120.000	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	306.550.000	
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>1.650.000.000</b>	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.650.000.000	
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>11.211.362.407</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.625.362.407	
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	216.000.000	
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	70.000.000	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	7.300.000.000	
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>	<b>14.875.878.233</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>14.875.878.233</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>14.875.878.233</b>	
<b>5.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.311.372.233</b>	
<b>5.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>199.960.000</b>	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	149.150.000	
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	44.411.000	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.399.000	
<b>5.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.970.018.233</b>	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.933.188.233	
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.090.000	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.740.000	
<b>5.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>121.480.000</b>	
5.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	48.420.000	
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	73.060.000	
<b>5.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>50.000.000</b>	
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	
<b>5.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.166.348.800</b>	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	203.004.000	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.443.400	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	879.301.400	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>5.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>189.420.000</b>	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	189.420.000	
<b>5.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>346.030.800</b>	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.416.800	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153.614.000	
<b>5.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>268.114.400</b>	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	197.029.100	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.325.500	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.759.800	
<b>5.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.768.672.400</b>	
<b>5.01.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>1.418.672.400</b>	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	98.310.000	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	132.089.400	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	157.439.400	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.030.833.600	
<b>5.01.02.2.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>150.000.000</b>	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	150.000.000	
<b>5.01.02.2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>200.000.000</b>	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	200.000.000	
<b>5.01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>2.795.833.600</b>	
<b>5.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>820.000.000</b>	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	300.000.000	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	170.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	90.000.000	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	200.000.000	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	60.000.000	
<b>5.01.03.2.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>613.823.600</b>	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	215.630.000	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	92.321.200	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	155.351.200	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	74.464.000	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	46.057.200	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	30.000.000	
<b>5.01.03.2.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>1.362.010.000</b>	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.030.000	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	93.500.000	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	200.000.000	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	55.480.000	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	270.000.000	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	600.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	43.000.000	
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>130.899.524.202</b>	
<b>5.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>56.601.162.351</b>	
<b>5.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>56.601.162.351</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>26.302.987.647</b>	
<b>5.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>238.698.500</b>	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	143.970.000	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.114.000	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.614.500	
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>21.471.076.847</b>	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.393.411.847	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.665.000	
<b>5.02.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>104.130.000</b>	
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	73.490.000	
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.640.000	
<b>5.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>366.352.000</b>	
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64.640.000	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	301.712.000	
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.358.272.400</b>	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.600.000	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	625.098.000	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.332.800	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	126.545.000	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.400.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.488.296.600	
<b>5.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>598.179.900</b>	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	574.020.900	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.159.000	
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>830.171.900</b>	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	394.246.400	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.521.900	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.220.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	227.183.600	
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>336.106.100</b>	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	336.106.100	
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>24.201.978.204</b>	
<b>5.02.02.2.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1.599.115.200</b>	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	210.446.200	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	113.120.000	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	143.300.300	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	143.300.300	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	286.101.400	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	130.395.000	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	258.870.000	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	313.582.000	
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>1.097.773.100</b>	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	859.200.000	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	121.804.000	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	51.460.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	65.309.100	
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>582.042.600</b>	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	397.307.600	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	77.890.000	
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	58.445.000	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	48.400.000	
<b>5.02.02.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>20.707.750.504</b>	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	20.707.750.504	
<b>5.02.02.2.05</b>	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>215.296.800</b>	
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	47.836.800	
5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	167.460.000	
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>6.096.196.500</b>	
<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>6.096.196.500</b>	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	41.000.000	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	44.812.000	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	33.400.000	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	345.208.000	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	192.196.000	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	4.149.515.000	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	637.181.700	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	122.368.000	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	386.603.200	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	69.316.800	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	43.670.000	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	30.925.800	
<b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>74.298.361.851</b>	
<b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>74.298.361.851</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>62.994.574.151</b>	
<b>5.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>429.202.400</b>	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	222.694.200	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	206.508.200	
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>56.108.889.851</b>	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55.852.449.851	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	256.440.000	
<b>5.02.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>156.900.000</b>	
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	156.900.000	
<b>5.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>604.686.000</b>	
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	604.686.000	
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.655.511.800</b>	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.329.500	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	471.717.500	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	371.955.500	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.273.277.600	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.282.500	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.047.200	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	409.902.000	
<b>5.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>940.020.000</b>	
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	940.020.000	
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.222.792.100</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	159.340.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	888.667.700	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.784.400	
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>876.572.000</b>	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	593.850.000	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	282.722.000	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>11.303.787.700</b>	
<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>11.303.787.700</b>	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	413.150.000	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.260.564.000	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.272.110.000	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	492.320.000	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.788.020.000	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	2.076.733.700	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1.098.590.000	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	974.910.000	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	43.010.000	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	344.010.000	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	540.370.000	
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>13.090.696.587</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia</b>	<b>13.090.696.587</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia</b>	<b>13.090.696.587</b>	
<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.731.560.066</b>	
<b>5.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>293.450.544</b>	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	242.380.000	
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	646.800	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	702.464	
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.721.280	
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.870.478.386</b>	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.865.163.481	
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.910.291	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.404.614	
<b>5.03.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>55.622.840</b>	
5.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.832.800	
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.790.040	
<b>5.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>72.676.800</b>	
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	72.676.800	
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.295.806.989</b>	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	191.526.496	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.942.944	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	141.789.536	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.198.720	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	932.349.293	
<b>5.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>629.432.332</b>	
5.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000	
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	229.432.332	
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>192.381.524</b>	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.352.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.349.254	
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.251.520	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.428.750	
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>321.710.651</b>	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	195.091.187	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.619.464	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000	
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>2.359.136.521</b>	
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>828.763.729</b>	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	70.979.332	
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	241.475.920	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	116.484.000	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	234.702.317	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	165.122.160	
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>406.769.500</b>	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	106.769.500	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	300.000.000	
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>501.767.724</b>	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	182.654.000	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	141.330.000	
5.03.02.2.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	87.274.912	
5.03.02.2.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	48.180.048	
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	42.328.764	
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>621.835.568</b>	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	79.387.800	
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	73.150.728	
5.03.02.2.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	113.119.440	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	356.177.600	
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>1.730.397.986</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia</b>	<b>1.730.397.986</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia</b>	<b>1.730.397.986</b>	
<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>1.730.397.986</b>	
<b>5.04.02.2.01</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>682.836.864</b>	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	682.836.864	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Pemerintahan Umum		
<b>5.04.02.2.02</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>1.047.561.122</b>	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.047.561.122	
<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>2.057.310.000</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>2.057.310.000</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>2.057.310.000</b>	
<b>5.05.02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>2.057.310.000</b>	
<b>5.05.02.2.01</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>1.252.280.000</b>	
5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1.252.280.000	
<b>5.05.02.2.02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>173.000.000</b>	
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	173.000.000	
<b>5.05.02.2.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>485.030.000</b>	
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	376.000.000	
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	109.030.000	
<b>5.05.02.2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>147.000.000</b>	
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	72.000.000	
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	75.000.000	
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>15.000.000.000</b>	
<b>6.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>15.000.000.000</b>	
<b>6.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>15.000.000.000</b>	
<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12.047.500.000</b>	
<b>6.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>130.000.000</b>	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	115.000.000	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>6.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.758.607.752</b>	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.723.607.752	
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	35.000.000	
<b>6.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>468.892.248</b>	
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.000.000	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	418.892.248	
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>910.000.000</b>	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127.000.000	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.000.000	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	115.000.000	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	565.000.000	
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>270.000.000</b>	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	115.000.000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.000.000	
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>510.000.000</b>	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	450.000.000	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>2.540.000.000</b>	
<b>6.01.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>1.620.000.000</b>	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	800.000.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	100.000.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	60.000.000	
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	600.000.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	60.000.000	
<b>6.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>920.000.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	120.000.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	800.000.000	
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>412.500.000</b>	
<b>6.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>52.500.000</b>	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	52.500.000	
<b>6.01.03.2.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>360.000.000</b>	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40.000.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	290.000.000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	30.000.000	
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>		
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>244.527.759.316</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Kecamatan Klojen</b>	<b>42.021.894.620</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Kecamatan Klojen</b>	<b>19.472.794.540</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>19.079.794.540</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>47.117.800</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.650.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.118.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	349.800	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>18.083.403.980</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.956.802.620	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	126.601.360	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>12.600.000</b>	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.600.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>359.360.700</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.710.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.120.400	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.170.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.535.200	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.800.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	93.294.700	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.730.400	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>65.000.000</b>	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	10.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>295.975.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	975.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.000.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>216.337.060</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.500.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.837.060	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>18.500.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>15.000.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.000.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>3.500.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3.500.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>254.500.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>123.500.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	29.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	69.000.000	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	25.500.000	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>131.000.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	131.000.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>62.000.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>62.000.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	62.000.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>58.000.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>58.000.000</b>	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	58.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>Kelurahan Klojen</b>	<b>1.673.750.920</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>445.675.920</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>425.675.920</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	425.675.920	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>20.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	20.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.198.075.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>825.175.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	411.175.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	398.000.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>372.900.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	372.900.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>30.000.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>30.000.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0003</b>	<b>Kelurahan Rampalcelaket</b>	<b>1.753.650.920</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>420.360.920</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>416.890.920</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	416.890.920	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>3.470.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3.470.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.295.560.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>865.130.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.300.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	501.850.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	342.980.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>430.430.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	430.430.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>37.730.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>37.730.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	37.730.000	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0004</b>	<b>Kelurahan Samaan</b>	<b>1.988.338.920</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>405.774.920</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>325.774.920</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	325.774.920	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>80.000.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	80.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.557.280.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>938.990.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	596.490.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	331.500.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>618.290.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	618.290.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>25.284.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>25.284.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.284.000	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0005</b>	<b>Kelurahan Kiduldalem</b>	<b>1.726.237.960</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>412.332.960</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>403.832.960</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	403.832.960	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>8.500.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	8.500.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.278.905.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>803.905.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30.800.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	439.105.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	334.000.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>475.000.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	475.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>35.000.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>35.000.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0006</b>	<b>Kelurahan Sukoharjo</b>	<b>1.941.036.920</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>419.761.920</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>401.011.920</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	401.011.920	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>18.750.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	18.750.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.481.625.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>939.225.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	341.625.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	582.600.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>542.400.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	542.400.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>39.650.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>39.650.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	39.650.000	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0007</b>	<b>Kelurahan Kasin</b>	<b>2.530.842.920</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>422.842.920</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>412.842.920</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	412.842.920	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>10.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	10.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.075.750.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.205.500.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	22.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	637.500.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	546.000.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>870.250.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	870.250.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>32.250.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>32.250.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32.250.000	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0008</b>	<b>Kelurahan Kauman</b>	<b>2.311.923.920</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>412.468.920</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>410.468.920</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	410.468.920	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>2.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.868.305.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.234.305.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.500.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	552.405.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	666.400.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>634.000.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	634.000.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>31.150.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>31.150.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	31.150.000	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0009</b>	<b>Kelurahan Oro-Oro Dowo</b>	<b>2.259.970.840</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>495.360.840</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>480.360.840</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	480.360.840	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>15.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	15.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.725.310.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>971.040.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.500.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	610.270.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	343.270.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>754.270.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	754.270.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>39.300.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>39.300.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	39.300.000	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0010</b>	<b>Kelurahan Bareng</b>	<b>2.598.032.920</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>377.658.120</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>375.658.120</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	375.658.120	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>2.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.166.660.400</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.468.525.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	891.525.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	562.000.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>698.135.400</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	698.135.400	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>53.714.400</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>53.714.400</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	53.714.400	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0011</b>	<b>Kelurahan Gadingkasri</b>	<b>1.874.641.920</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>500.673.520</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>485.673.520</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	485.673.520	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>15.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	15.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.331.968.400</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>883.168.400</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	440.318.400	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	427.850.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>448.800.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	448.800.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>42.000.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>42.000.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	42.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0012</b>	<b>Kelurahan Penanggung</b>	<b>1.890.671.920</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>466.853.120</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>459.878.120</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	459.878.120	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>6.975.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6.975.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.388.118.800</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>983.928.800</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.900.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	558.650.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	414.378.800	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>404.190.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	404.190.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>35.700.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>35.700.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.700.000	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Kecamatan Blimbing</b>	<b>48.607.752.654</b>	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Kecamatan Blimbing</b>	<b>20.456.145.154</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>19.936.145.154</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>39.200.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.200.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>19.048.985.154</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.990.802.154	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	58.183.000	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>62.400.000</b>	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	62.400.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>50.000.000</b>	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>292.712.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.212.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.000.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>70.000.000</b>	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>233.848.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.848.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.000.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>139.000.000</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>85.000.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>40.000.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.000.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>45.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	45.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>335.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>135.000.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35.000.000	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	50.000.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>200.000.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>50.000.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>50.000.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>50.000.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>50.000.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0002</b>	<b>Kelurahan Blimbing</b>	<b>1.897.292.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>458.170.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>450.170.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	450.170.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>8.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	8.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.416.373.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.014.373.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	354.830.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	644.543.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>402.000.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	402.000.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>22.749.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>22.749.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	22.749.000	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0003</b>	<b>Kelurahan Polowijen</b>	<b>1.791.084.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>491.884.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>488.884.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	488.884.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>3.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.267.200.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>817.200.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	407.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	400.200.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>450.000.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	450.000.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>32.000.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>32.000.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0004</b>	<b>Kelurahan Arjosari</b>	<b>1.761.130.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>400.250.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>400.000.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	400.000.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>250.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	250.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.320.880.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>942.980.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	430.930.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	497.050.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>377.900.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	377.900.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>40.000.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>40.000.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0005</b>	<b>Kelurahan Purwodadi</b>	<b>2.357.693.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>455.421.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>429.671.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	429.671.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>25.750.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	25.750.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.872.209.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.110.561.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13.500.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	430.709.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	666.352.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>761.648.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	761.648.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>30.063.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>30.063.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.063.000	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0006</b>	<b>Kelurahan Pandanwangi</b>	<b>3.138.980.500</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>358.880.500</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>350.880.500</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	350.880.500	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>8.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	8.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.758.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.562.200.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	618.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	934.200.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>1.195.800.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.195.800.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>22.100.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>22.100.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	22.100.000	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0007</b>	<b>Kelurahan Purwantoro</b>	<b>3.687.781.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>490.000.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>475.000.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	475.000.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>15.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	15.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>3.162.781.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.812.781.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	24.500.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	573.281.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.215.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>1.350.000.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.350.000.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>35.000.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>35.000.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0008</b>	<b>Kelurahan Bunulrejo</b>	<b>3.518.462.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>459.000.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>450.000.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	450.000.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>9.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	9.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>3.029.462.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.610.262.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	844.562.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	754.700.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>1.419.200.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.419.200.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>30.000.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>30.000.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0009</b>	<b>Kelurahan Kesatrian</b>	<b>2.042.807.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>422.450.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>408.450.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	408.450.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>14.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	14.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.598.757.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>888.757.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.300.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	424.050.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	449.407.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>710.000.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	710.000.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>21.600.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>21.600.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21.600.000	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0010</b>	<b>Kelurahan Polehan</b>	<b>3.118.290.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>452.500.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>445.000.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	445.000.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>7.500.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.500.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.628.290.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>2.051.972.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.329.472.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	702.500.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>576.318.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	576.318.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>37.500.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>37.500.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	37.500.000	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0011</b>	<b>Kelurahan Jodipan</b>	<b>2.880.928.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>342.308.160</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>342.308.160</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	342.308.160	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.510.567.440</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.782.967.440</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.582.800	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.185.184.640	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	581.200.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>727.600.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	727.600.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>28.052.400</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>28.052.400</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	28.052.400	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0012</b>	<b>Kelurahan Balarjosari</b>	<b>1.957.160.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>349.410.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>341.535.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	341.535.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>7.875.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.875.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.575.950.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.049.550.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.030.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	568.420.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	467.100.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>526.400.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	526.400.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>31.800.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>31.800.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	31.800.000	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>Kecamatan Kedungkandang</b>	<b>53.159.922.310</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>Kecamatan Kedungkandang</b>	<b>22.915.989.160</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>22.306.393.320</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>72.750.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.000.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.750.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>21.097.288.516</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.027.276.160	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	70.012.356	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>98.800.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	98.800.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>379.393.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.246.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.700.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.975.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	247.472.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>129.017.100</b>	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	129.017.100	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>301.789.504</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.400.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.005.600	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.383.904	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>227.355.200</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.811.970	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	183.543.230	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>121.792.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100.000.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100.000.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>21.792.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	21.792.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>245.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>125.000.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	25.000.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>120.000.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	120.000.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>44.658.840</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>44.658.840</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	44.658.840	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>198.145.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>198.145.000</b>	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	198.145.000	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0002</b>	<b>Kelurahan Kedungkandang</b>	<b>2.237.706.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>407.677.250</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>400.000.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	400.000.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>7.677.250</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.677.250	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.806.428.750</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.254.028.750</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	512.128.750	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	729.900.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>552.400.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	552.400.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>23.600.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>23.600.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23.600.000	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0003</b>	<b>Kelurahan Kotalama</b>	<b>3.436.032.150</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>355.500.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>353.000.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	353.000.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>2.500.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.500.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>3.055.532.150</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.960.332.150</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	875.832.150	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.074.500.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>1.095.200.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.095.200.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>25.000.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>25.000.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0004</b>	<b>Kelurahan Mergosono</b>	<b>2.095.912.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>391.412.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>381.412.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	381.412.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>10.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	10.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.674.500.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.026.300.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	343.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	663.300.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>648.200.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	648.200.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>30.000.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>30.000.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0005</b>	<b>Kelurahan Bumiayu</b>	<b>2.635.156.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>421.856.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>400.856.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	400.856.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>21.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	21.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.190.700.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.714.500.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	664.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.035.500.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>476.200.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	476.200.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>22.600.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>22.600.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	22.600.000	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0006</b>	<b>Kelurahan Wonokoyo</b>	<b>1.783.747.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>420.747.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>398.247.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	398.247.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>22.500.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	22.500.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.323.000.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>878.000.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	558.000.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>445.000.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	445.000.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>40.000.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>40.000.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0007</b>	<b>Kelurahan Buring</b>	<b>2.488.639.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>464.982.500</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>407.982.500</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	407.982.500	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>57.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	57.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.953.596.500</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.339.596.500</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.806.500	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	549.590.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	775.200.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>614.000.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	614.000.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>70.060.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>70.060.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	70.060.000	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0008</b>	<b>Kelurahan Lesanpuro</b>	<b>2.487.771.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>417.671.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>407.671.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	407.671.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>10.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	10.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.042.100.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.232.100.000</b>	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	536.600.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	683.500.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>810.000.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	810.000.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>28.000.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>28.000.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	28.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0009</b>	<b>Kelurahan Sawojajar</b>	<b>3.033.730.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>370.184.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>365.184.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	365.184.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>5.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.638.896.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.633.696.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	580.758.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.042.938.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>1.005.200.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.005.200.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>24.650.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>24.650.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.650.000	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0010</b>	<b>Kelurahan Madyopuro</b>	<b>3.361.867.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>478.782.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>453.782.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	453.782.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>25.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	25.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.847.985.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.826.685.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.875.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	958.810.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	852.000.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>1.021.300.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.021.300.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>35.100.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>35.100.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.100.000	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0011</b>	<b>Kelurahan Cemorokandang</b>	<b>2.492.508.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>521.608.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>511.608.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	511.608.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>10.000.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	10.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.940.900.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.361.200.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	646.300.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	699.900.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>579.700.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	579.700.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>30.000.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>30.000.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0012</b>	<b>Kelurahan Arjowinangun</b>	<b>2.317.625.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>554.285.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>477.105.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	477.105.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>77.180.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	77.180.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.722.660.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.118.410.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.590.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	455.420.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	650.400.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>604.250.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	604.250.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>40.680.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>40.680.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.680.000	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0013</b>	<b>Kelurahan Tlogowaru</b>	<b>1.873.240.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>479.898.600</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>459.898.600</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	459.898.600	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>20.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	20.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.358.341.400</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>938.640.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	357.440.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	571.200.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>419.701.400</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	419.701.400	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>35.000.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>35.000.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>Kecamatan Lowokwaru</b>	<b>50.456.482.840</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>Kecamatan Lowokwaru</b>	<b>21.720.435.990</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>21.322.040.990</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>63.195.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.000.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.645.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.250.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.300.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>20.356.843.690</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.284.243.690	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	72.600.000	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>73.060.000</b>	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	73.060.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>50.100.000</b>	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.100.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>480.057.300</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.585.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.950.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.482.300	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.280.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.260.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>12.555.000</b>	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.555.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>164.230.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.750.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.480.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>122.000.000</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>8.125.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>500.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	500.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>7.625.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.625.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>224.020.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>174.020.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30.450.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	87.670.000	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	55.900.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>50.000.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>28.350.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>28.350.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	28.350.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>137.900.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>137.900.000</b>	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	137.900.000	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0002</b>	<b>Kelurahan Lowokwaru</b>	<b>2.989.172.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>377.000.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>375.000.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	375.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>2.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.578.922.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.696.922.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.200.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	813.522.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	866.200.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>882.000.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	882.000.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>33.250.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>33.250.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	33.250.000	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0003</b>	<b>Kelurahan Dinoyo</b>	<b>2.488.105.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>459.587.600</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>444.587.600</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	444.587.600	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>15.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	15.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.995.037.600</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.524.797.500</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	755.500.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	754.297.500	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>470.240.100</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	470.240.100	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>33.479.800</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>33.479.800</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	33.479.800	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0004</b>	<b>Kelurahan Sumbersari</b>	<b>1.746.673.750</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>387.500.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>385.000.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	385.000.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>2.500.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.500.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.323.173.750</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>993.273.750</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	22.080.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	550.593.750	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	420.600.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>329.900.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	329.900.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>36.000.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>36.000.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0005</b>	<b>Kelurahan Ketawanggede</b>	<b>2.191.651.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>475.125.000</b>	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>456.725.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	456.725.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>18.400.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	18.400.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.689.001.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.338.056.800</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.500.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.063.796.800	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	257.760.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>350.944.200</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	350.944.200	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>27.525.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>27.525.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	27.525.000	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0006</b>	<b>Kelurahan Jatimulyo</b>	<b>2.428.869.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>379.781.200</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>358.882.200</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	358.882.200	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>20.899.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	20.899.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.018.887.800</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.133.687.800</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.982.800	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	581.605.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	542.100.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>885.200.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	885.200.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>30.200.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>30.200.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.200.000	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0007</b>	<b>Kelurahan Tunjungsekar</b>	<b>2.426.909.100</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>435.452.400</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>432.188.900</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	432.188.900	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>3.263.500</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3.263.500	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.951.016.700</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.303.384.700</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.879.100	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	861.205.600	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	427.300.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>647.632.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	647.632.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>40.440.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>40.440.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.440.000	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0008</b>	<b>Kelurahan Mojolangu</b>	<b>2.738.215.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>378.940.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>372.440.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	372.440.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>6.500.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6.500.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.330.825.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.178.825.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.500.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	447.625.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	725.700.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>1.152.000.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.152.000.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>28.450.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>28.450.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	28.450.000	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0009</b>	<b>Kelurahan Tulusrejo</b>	<b>2.550.768.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>603.737.500</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>601.137.399</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	601.137.399	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>2.600.101</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.600.101	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.918.030.600</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.150.060.200</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13.500.200	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	401.500.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	735.060.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>767.970.400</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	767.970.400	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>28.999.900</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>28.999.900</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	28.999.900	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0010</b>	<b>Kelurahan Tasikmadu</b>	<b>1.882.927.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>377.537.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>375.537.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	375.537.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>2.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.468.790.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.043.900.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13.500.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	630.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	400.400.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>424.890.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	424.890.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>36.600.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>36.600.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36.600.000	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0011</b>	<b>Kelurahan Tunggulwulung</b>	<b>1.600.794.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>352.290.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>350.000.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	350.000.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>2.290.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.290.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.221.804.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>712.000.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	405.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	296.000.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>509.804.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	509.804.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>26.700.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>26.700.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	26.700.000	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0012</b>	<b>Kelurahan Tlogomas</b>	<b>2.479.258.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>398.718.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>380.118.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	380.118.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>18.600.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	18.600.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.051.590.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.632.440.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.450.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.040.140.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	582.850.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>419.150.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	419.150.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>28.950.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>28.950.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	28.950.000	
<b>7.01.0.00.0.00.04.0013</b>	<b>Kelurahan Merjosari</b>	<b>3.212.705.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>394.995.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>390.795.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	390.795.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>4.200.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4.200.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.787.060.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>2.114.560.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.331.560.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	772.000.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>672.500.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	672.500.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>30.650.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>30.650.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.650.000	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>Kecamatan Sukun</b>	<b>50.281.706.892</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>Kecamatan Sukun</b>	<b>20.777.545.892</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>20.455.335.115</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>56.290.000</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.300.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.490.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>19.418.620.092</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.339.258.892	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	79.361.200	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>57.500.000</b>	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	57.500.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>414.896.800</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.839.800	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.996.800	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.780.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.976.400	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285.303.800	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>35.000.000</b>	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>270.897.175</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.640.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.999.800	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	173.257.375	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>202.131.048</b>	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.116.048	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.015.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>31.520.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>25.000.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.000.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>6.520.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6.520.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>250.820.777</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>39.000.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.500.000	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	22.500.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>211.820.777</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	211.820.777	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>9.920.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>9.920.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.920.000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>29.950.000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>29.950.000</b>	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	29.950.000	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0002</b>	<b>Kelurahan Sukun</b>	<b>3.439.951.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>355.450.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>350.000.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	350.000.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>5.450.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5.450.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>3.062.901.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>2.120.101.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.173.001.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	932.100.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>942.800.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	942.800.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>21.600.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>21.600.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21.600.000	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0003</b>	<b>Kelurahan Ciptomulyo</b>	<b>2.090.026.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>605.492.700</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>600.267.700</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	600.267.700	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>5.225.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5.225.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.459.903.300</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>948.103.800</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.250.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	404.030.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	529.823.800	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>511.799.500</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	511.799.500	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>24.630.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>24.630.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.630.000	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0004</b>	<b>Kelurahan Gadang</b>	<b>2.893.072.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>319.522.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>318.022.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	318.022.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>1.500.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.500.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.551.950.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.789.150.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.500.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	925.950.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	846.700.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>762.800.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	762.800.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>21.600.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>21.600.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21.600.000	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0005</b>	<b>Kelurahan Kebonsari</b>	<b>2.084.347.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>445.047.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>440.047.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	440.047.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>5.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.614.300.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.102.300.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	275.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	815.300.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>512.000.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	512.000.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>25.000.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>25.000.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0006</b>	<b>Kelurahan Bandungrejosari</b>	<b>3.559.742.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>500.000.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>475.000.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	475.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>25.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	25.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>3.038.142.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.915.582.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	676.622.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.223.960.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>1.122.560.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.122.560.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>21.600.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>21.600.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21.600.000	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0007</b>	<b>Kelurahan Tanjungrejo</b>	<b>4.127.834.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>377.393.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>373.393.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	373.393.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>4.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>3.727.241.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>2.733.813.200</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.353.200	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.806.141.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	909.319.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>993.427.800</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	993.427.800	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>23.200.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>23.200.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23.200.000	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0008</b>	<b>Kelurahan Pisangcandi</b>	<b>2.254.319.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>448.619.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>427.119.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	427.119.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>21.500.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	21.500.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.782.200.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>981.000.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	361.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	600.000.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>801.200.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	801.200.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>23.500.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>23.500.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23.500.000	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0009</b>	<b>Kelurahan Karangbesuki</b>	<b>2.224.517.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>467.032.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>465.579.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	465.579.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>1.453.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.453.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.723.485.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.033.485.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.500.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	465.985.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	550.000.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>690.000.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	690.000.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>34.000.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>34.000.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	34.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0010</b>	<b>Kelurahan Bandulan</b>	<b>2.319.276.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>533.156.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>528.156.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	528.156.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>5.000.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.761.120.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.233.620.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	576.582.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	641.038.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>527.500.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	527.500.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>25.000.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>25.000.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.000.000	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0011</b>	<b>Kelurahan Mulyorejo</b>	<b>2.503.317.000</b>	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>279.907.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>273.257.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	273.257.000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>6.650.000</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6.650.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.200.210.000</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.527.810.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	982.170.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	530.640.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>672.400.000</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	672.400.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>23.200.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>23.200.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23.200.000	
<b>7.01.0.00.0.00.05.0012</b>	<b>Kelurahan Bakalankrajan</b>	<b>2.007.760.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>429.047.800</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>423.520.900</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	423.520.900	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>5.526.900</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5.526.900	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.553.612.200</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.114.097.900</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.045.400	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	665.302.500	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	438.750.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>439.514.300</b>	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	439.514.300	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>25.100.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>25.100.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.100.000	
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>		
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>16.705.116.031</b>	
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>16.705.116.031</b>	
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>16.705.116.031</b>	
<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.244.012.775</b>	
<b>8.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>178.513.500</b>	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.167.500	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	126.346.000	
<b>8.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.699.562.031</b>	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.699.562.031	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>8.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>9.889.000</b>	
8.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.889.000	
<b>8.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>11.000.000</b>	
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11.000.000	
<b>8.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>439.330.870</b>	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	73.819.900	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	365.510.970	
<b>8.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>507.208.680</b>	
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	507.208.680	
<b>8.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>996.539.093</b>	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	133.525.150	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.461.455	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	768.552.488	
<b>8.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>401.969.601</b>	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	208.027.413	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	193.942.188	
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>284.646.120</b>	
<b>8.01.02.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>284.646.120</b>	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	284.646.120	
<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>4.535.699.297</b>	
<b>8.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala</b>	<b>4.535.699.297</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	<b>Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>		
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	4.005.554.000	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	530.145.297	
<b>8.01.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>412.417.467</b>	
<b>8.01.04.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>412.417.467</b>	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	412.417.467	
<b>8.01.05</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>1.277.341.164</b>	
<b>8.01.05.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>1.277.341.164</b>	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.277.341.164	
<b>8.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>2.950.999.208</b>	
<b>8.01.06.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>2.950.999.208</b>	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.950.999.208	